



RANCANGAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SALATIGA TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA



RANCANGAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SALATIGA TAHUN 2026



bit.ly/rkpdsalatiga

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR.....v

DAFTAR GRAFIKvi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD..... I-7

1.4. Maksud dan Tujuan I-9

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1

2.1.1. Kondisi Geografi II-1

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-3

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-5

2.1.4. Aspek Demografi II-7

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-10

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-10

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-23

2.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II-27

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-27

2.3.2. Daya Saing SDM..... II-34

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-39

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi..... II-44

2.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-45

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026..... II-46

2.6 Permasalahan Pembangunan II-46

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-1

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah III-6

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga..... III-9

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-11

3.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.2.2.	Kebijakan Belanja Daerah.....	III-17
3.2.3.	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2.	Prioritas Pembangunan.....	IV-11
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-11
4.2.2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-21
4.2.3.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-22
4.2.4.	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional	IV-40
4.2.5.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-70
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....		V-1
5.1.	Rencana Kerja	V-2
5.1.1.	Rencana Kerja Prioritas Pertama	V-2
5.1.2.	Rencana Kerja Prioritas Kedua	V-73
5.2.	Pendanaan Daerah	V-97
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....		VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.3.	Indikator Kinerja Program	VI-10
6.4.	Indikator Utama Pembangunan	VI-47
BAB VII PENUTUP		VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026.....	5
Gambar 1. 2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga	9
Gambar 2. 1	Peta Kota Salatiga.....	2
Gambar 2. 2	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	4
Gambar 2. 3	Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga	7
Gambar 3. 1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024	4
Gambar 3. 2.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2024	6
Gambar 3. 3.	Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2024	7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	8
Grafik 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2020-2024	11
Grafik 2. 3	Indeks Gini Tahun 2021-2023.....	11
Grafik 2. 4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024	12
Grafik 2. 5	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	13
Grafik 2. 6	Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	14
Grafik 2. 7	Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	15
Grafik 2. 8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024	15
Grafik 2. 9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	16
Grafik 2. 10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020– 2024	16
Grafik 2. 11.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	17
Grafik 2. 12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2024	18
Grafik 2. 13.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020- 2024.....	19
Grafik 2. 14.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	20
Grafik 2. 15.	Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	22
Grafik 2. 16.	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%).....	22
Grafik 2. 17.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024(%).....	23
Grafik 2. 18.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023.....	24
Grafik 2. 19.	Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	25

Grafik 2. 20. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 26

Grafik 2. 21. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 26

Grafik 2. 22. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024..... 27

Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)..... 32

Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah) 33

Grafik 2. 25. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III)..... 33

Grafik 2. 26. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024..... 34

Grafik 2. 27. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 35

Grafik 2. 28. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 36

Grafik 2. 29. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2023 36

Grafik 2. 30. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023..... 37

Grafik 2. 31. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023..... 37

Grafik 2. 32. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023..... 38

Grafik 2. 33. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 38

Grafik 2. 34. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2020-2023..... 39

Grafik 2. 35. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... 40

Grafik 2. 36. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 41

Grafik 2. 37. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... 41

Grafik 2. 38. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... 44

Grafik 2. 39. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2. 2	Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2019-2024.....	9
Tabel 2. 3	Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024	9
Tabel 2. 4	Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	10
Tabel 2. 5	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga.....	21
Tabel 2. 6	Data Stunting Kota Salatiga 2019-2023.....	27
Tabel 2. 7	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)	28
Tabel 2. 8	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024(dalam miliar rupiah)	29
Tabel 2. 9	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	30
Tabel 2. 10	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	30
Tabel 2. 11	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen).....	31
Tabel 2. 12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2019-2023	32
Tabel 3. 1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026	6
Tabel 3. 2.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026.....	6
Tabel 3. 3.	Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 , 2024 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026	10
Tabel 3. 4.	Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026.....	12
Tabel 3. 5.	Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2022 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2024	15
Tabel 3. 6.	Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2025, Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027	16
Tabel 3. 7.	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024, anggaran 2025 dan Proyeksi tahun 2026	20

Tabel 3. 8.	Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026.....	29
Tabel 3. 9.	Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2026 dan 2027	30
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2026 berdasarkan hasil capaian tahun 2024	2
Tabel 4. 2.	Keselaran Visi dan Misi Wali Kota Salatiga dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	9
Tabel 4. 3.	Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2026.....	12
Tabel 4. 4.	Keselaran Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026	25
Tabel 4. 5.	Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026	30
Tabel 4. 6.	Keselaran Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2026 sesuai Ranwal RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah	33
Tabel 4. 7.	Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026	36
Tabel 4. 8.	Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	39
Tabel 4. 9.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting	42
Tabel 4. 10.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM	52
Tabel 4. 11.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kota Salatiga Tahun 2026.....	57
Tabel 4. 12.	Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs.....	63
Tabel 5. 1	penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi.....	3
Tabel 5. 2	Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2026.....	42
Tabel 5. 3	Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2026.....	55
Tabel 5. 4	Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2026.....	61
Tabel 5. 5	Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2026.....	98
Tabel 6. 1.	Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026	1

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 4

Tabel 6. 3. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026 11

Tabel 6. 4. Indikator Utama Pemabngunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 47

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan :



Hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2024,



Isu-isu strategis yang berkembang,



Kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional,



Regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya



Kedudukan, peran, dan fungsi strategis Dokumen RKPD Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

SECARA SUBSTANSIAL

Memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana rencana kerja yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun.

SECARA NORMATIF

Menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS R-APBD;

SECARA OPERASIONAL

Memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan

SECARA FAKTUAL

Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, berbasis risiko (risk-based planning), dan berbasis pada riset (research-based planning), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah “Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Selanjutnya, karena penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara paralel, RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, mempertimbangkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2025. Dengan berpedoman pada kebijakan periode tahun terakhir dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Salatiga yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur dan Berbagi”. Selain itu RKPD tahun 2026 juga mendukung kebijakan periode pertama (2025-2029) dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada “Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Penjelasan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 - d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
 - i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Salatiga merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga.

Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Tahun 2026

Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

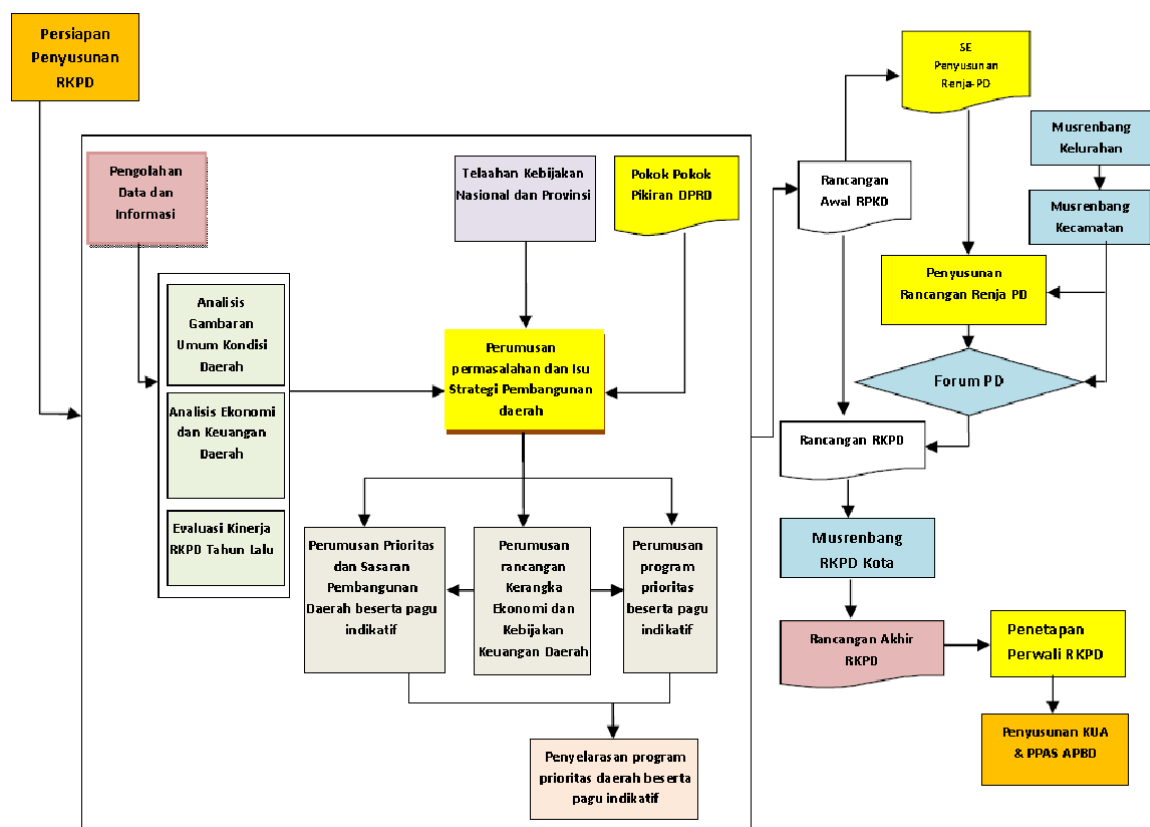
Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

- Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
 33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

2. RKPD dengan Teknokratik RPJMD 2025-2029

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD yang telah disusun.

RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan RPD 2023-2026

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPD Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kota Salatiga.

4. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

5. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

6. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

8. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

9. RKPD dan SPM

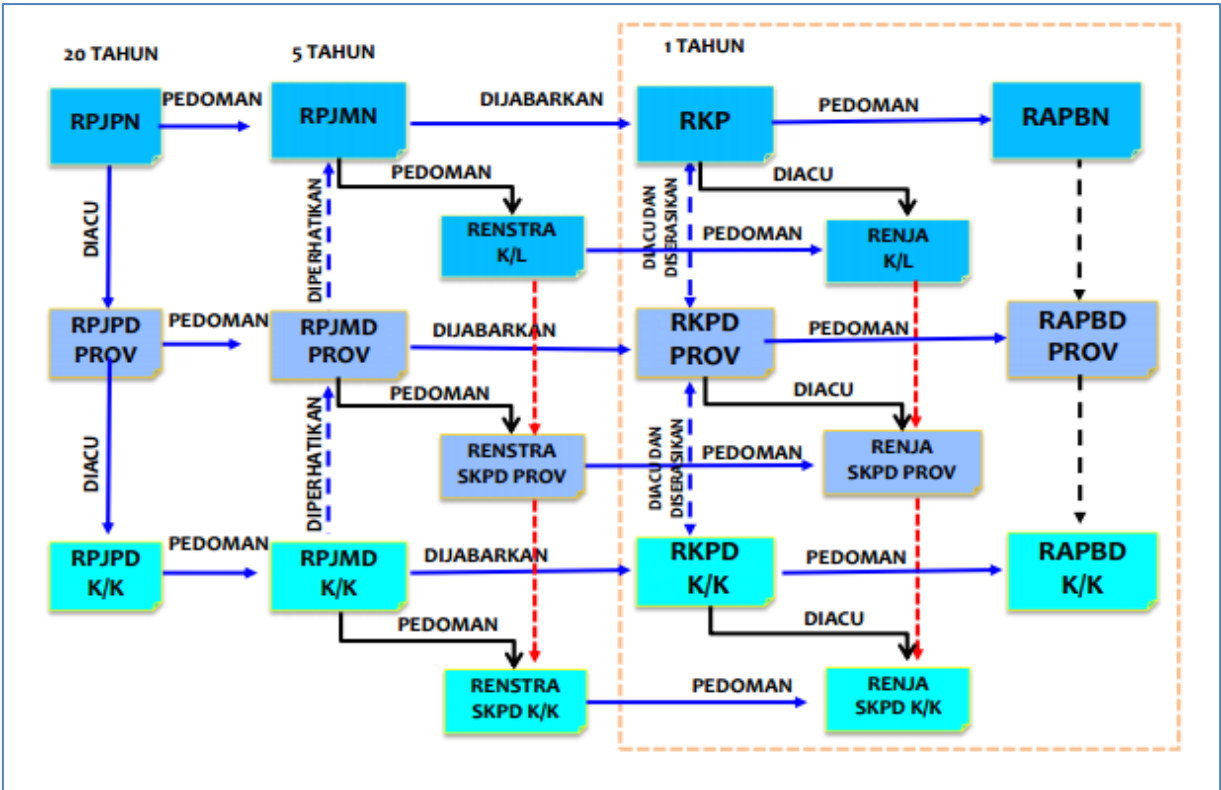
Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

10. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga



Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, RKP Kota Salatiga tahun 2026 juga mengacu pada dokumen-dokumen sektoral yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045;

- 3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 bertujuan untuk :

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
- 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di Kota Salatiga.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-

sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024, keterkaitannya dengan RPJPD dan teknokratik RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

REALISASI			TARGET	%
INDIKATOR MAKRO			2024	CAPAIAN
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	85,10	100,73%
	84,99	85,72		
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	4,86-5,44	100 %
	5,37	5,54		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	5,70-5,20	125,77%
	4,57	3,86		
	Tingkat Kemiskinan (persen)			
	Tahun 2023	Tahun 2024	4,32-4,18	94,21%
	4,66	4,57		

Gambaran Umum Kondisi Daerah ditunjukkan dengan Capaian Kinerja dari 4 Aspek Pembangunan, yaitu :

- Aspek Geografis dan Demografis**

 - 1.Kondisi Geografi
 - 2.Potensi Pengembangan Wilayah
 - 3.Wilayah Rawan Bencana
 - 4.Demografi
- Aspek Daya Saing**

 - 1.Daya Saing Ekonomi
 - 2.Daya Saing SDM
 - 3.Daya Saing Infrastruktur
 - 4.Daya Saing Iklim Investasi
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

 - 1.Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.Kesejahteraan Sosial Budaya
- Aspek Pelayanan Umum**

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat
Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga	
Indeks Literasi Masyarakat belum optimal	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk
Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal	
Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi lokal
Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	
Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang dan pengelolaan lingkungan;
Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal	
Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- Daerah Bergelombang $\pm 65\%$, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
- Daerah Miring $\pm 25\%$, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
- Daerah Datar $\pm 10\%$, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Latosol Coklat

Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

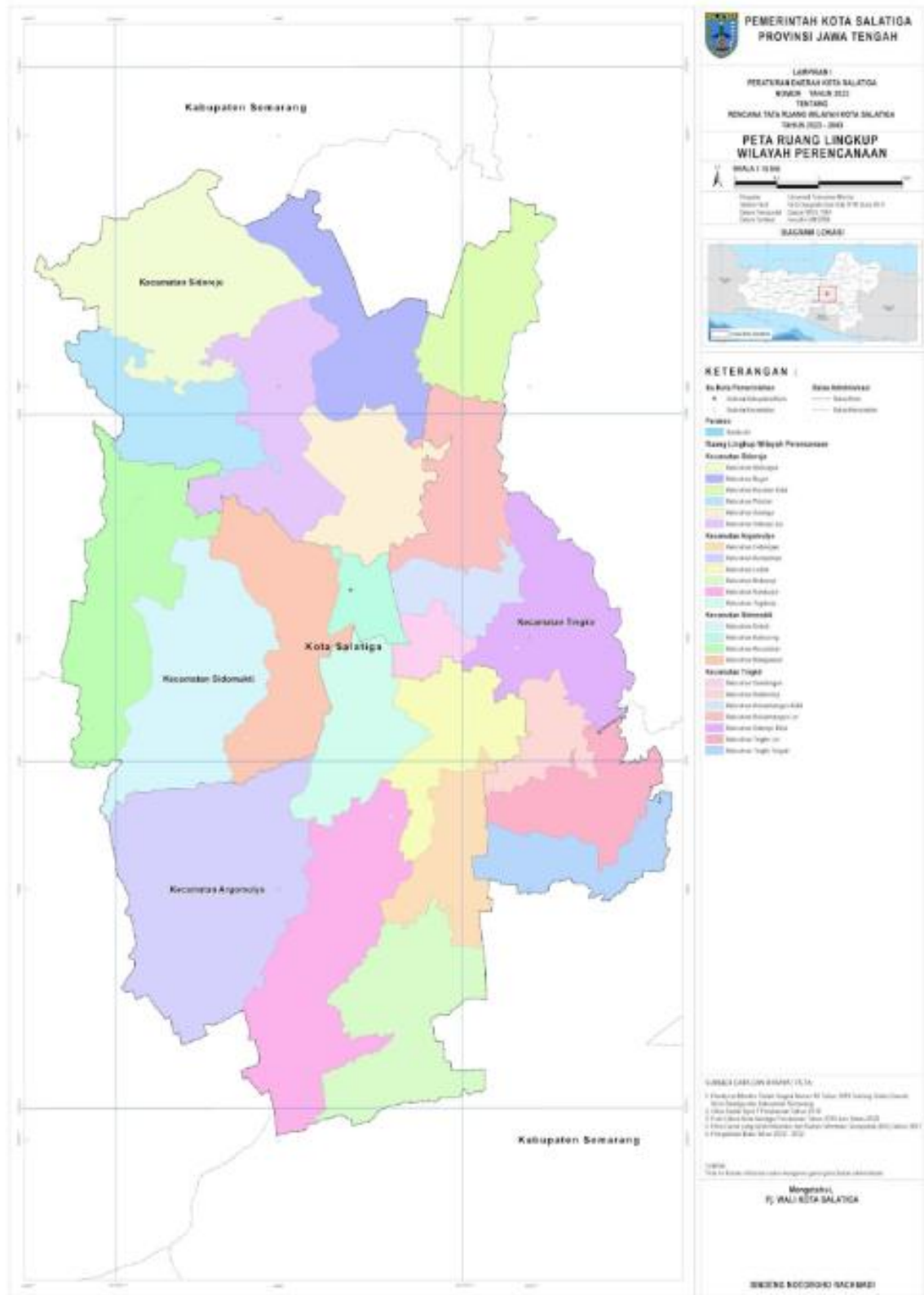
b. Tanah Latosol Coklat Tua

Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara.

Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

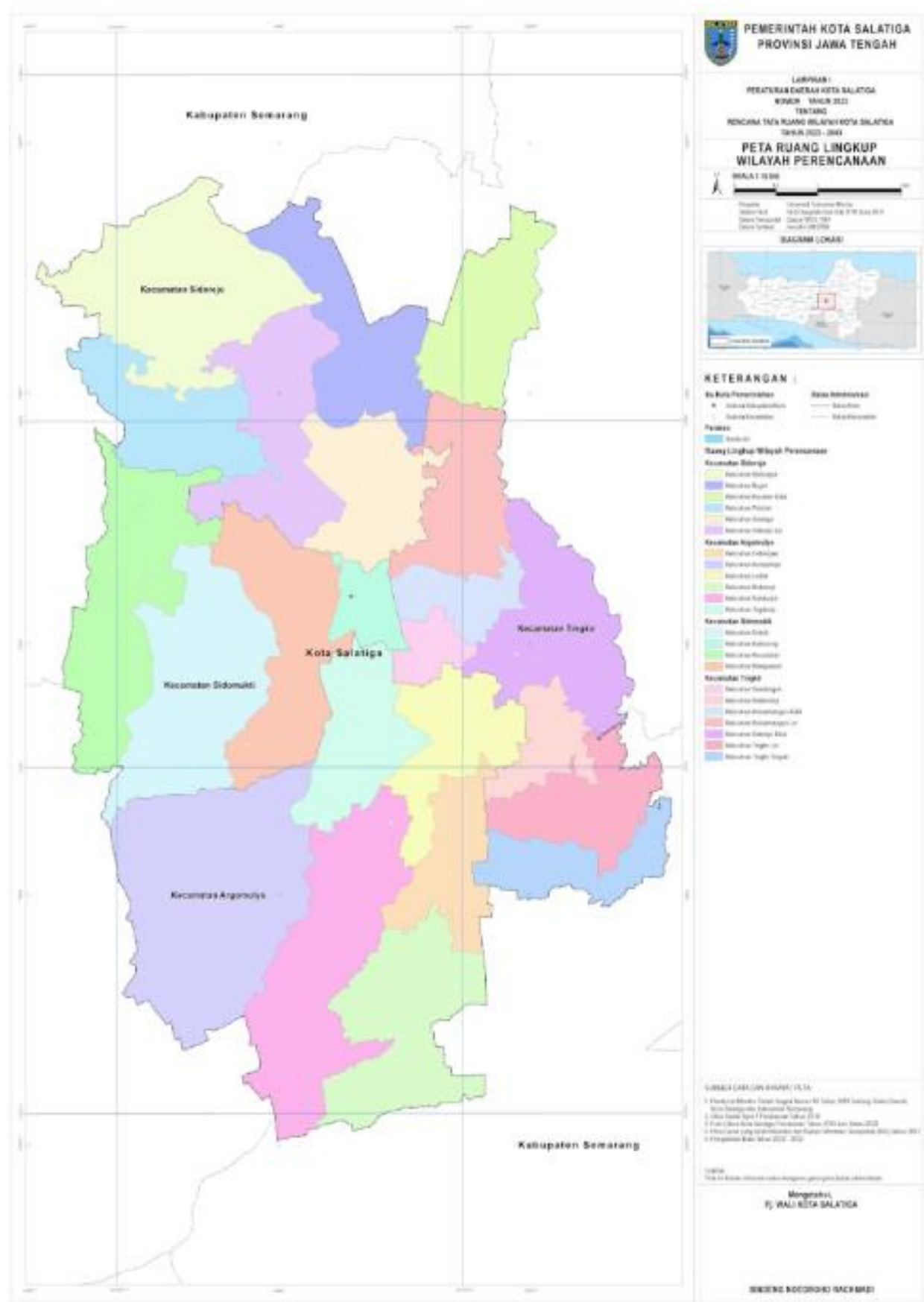
Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga berjarak $\pm$ 53 kilometer dari Kota Surakarta dan $\pm$ 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit. Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain di dukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Gambar 2. 2 Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan Pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Salatiga** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah yang meliputi :
- 1) **SPPK Sidorejo** yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
 - 2) **SPPK Tingkir** yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
 - 3) **SPPK Argomulyo** yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
 - 4) **SPPK Sidomukti** yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan, permukiman dan perdagangan dan jasa berada di:
- 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Cebongan;
 - 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh;
 - 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas Kelurahan Blotongan; Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan;
 - 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Peningkatan dan Pembangunan jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;

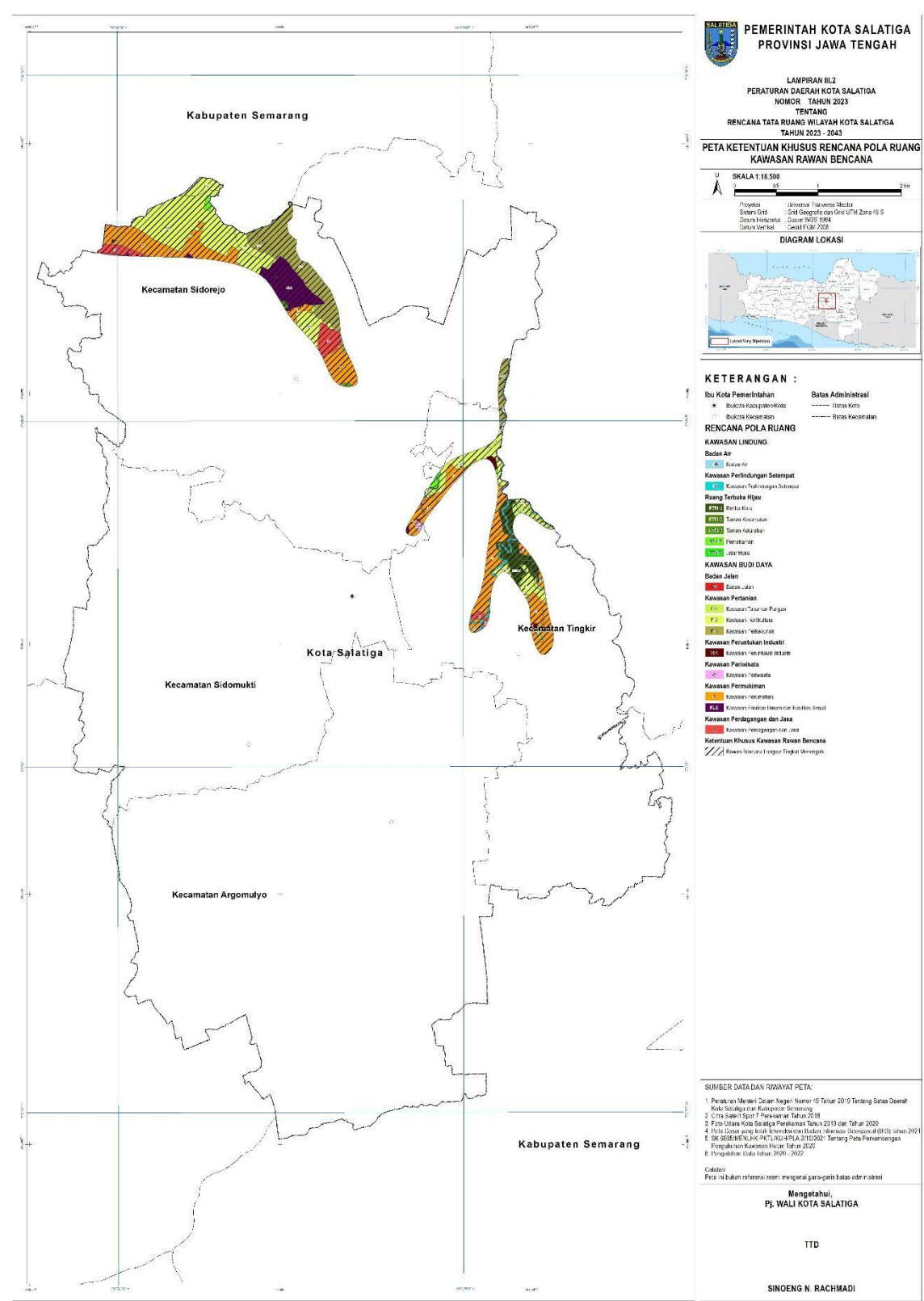
- c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
- d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
- e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.

Sedangkan untuk tempat evakuasi bencana meliputi :

- a. Lapangan Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- c. Ruang/Bangunan lainnya.

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

2.1.4. Aspek Demografi

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2024 sebanyak 198.971 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 201.369 jiwa, maka mengalami penurunan jumlah penduduk sebanyak 2.398 jiwa atau 1,19%. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98.571 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.400 jiwa artinya

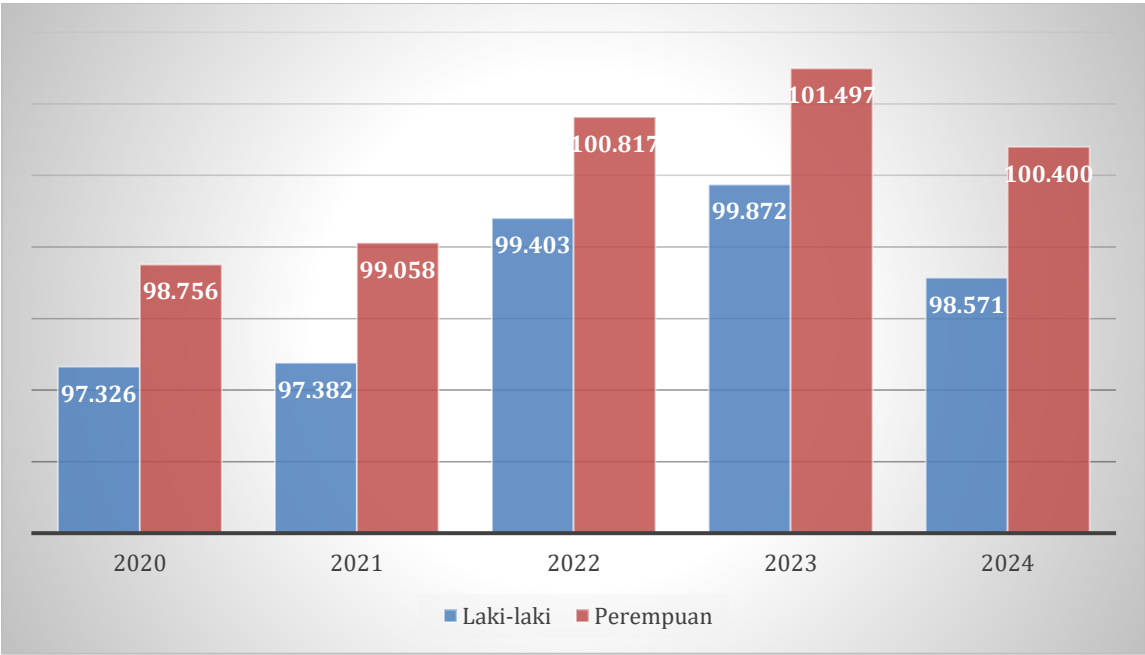
penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 98,17%, menurun sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2023 sebesar 98,39%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
2.	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
3.	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
4.	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
5.	2024	98.571	100.400	198.971	98,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Grafik 2. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2024 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.755 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 46.634 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2019-2024

Tahun	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	Kota Salatiga
2020	50.261	46.937	44.162	54.722	196.082
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220
2023	52.045	48.106	46.125	55.093	201.369
2024	51.376	47.206	45.634	54.755	198.971

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 25.838 jiwa atau sebesar 12,98% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia kurang dari 1 tahun sebanyak 1.735 jiwa atau sebesar 0.87% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0 sd.1	859	876	1.735	0,87
2.	1 sd 5	6.699	6.142	12.841	6,45
3.	6 sd 10	7.467	6.935	14.402	7,24
4.	11 s.d. 15	8.120	7.809	15.929	8,01
5.	16 s.d. 20	7.815	7.353	15.168	7,62
6.	21 s.d. 25	7.279	7.120	14.399	7,24
7.	26 s.d. 30	7.352	7.319	14.671	7,37
8.	31 s.d. 35	7.084	7.044	14.128	7,10
9.	36 s.d. 40	6.968	7.247	14.215	7,14
10.	41 s.d. 45	8.398	8.503	16.901	8,49
11.	46 s.d. 50	7.124	7.197	14.321	7,19
12.	51 s.d. 55	6.204	6.769	12.973	6,52
13.	56 s.d. 60	5.399	6.051	11.450	5,75
14.	Lebih dari 60	11.803	14.035	25.838	12,98
Jumlah 2024		98.571	100.400	198.971	
2023		99.872	101.497	201.369	
2022		99.403	99.058	200.220	
2021		97.382	98.629	196.440	
2020		96.989	98.629	196.082	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2024

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan pendidikan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1.	Tidak/Belum Sekolah	44.106	Jiwa
2.	Belum Taman SD/Sederajat	19.030	Jiwa
3.	Tamat SD/ sederajat	26.783	Jiwa
4.	SLTP/ Sederajat	26.828	Jiwa
5.	SLTA/ Sederajat	52.181	Jiwa
6.	Diploma I/II	1.822	Jiwa
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.055	Jiwa
8.	Diploma IV/Strata I	19.130	Jiwa
9.	Strata II	1.846	Jiwa
10.	Strata III	190	Jiwa
Jumlah		198.971	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, dan (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

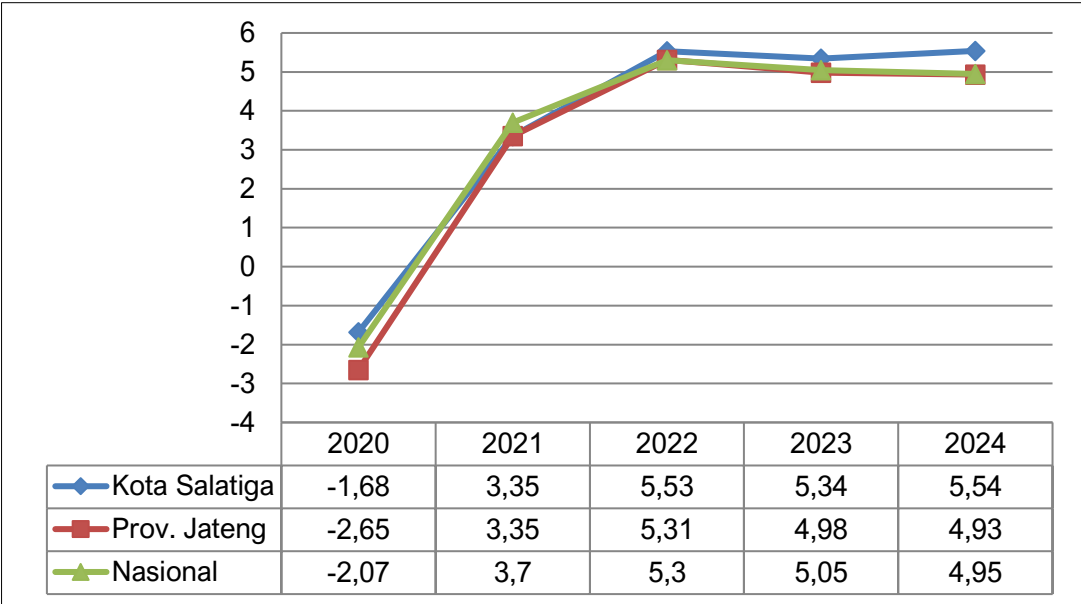
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2020-2024) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 (Triwulan III) tercatat sebesar 5,54% atau mengalami kenaikan sebesar 0,20% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,34%. Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga masih lebih tinggi 0,36% jika dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,93% dan lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi secara nasional sebesar 4,95%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2020-2024

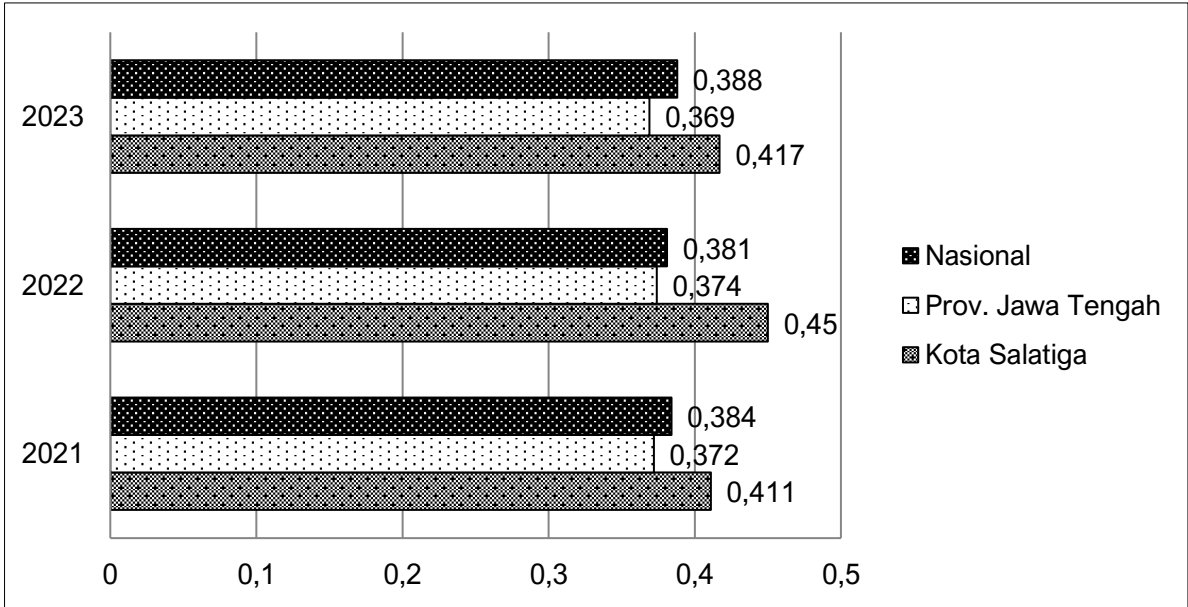


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

b. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung fluktuatif, yaitu pada tahun 2022 sebesar 0,45 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,417. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kota Salatiga tergolong sedang. Indeks Gini di hitung kembali pada tahun 2021, penilaian ketimpangan pemerataan pendapatan tidak dihitung sampai dengan tingkat Kota (hanya tingkat Provinsi) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data ketimpangan pendapatan disajikan pada berikut ini.

Grafik 2. 3 Indeks Gini Tahun 2021-2023

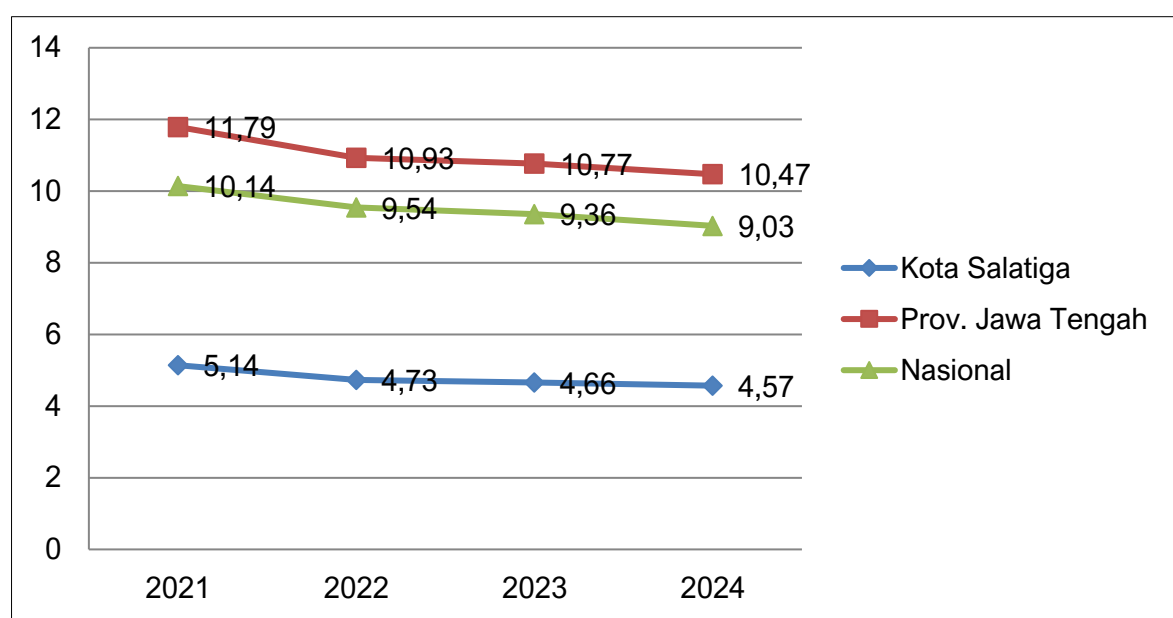


Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

c. Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 4,57% menurun 0,09 dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 4,66%. Capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,47% dan Nasional sebesar 9,03%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah setelah Kota Semarang yaitu dengan persentase penduduk miskin 4,03%. Kondisi ini masih sama dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Angka kemiskinan Kota Salatiga tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan dibanding kondisi sebelum pandemi Covid-19. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

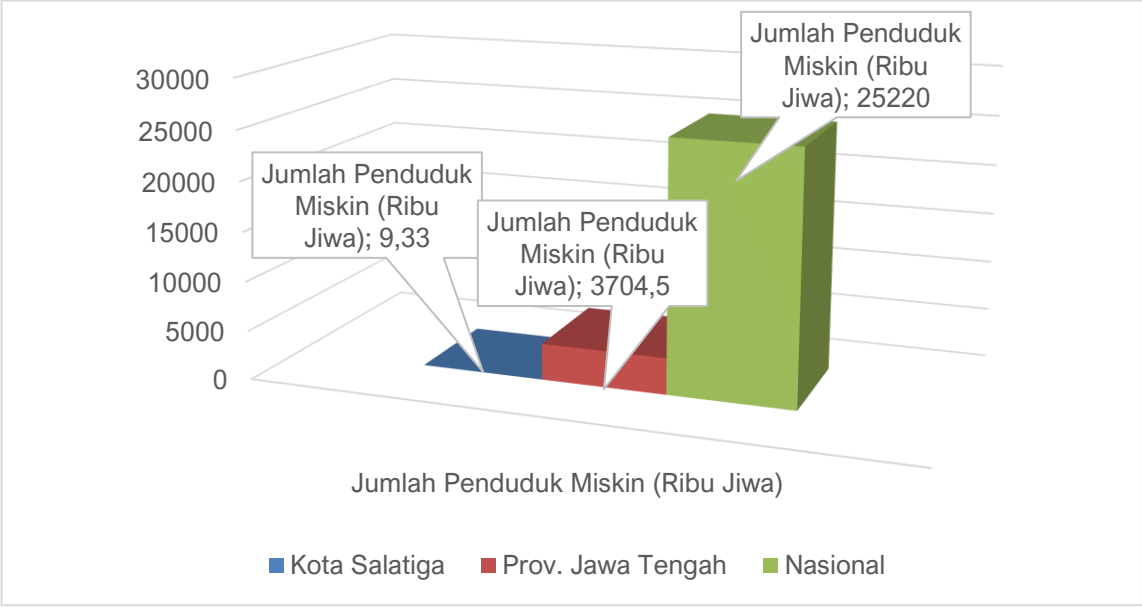
Grafik 2. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Dilihat dari sisi jumlahnya penduduk miskin Kota Salatiga pada Tahun 2024 menurun menjadi 9.330 jiwa daripada Tahun 2023 sebesar 9.410 jiwa yang masih diberada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.704.330 jiwa dan Nasional sebesar 25.220.000 orang (Maret 2024) sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

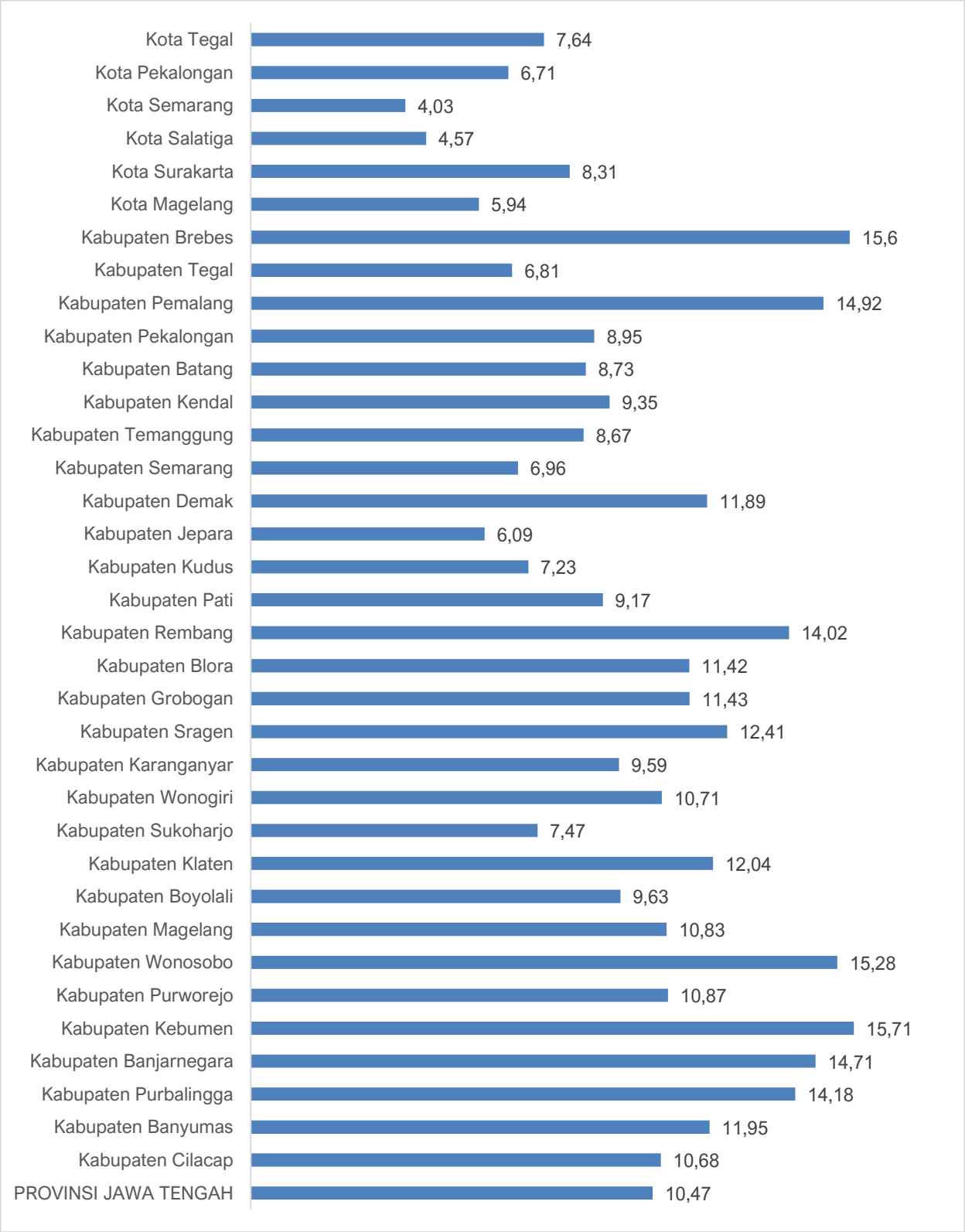


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Berdasarkan data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah seperti pada tabel, capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 4,57%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,71%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,03%.

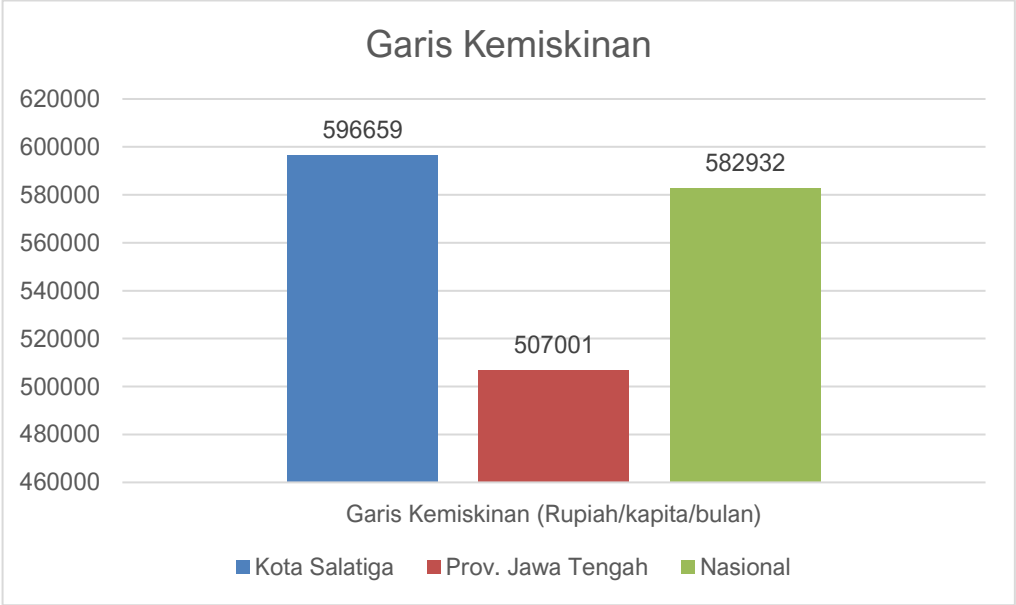
Grafik 2. 6 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Tahun 2024 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp.596.659,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.507.001,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.582.932,- (Maret 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7 Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2024

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2024 tercatat naik Rp. 596.659,- jika dibandingkan pada Tahun 2023 Rp. 565.031,- mengalami kenaikan Rp. 31.628,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

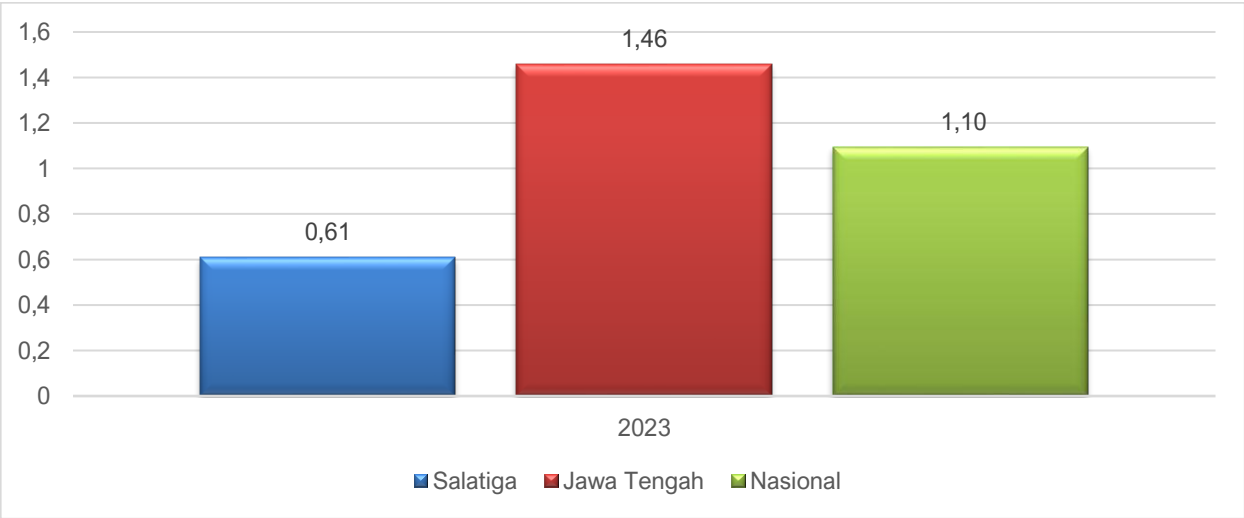
Grafik 2. 8 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah sebesar 0,61. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

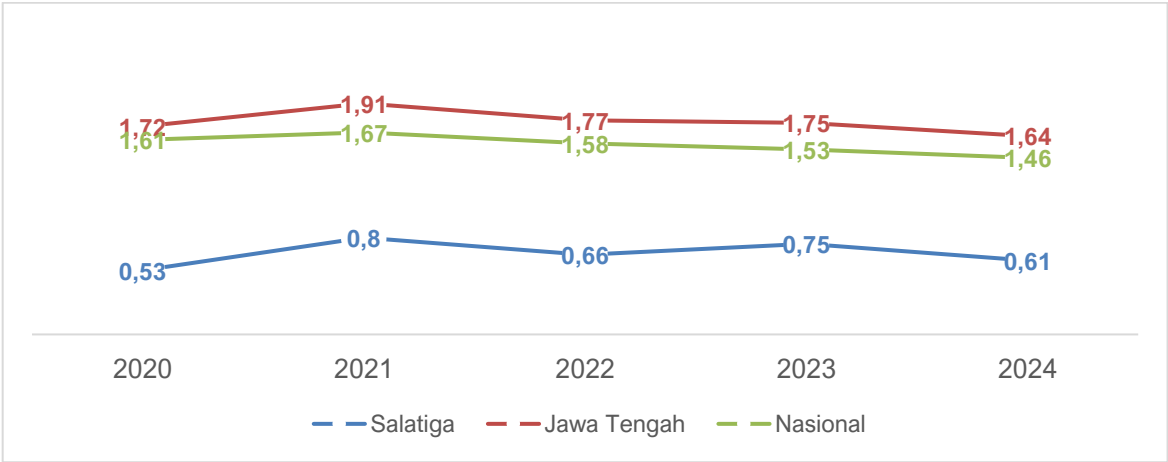
Grafik 2. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,61. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2020-2024 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Maret 2024) dapat dilihat pada grafik berikut:

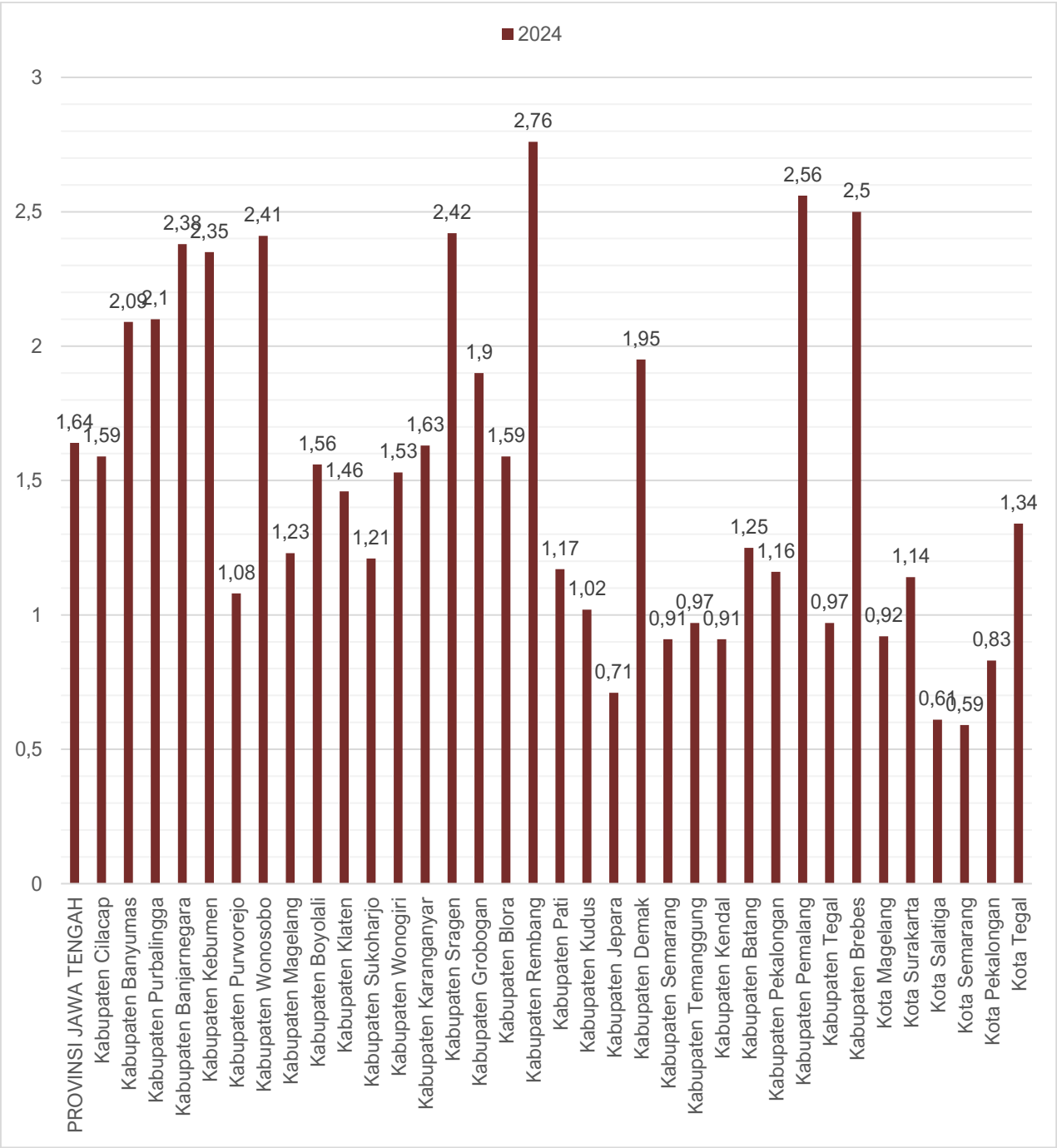
Grafik 2. 10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020– 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,61%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,76%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,59%.

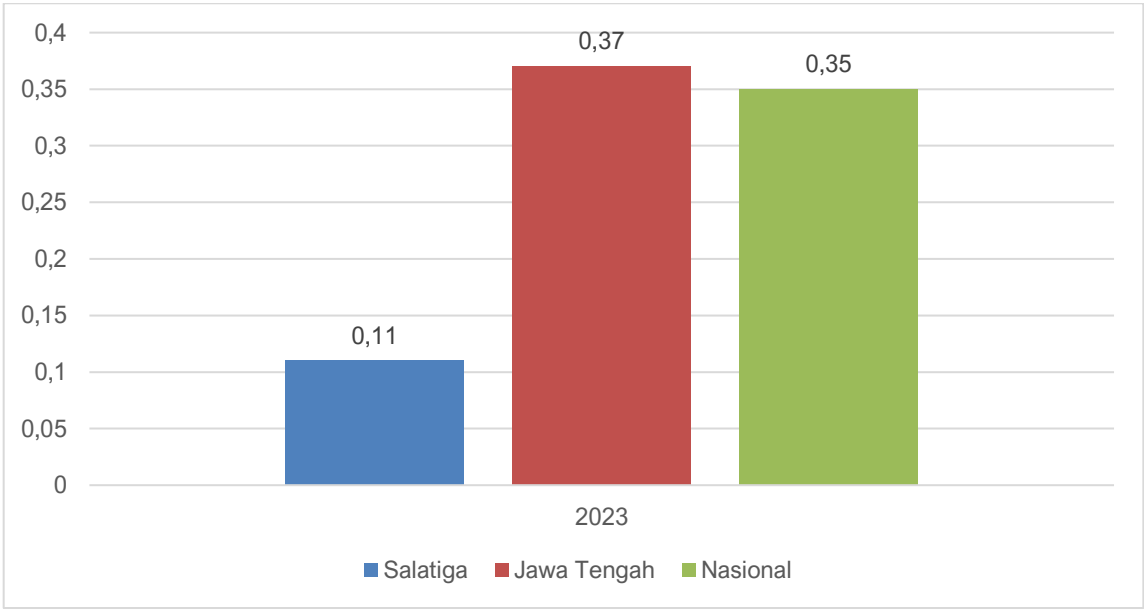
Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,11 Provinsi Jawa Tengah 0,37 dan nasional (Maret 2023) sebesar 0,35. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian Kota Salatiga pada tahun 2024 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

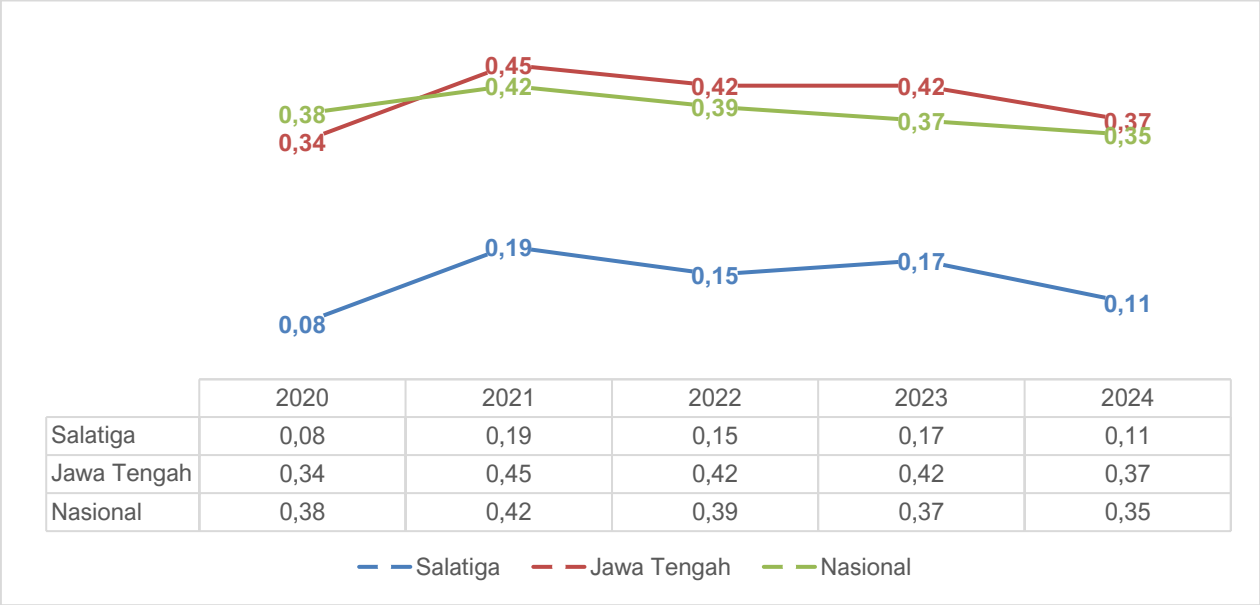
Grafik 2. 12. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2019 0.20 turun menjadi 0.08 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0.19 lalu menjadi 0.15 pada tahun 2022 dan 0.17 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.11. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

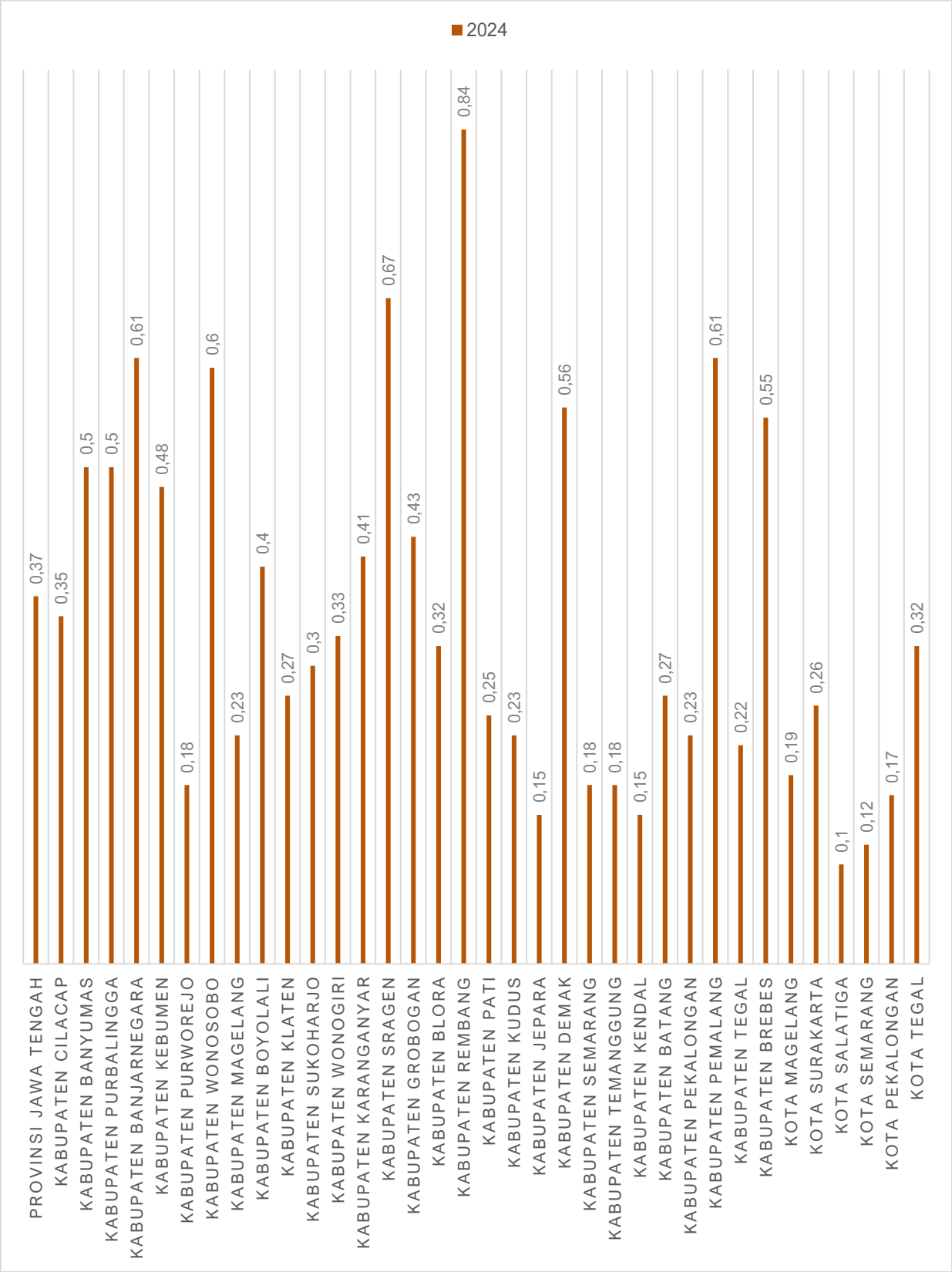
Grafik 2. 13. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020- 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 1 terbawah sebesar 0,11%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,84%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Salatiga dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,11%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Data Kemiskinan telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomoe 000.7.2/270/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berjumlah 4.815 kepala rumah tangga miskin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga

No	Kecamatan	Kelurahan	KRT Aktif
1	Argomulyo	Cebongan	163
2	Argomulyo	Kumpulrejo	319
3	Argomulyo	Ledok	240
4	Argomulyo	Noborejo	359
5	Argomulyo	Randuacir	196
6	Argomulyo	Tegalrejo	159
7	Sidomukti	Dukuh	231
8	Sidomukti	Kalicacing	89
9	Sidomukti	Kecandran	273
10	Sidomukti	Mangunsari	409
11	Sidorejo	Blotongan	278
12	Sidorejo	Bugel	44
13	Sidorejo	Kauman Kidul	54
14	Sidorejo	Pulutan	217
15	Sidorejo	Salatiga	172
16	Sidorejo	Sidorejo Lor	244
17	Tingkir	Gendongan	51
18	Tingkir	Kalibening	123
19	Tingkir	Kutowinangun Kidul	217
20	Tingkir	Kutowinangun Lor	361
21	Tingkir	Sidorejo Kidul	360
22	Tingkir	Tingkir Lor	201
23	Tingkir	Tingkir Tengah	55

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Beberapa Indikator Intervensi Penghapusan Kemiskinan diantaranya: jamban/sanitasi layak, sumber air minum layak, sambungan listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, individu tidak bekerja dan rumah tangga berisiko stunting.

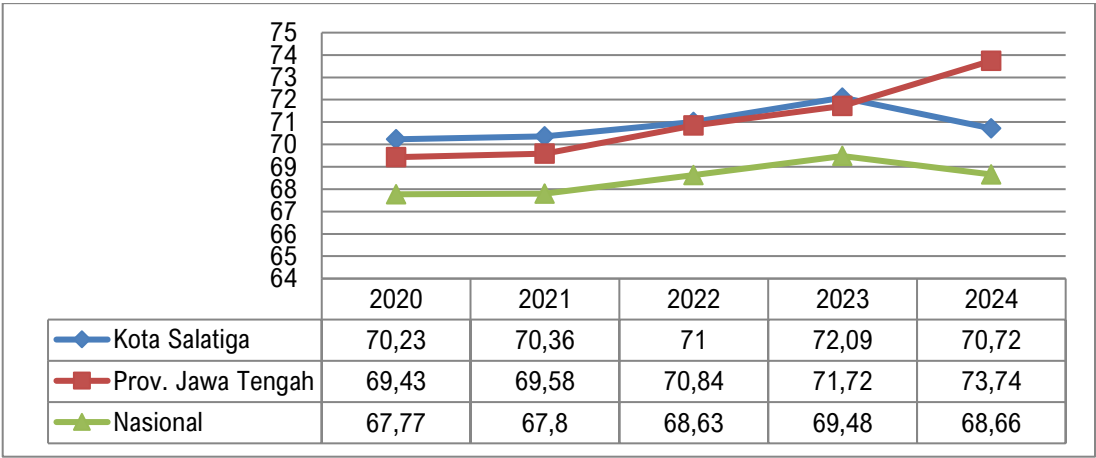
d. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. TPAK sendiri merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 70,72% mengalami penurunan 1,37% dari tahun 2023 sebesar 72,09%. Capaian Kota Salatiga pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74% dan di atas capaian Nasional sebesar 68,66%.

Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada grafik di bawah ini.

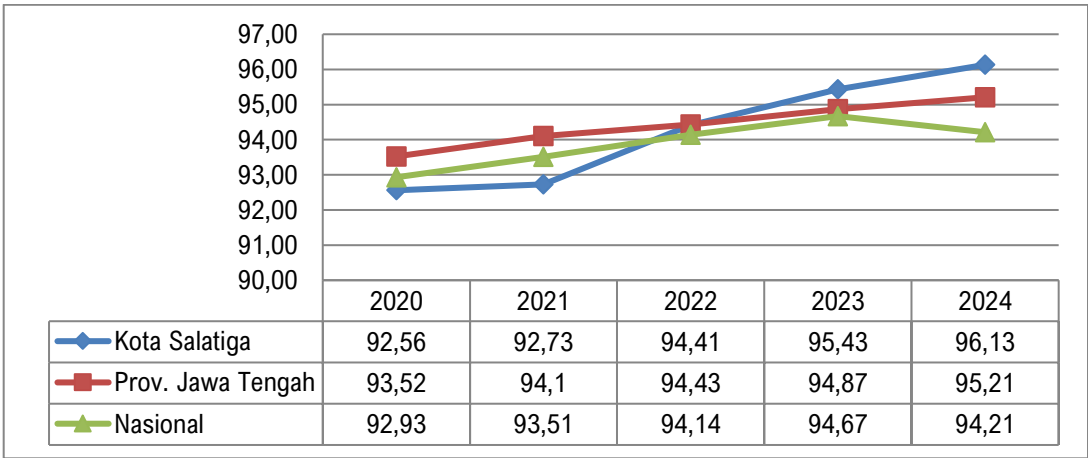
Grafik 2. 15. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukan tren yang cenderung membaik. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor manufaktur, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan

dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

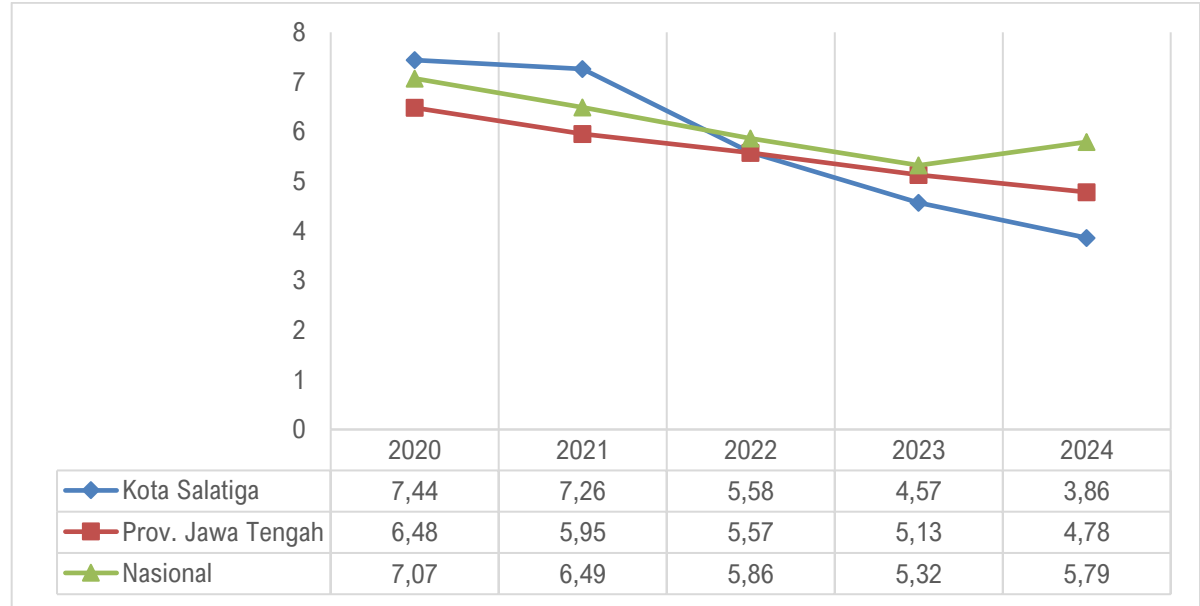
Pengangguran terbuka meliputi :

- penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2024 yaitu 3,86% mengalami penurunan sebesar 0,71% dari tahun 2023 sebesar 4,57%. Berarti di antara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 3 sampai 4 orang penganggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 17. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024(%)



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Angka Harapan Hidup

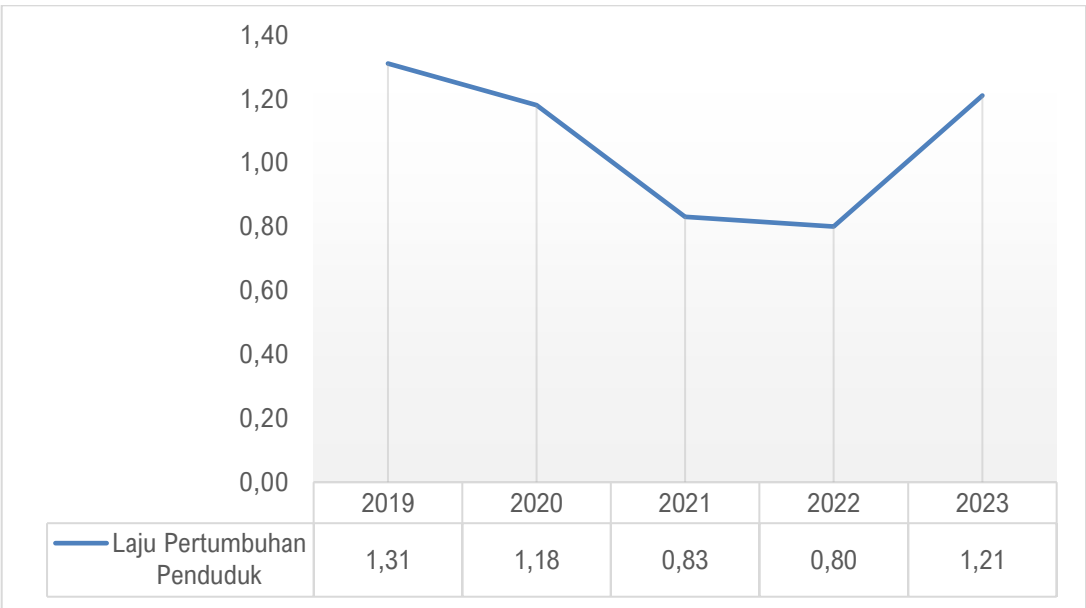
Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2024, Angka Harapan Hidup di Kota Salatiga meningkat sebesar 1,77 tahun. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup di Kota Salatiga tercatat sebesar 76,50 tahun, dan sebelas tahun kemudian atau di tahun 2024 mencapai 78,27 tahun.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 yaitu 1,34% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,83%. Data capaian kinerja didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga sebesar 1,21% sehingga tingkat keberhasilannya sebesar 109,7%.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan ini diantaranya terjalannya komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan serta penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit. Pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Modus Operasi Wanita (MOW).

Grafik 2. 18. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

c. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Pada tahun 2023 angka kemiskinan ditargetkan 4.67- 4,59 dan terealisasi 4,66 di akhir RPD ditargetkan 4,67-4.59, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dengan status Tercapai. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja ini diantaranya melaksanakan koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial. Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 70% terealisasi 82,48% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2023 sebesar 117.82 dengan status Tercapai.

d. Pola Pangan Harapan

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 sebesar 91,8, tahun 2018 sebesar 91, tahun 2019 sebesar 93,5, tahun 2020 sebesar 93,9, tahun 2021 sebesar 90,0, tahun 2022

sebesar 95,51 dan realisasi tahun 2023 adalah 92,2. Dengan demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami fluktuasi naik turun dalam beberapa tahun terakhir.

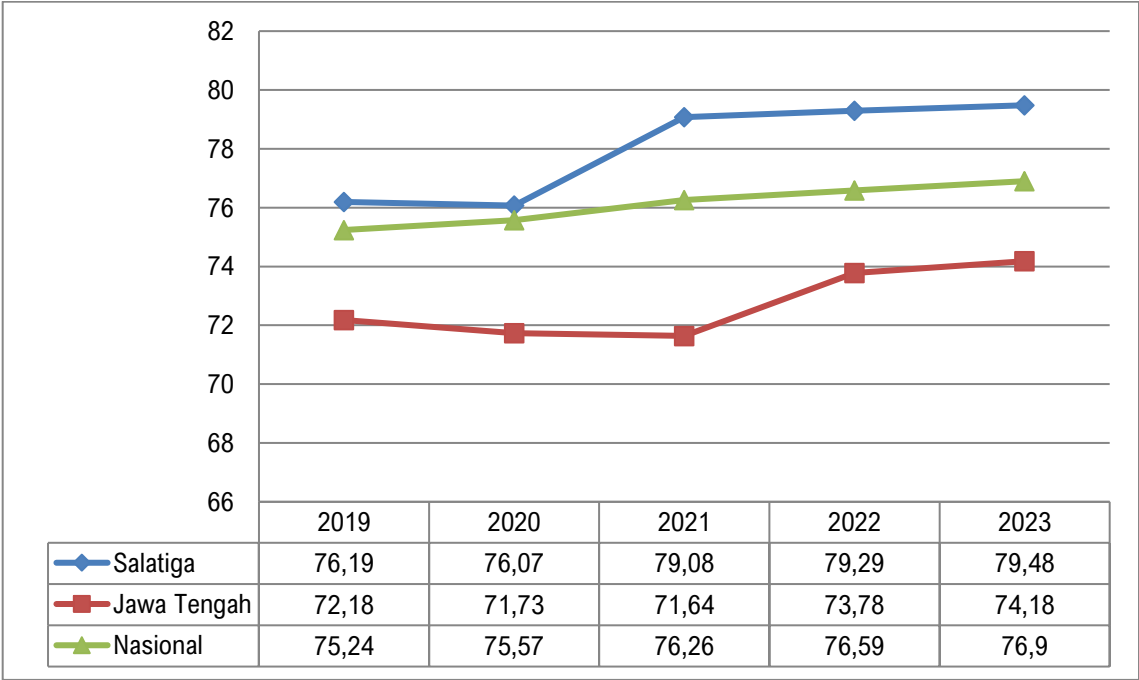
e. Score Capaian Kota Layak Anak

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2023 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan, dengan skor 611 poin tersebut Kota Salatiga mendapatkan Predikat Menuju Kota Layak Anak Kategori Madya.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG Kota Salatiga Tahun 2023 dengan indeks 79.48 mengalami kenaikan 0,19 dari tahun 2022 dengan indeks 79,29. Capaian IDG Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 74,18 dan Nasional dengan indeks 76,90. Perbandingan capaian IDG tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

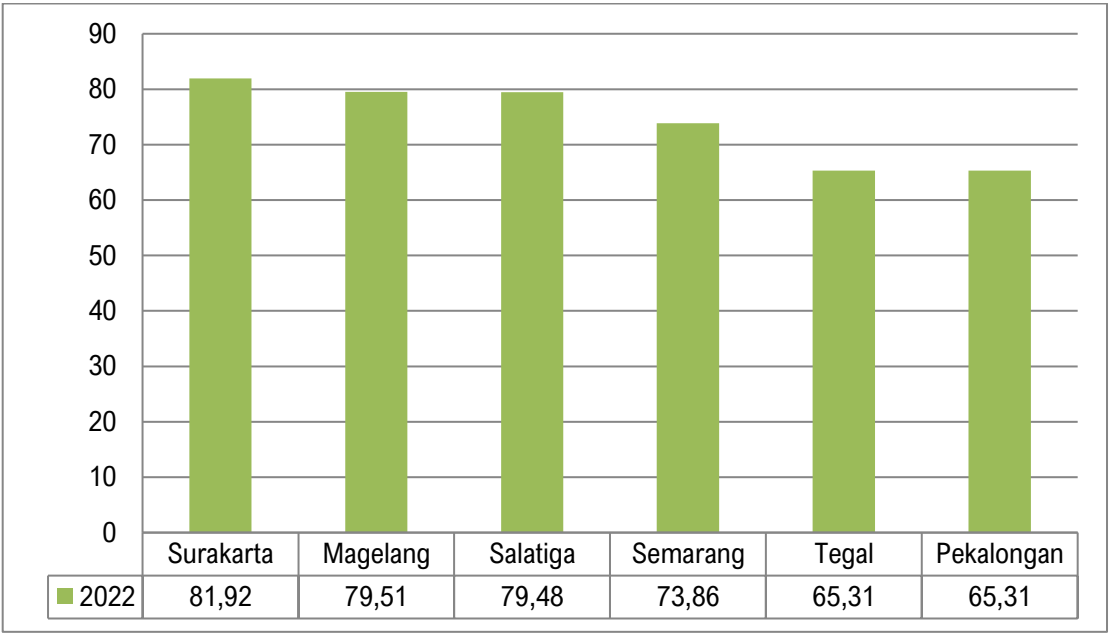
Grafik 2. 19. Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berada pada peringkat ketiga.

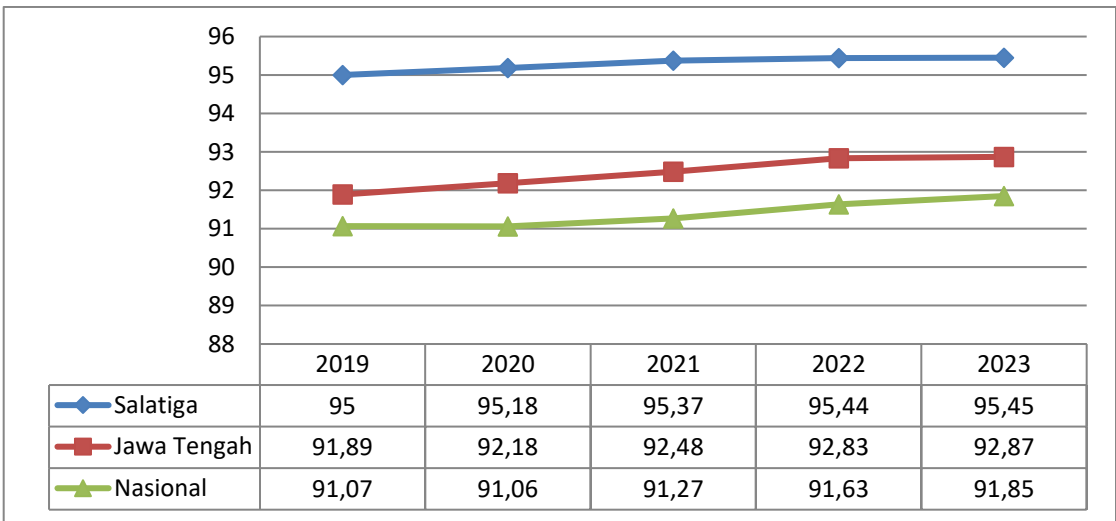
Grafik 2. 20. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



g. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian IPG Kota Salatiga tahun 2023 dengan indeks 95,45 terhitung naik dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan indeks 95,44. Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 92,87 dan Nasional sebesar 91,85 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 21. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



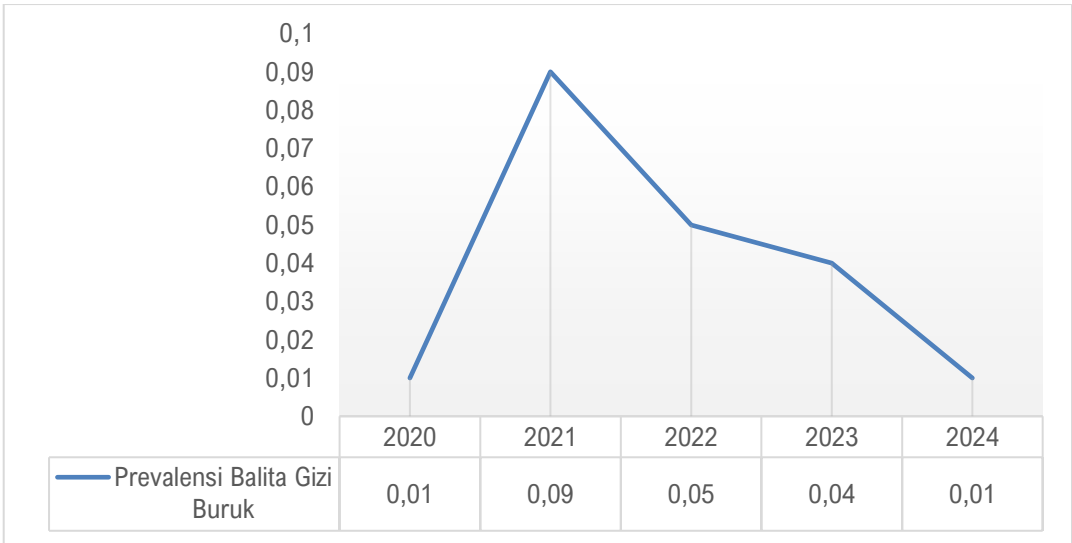
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 5.

h. **Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Pada tahun 2023 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,04%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2019-2023 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun.

Grafik 2. 22. *Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024*



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 5,92 persen atau sebanyak 484 Balita Stunting pada tahun 2023 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 6 *Data Stunting Kota Salatiga 2019-2023*

TAHUN	BADUTA		BALITA	
2019	323/4.614	7,00%	1228/11.374	10,80%
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

2.3 **Aspek Daya Saing Daerah**

2.3.1. **Daya Saing Ekonomi Daerah**

a. **Pertumbuhan PDRB**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2024, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.11.505.05 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.586,32 (dalam miliar) atau 5,37% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.10.918,73 (dalam miliar) .

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.364,87 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,18 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 7 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419,10	430,02	445,45	453,68	477,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,27	2,94	2,99	2,18
C	Industri Pengolahan	2.831,44	2.955,35	3.092,87	3.242,60	3.364,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,96	23,08	24,56	25,26	26,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	7,87	8,15	8,46	8,70
F	Konstruksi	1.288,95	1.299,23	1.312,76	1.377,88	1.475,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310,22	1.380,39	1.436,36	1.500,64	1.574,03
H	Transportasi dan Pergudangan	251,54	259,35	391,62	419,69	447,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	730,71	762,77	872,57	972,29	1.034,99
J	Informasi dan Komunikasi	514,41	546,88	558,13	594,27	648,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	333,74	337,29	339,17	346,27	353,48
L	Real Estate	508,42	519,27	544,72	579,00	600,50
M, N	Jasa Perusahaan	115,67	119,39	126,15	133,41	144,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,89	476,44	487,32	499,82	535,25
P	Jasa Pendidikan	436,68	436,81	443,50	468,26	498,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,98	162,41	167,56	176,63	188,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	99,88	100,49	111,47	117,54	124,20

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.503,71	9.822,00	10.365,44	10.918,73	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 8 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024(dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	602,19	631,75	683,29	727,26	791,94
B	Pertambangan dan Penggalian	5,44	5,34	4,95	5,16	3,82
C	Industri Pengolahan	4.272,67	4.586,93	5.042,85	5.551,83	5.992,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,71	25,76	27,66	28,74	30,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	90,60	9,31	9,85	10,32	11,15
F	Konstruksi	1.850,35	1.929,82	2.086,17	2.282,64	2.456,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.704,86	1.823,95	1.973,25	2.136,25	2.285,99
H	Transportasi dan Pergudangan	304,90	324,56	517,84	600,04	649,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944,91	1.002,97	1.196,13	1.317,09	1.431,13
J	Informasi dan Komunikasi	510,45	542,72	555,04	593,00	649,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,77	498,68	543,54	567,51	693,65
L	Real Estate	612,78	631,73	675,21	725,01	755,84
M,N	Jasa Perusahaan	167,00	174,33	192,12	210,37	232,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	690,22	705,65	741,13	806,63	853,08
P	Jasa Pendidikan	733,79	741,66	757,28	806,63	871,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,51	242,33	252,67	272,01	295,90
R, S, T, U	Jasa lainnya	127,24	129,09	148,68	161,50	174,86
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09	19.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 9 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.539,32	8.824,97	9.692,95	10.533,34	11.412,78
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,71	143,12	161,69	180,22	202,48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.251,53	1.307,85	1.321,27	1.391,99	1.484,97
Pembentukan Modal tetap Bruto	6.284,91	6.384,00	6.761,85	7.143,45	7.672,15
Perubahan Inventori	126,24	111,89	146,33	168,40	125,97
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(3.066,87)	(2.762,91)	(2.676,44)	(2.647,15)	-2.819,08
Produk Domestik Regional Bruto	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,34	18.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 11,505,05 milyar rupiah.

Tabel 2. 10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.040,15	6.152,12	6.493,80	6.814,96	7.188,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	85,89	87,15	91,43	98,08	108,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	776,65	795,55	796,20	812,57	838,42
Pembentukan Modal tetap Bruto	4.150,35	4.182,73	4.263,74	4.408,81	4.610,58
Perubahan Inventori	122,13	90,51	118,27	124,83	88,49
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.671,46)	(1.486,07)	(1.398,12)	(1.340,56)	(1.328,77)
Produk Domestik Regional Bruto	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah

Tangga dengan angka 10,37%. Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer).

LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan
- Organisasi sosial
- Organisasi profesi dan serikat buruh
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi
- Partai Politik
- Lembaga keagamaan

Tabel 2. 11 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	(1,14)	1,85	5,55	4,95	5,48
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	(1,99)	1,47	4,90	7,28	10,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1,54)	2,43	0,08	2,11	3,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,92)	0,74	1,94	3,35	4,61
Perubahan Inventori	86,97	(25,89)			
Net Ekspor Barang dan Jasa	9,36	11,09		0	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	(1,68)	3,33	5,53	5,34	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dan terjadi pertumbuhan positif dengan nilai 5.37%. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 12 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar RP)					
-ADHB	13.310,96	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09
-ADHK 2010	9.666,45	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
PDRB perkapita (Juta Rp)					
-ADHB	68,88	69,14	72,39	78,26	76,51
-ADHK 2010	50,02	49,51	50,75	53,14	54,89
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	4,99	(1,03)	2,71	4,70	3,29
Jumlah Penduduk (Orang)	193.231	191.950	193.525	196,54	201,37
Pertumbuhan (%)	0,87	(0,66)	0,83	0,80	1,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

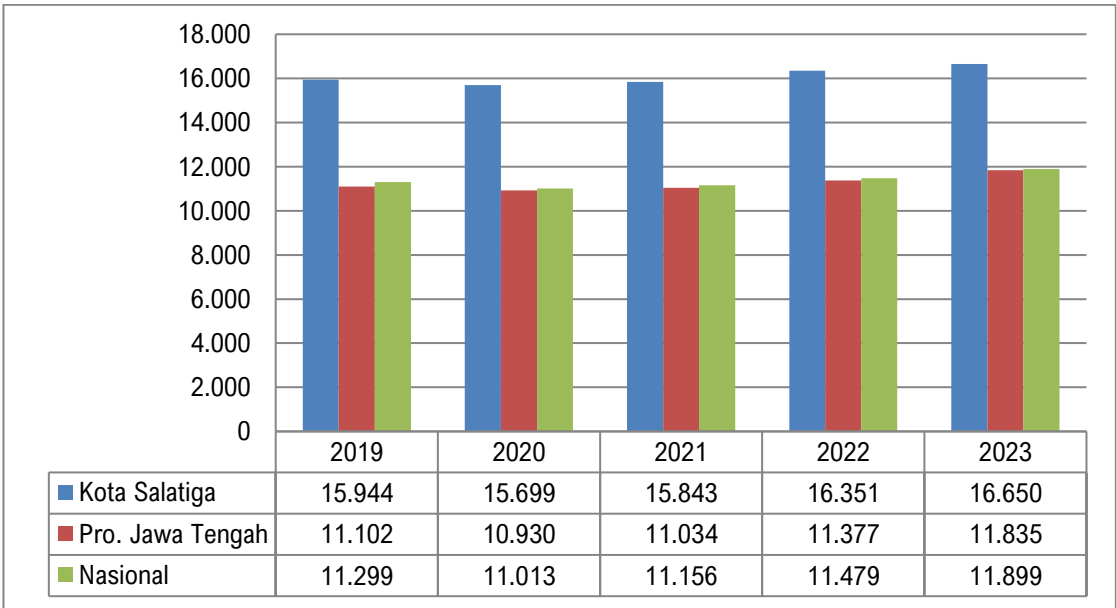
b. Pengeluaran Riil Per Kapita

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar Rp.16.650.000,- sama dengan tahun 2023 ,-

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2023 berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.835.000,-dan Nasional sebesar Rp.11.899.000,-, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

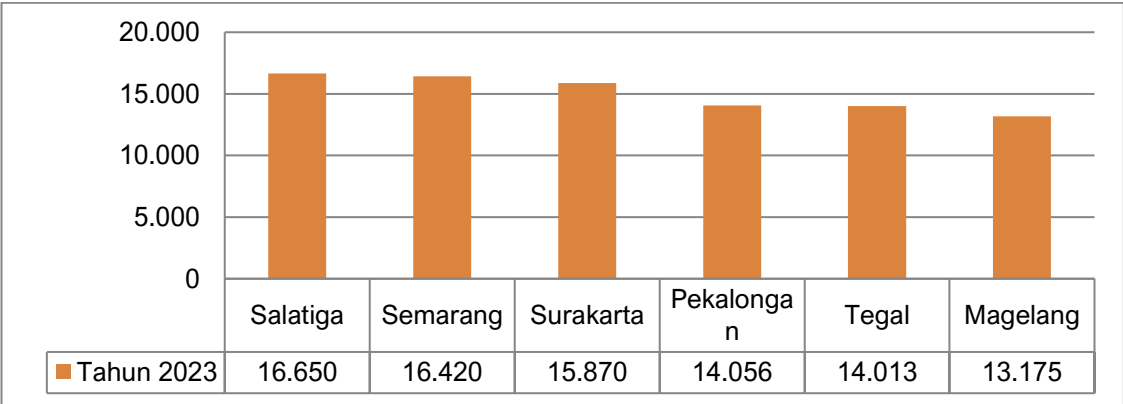
Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama.

Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

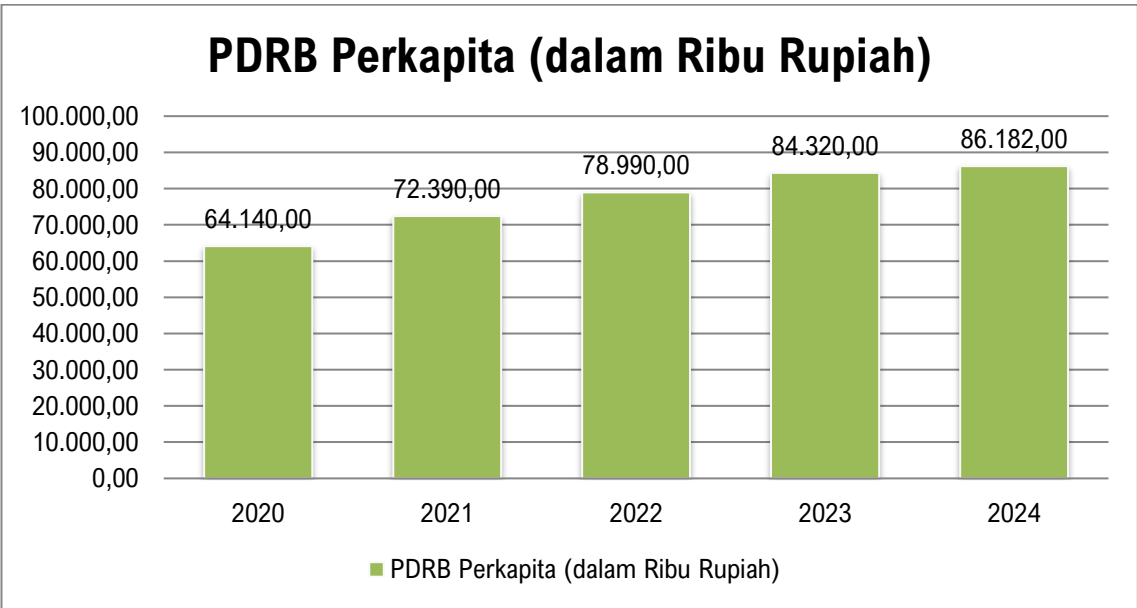


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

c. Pendapatan Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2020 di angka Rp. 64.140.000,00 dan pada 2023 sebesar Rp. 84.320.000,00. Selanjutnya pada tahun 2024 di angka 86.182.000,00 Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 25. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.3.2. Daya Saing SDM

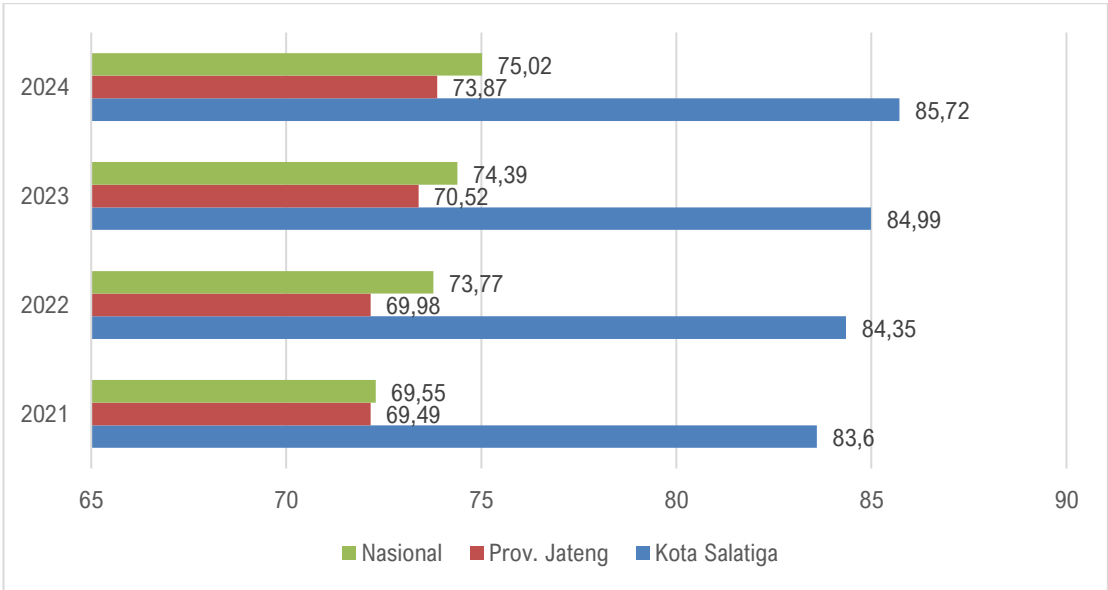
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (msayarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2024. IPM Kota Salatiga Tahun 2024 mengalami peningkatan 0,73 poin di bandingkan capaian tahun 2023 menjadi 85,72. Peningkatan IPM Kota Salatiga tahun 2024 didukung oleh peningkatan di semua komponen baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 26. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Capaian komponen IPM selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel berikut ini

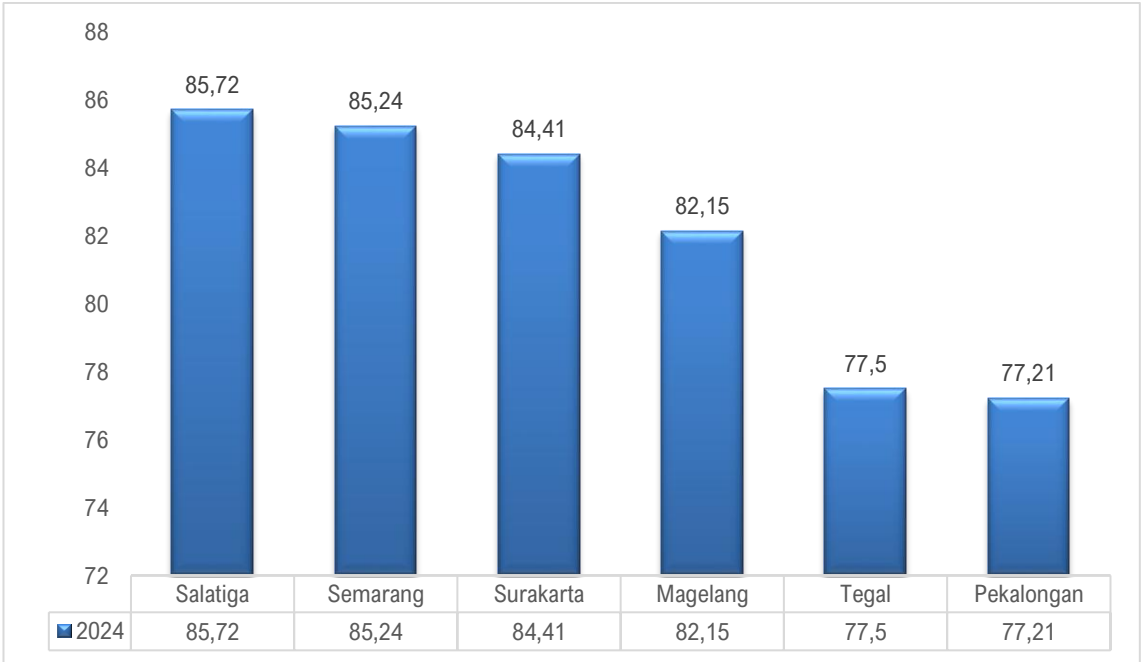
Tabel 2. 12. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2023

No.	Komponen	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	77,55	77,72	77,93	78,27
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,42	15,43	15,44	15,46
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,66	10,95	11,24	11,48
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.843	16.351	16.650	17.096
IPM Kota Salatiga		83,60	84,35	84,99	85,72
Jawa Tengah		69,49	69,98	70,52	73,87
Nasional		69,55	73,77	74,39	75,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Pada tahun 2024 tidak terjadi perubahan peringkat di antara 6 (enam) kota dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Salatiga masih menempati peringkat pertama, diikuti Kota Semarang di peringkat kedua, Kota Surakarta di peringkat ketiga. Kecepatan pertumbuhan IPM dari keenam kota juga hampir sama berkisaran 0,57 persen. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 27. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

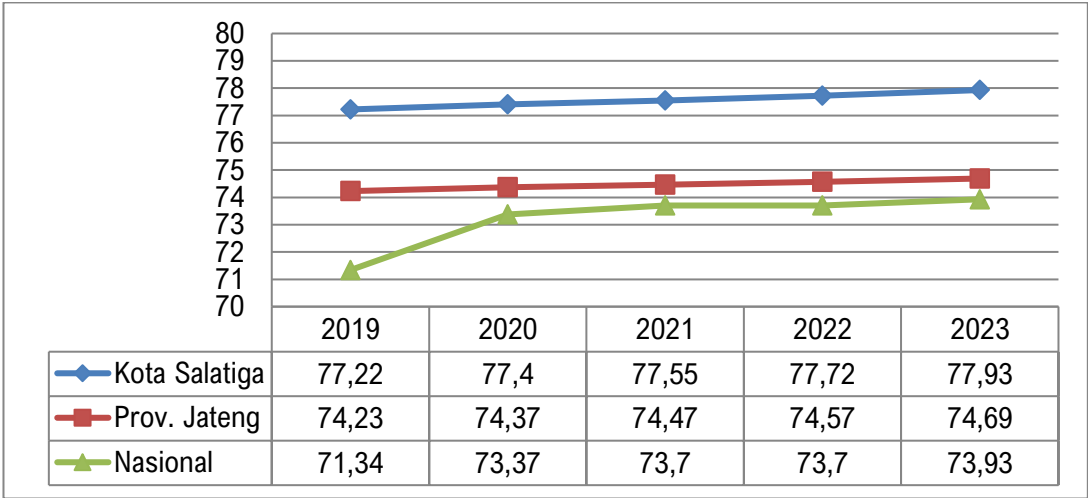


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

1) **Usia Harapan Hidup saat Lahir**

Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Usia harapan hidup saat lahir tahun 2023 Kota Salatiga sebesar 77,93 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dan capaian Nasional sebesar 73,93. Hal ini berarti dari tahun 2019 sampai tahun 2023, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 77 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

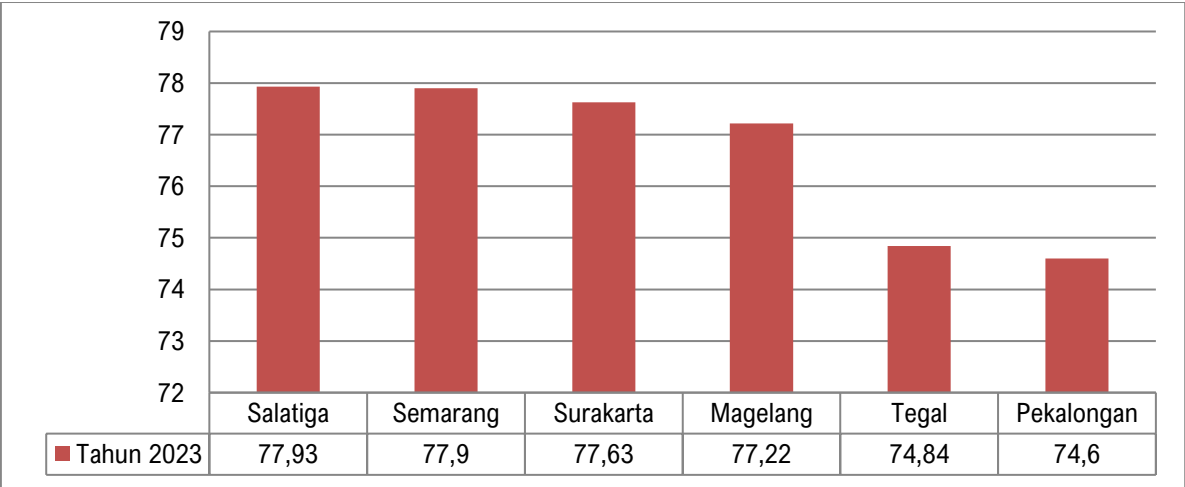
Grafik 2. 28. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di ikuti oleh Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 29. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2023

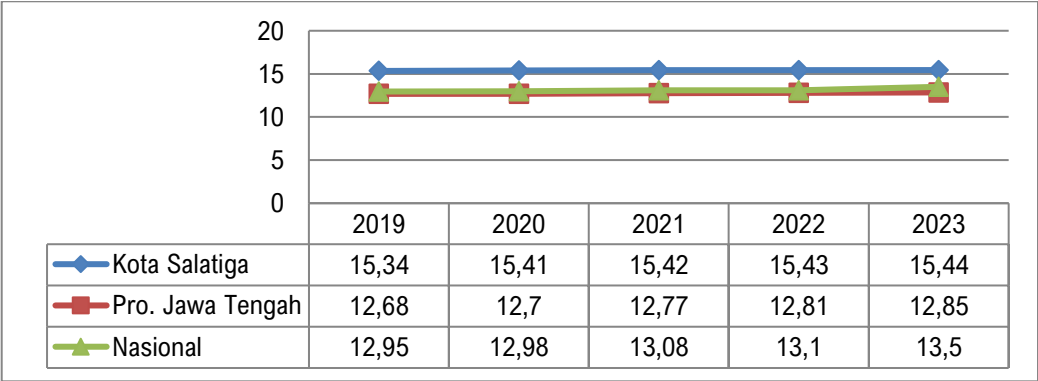


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

2) **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 30. *Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023*

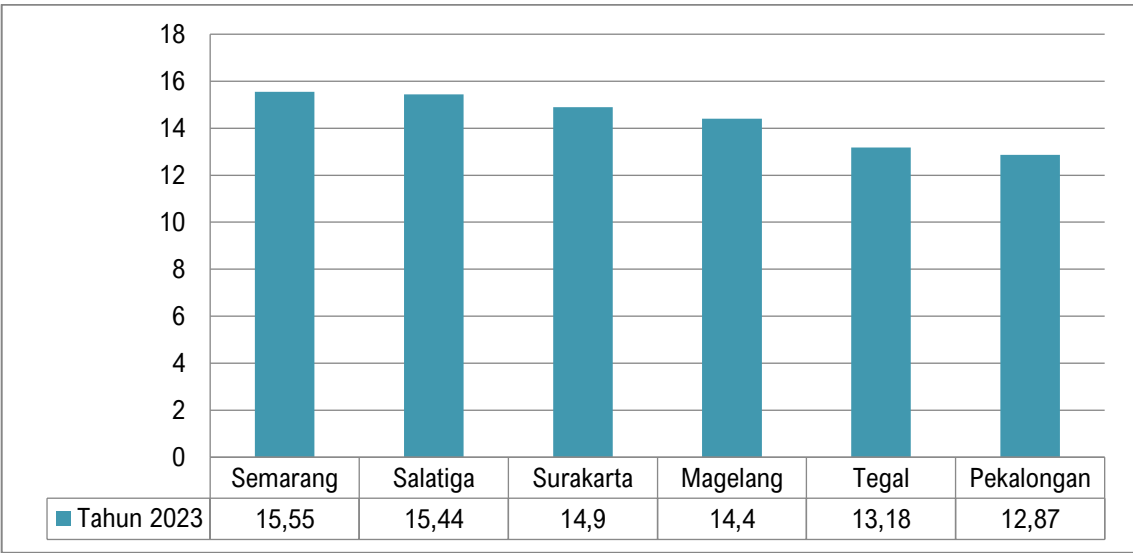


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

HLS Kota Salatiga pada tahun 2023 yaitu 15,44 tahun mengalami kenaikan 0,01 tahun dari tahun 2022 sebesar 15,43 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun dan Nasional sebesar 13,15 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,44 setelah Kota Semarang sebesar 15,55 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 31. *Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*

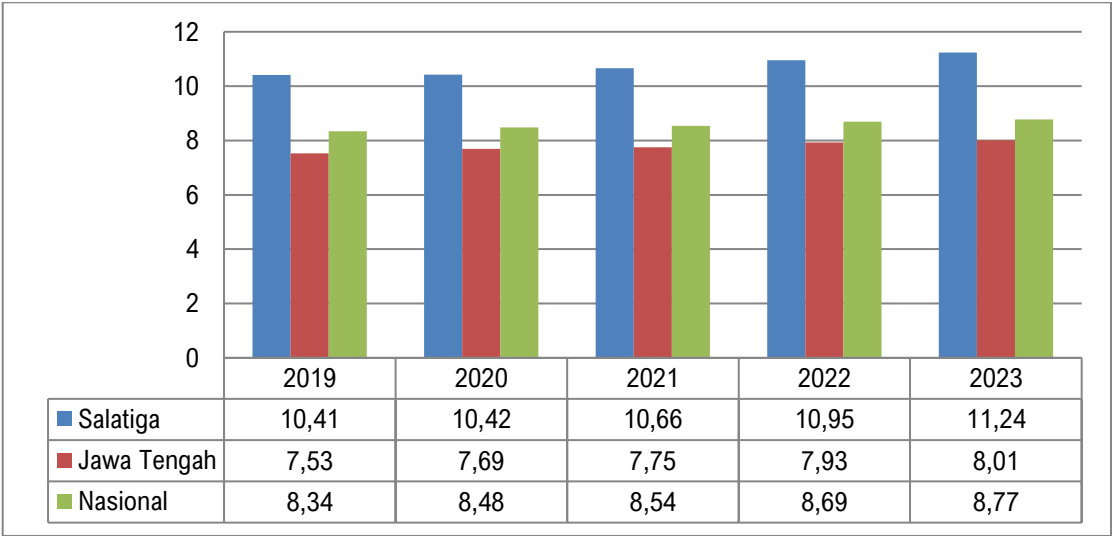


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2023 sebesar 11,24 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 10.95 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan secara Nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 8,01 tahun dan Nasional sebesar 8,77 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

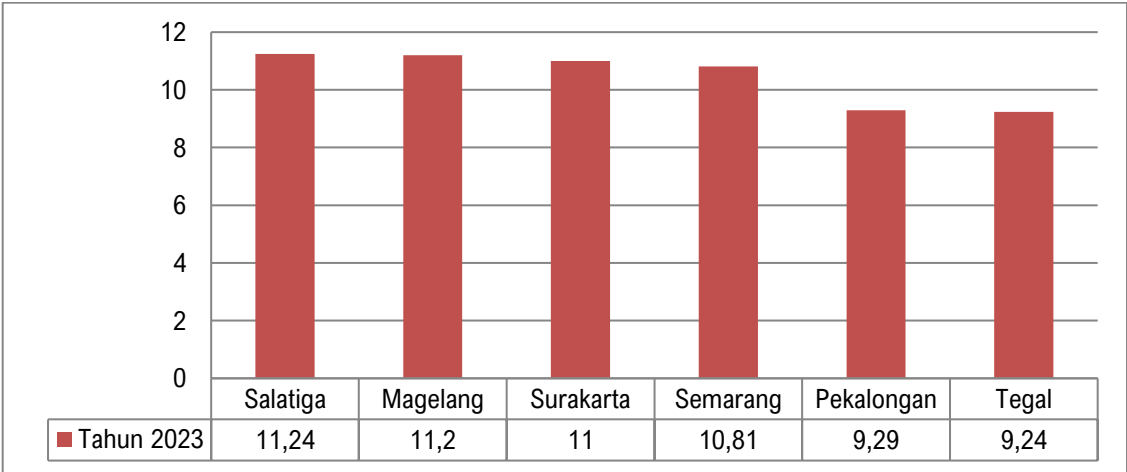
Grafik 2. 32. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2023 masih sama seperti tahun 2022 yaitu berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 33. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

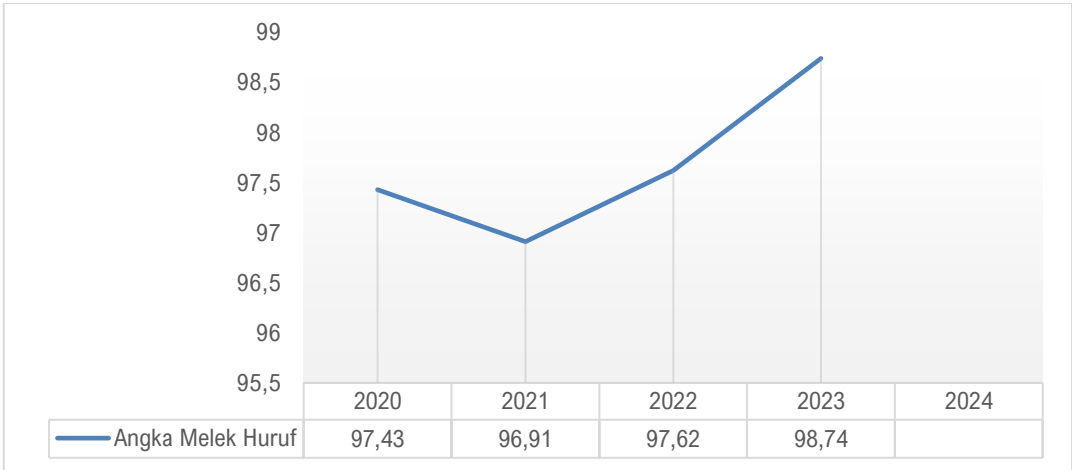
b. Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Masyarakat dapat diukur dari kemampuan antara lain: membaca, menulis, memahami bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan dan transformasi menjadi produk/jasa. Realisasi kinerja ILM pada tahun 2023 adalah 63,14.

c. Angka Melek huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan yang ada efektif.

Grafik 2. 34. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2020-2023



Sumber : BPS, Tahun 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik

Indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain :

- 1) Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
- 2) Jl. Jenderal Sudirman (0%)
- 3) Jl. W. Mongonsidi, (100%)
- 4) Jl. Soekarno Hatta, (100%)
- 5) Penataan Bunderan Tamansari, (0%)
- 6) Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
- 7) Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (50%)
- 8) Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
- 9) Jl. Hasanudin, (100%)
- 10) Jl. A. Yani, (50%)
- 11) Jl. Pattimura, (100%)
- 12) Jl.Tingkir – Barukan, (0%)
- 13) Jl. Kartini, (100%)

- 14) Jl. Osamaliki, (100%)
- 15) Jl. Veteran, (0%)
- 16) Jl. Pemuda, (0%)
- 17) Jl. Muh Yamin, (0%)

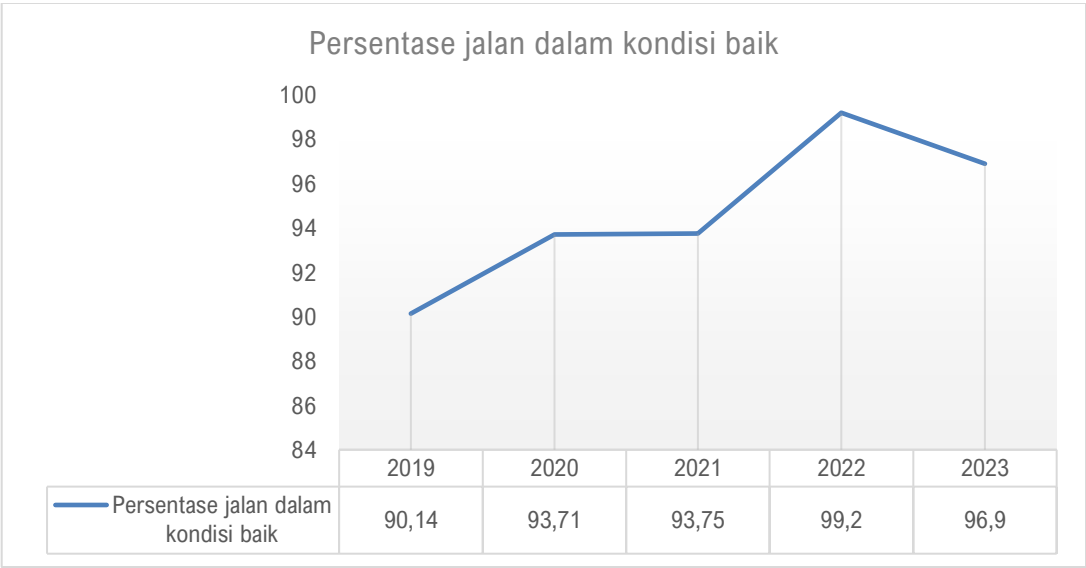
Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 11 ruas jalan yang telah di kerjakan walaupun pada Jl. Sukowati – Jl. Tentara Pelajar dan Jl. A. Yani belum selesai 100%, sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2023 adalah 58,82%.

b. Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik

Indikator kinerja Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik dapat di hitung dengan rata rata dari (jalan, drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi) secara lebih detail akan di bahas di bawah ini.

Tahun 2023 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 96,9% dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471km yang berada dalam kondisi baik/mantap sepanjang 327,038km, yang terdiri 240,4km dalam kondisi baik dan 86,6Km dengan kondisi sedang.

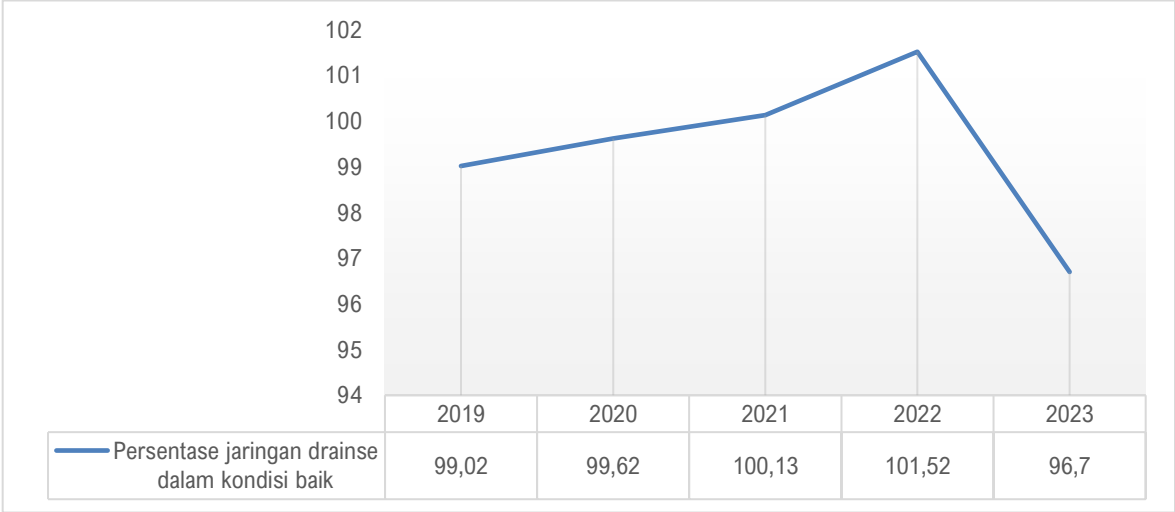
Grafik 2. 35. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2019-2023, walaupun pada tahun 2023 jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Sampai dengan tahun 2023 panjang saluran drainase terbangun adalah 368,4m. Pada tahun 2023 ini Panjang drainase kondisi baik adalah 96.7% atau sepanjang 356,3KM. Kondisi lainnya adalah 8KM kondisi rusak ringan, 4,1KM kondisi rusak berat.

Grafik 2. 36. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



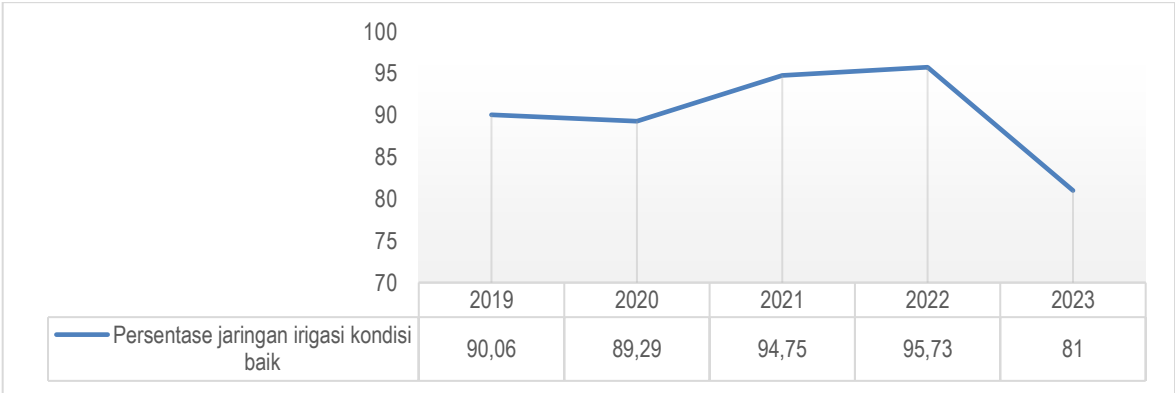
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 18.586m dan kondisi sedang adalah 4.467m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.053m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 adalah 81%. Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 95,73%, capaian tahun 2023 adalah mengalami penurunan sebesar 14,73%.

Untuk mengukur kinerja sistem irigasi secara komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan menggunakan Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah 64,84%. Indeks ini tidak hanya mengukur sarana prasarana fisik jaringan, tetapi juga termasuk produktivitas tanam, sarana penunjang jaringan utama dan kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi di Kota Salatiga sebesar 12 DI.

Dari 12 daerah irigasi di Kota Salatiga yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

Grafik 2. 37. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 terjadi konversi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 58,37 menjadi 69,59. Perubahan tersebut disebabkan oleh penyesuaian metode penghitungan baru komponen IKLH yaitu :

- 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) menambahkan parameter PM 2,5 sehingga nilai IKU mengalami kecenderungan menurun. Dengan perubahan tersebut nilai IKU berubah dari 84,84 menjadi 84,36;
- 2) Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami perubahan metode perhitungan menjadi perhitungan IKA-INA (Skala maksimal 100 bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai). Dengan menggunakan metode perhitungan baru, nilai IKA berubah dari 44,29 menjadi 70,63;
- 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada penghitungan IKL sebanyak 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kab/kota dengan ekosistem gambut.
- 4) Berdasarkan perubahan penghitungan tersebut nilai IKL Kota Salatiga dari 33,62 menjadi 40,49

d. Rasio Konektivitas Kota

Indikator Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Rasio Konektivitas Kota Tahun 2023 sebesar 0,71 dan terealisasi sebesar 0,81 sehingga capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Kota adalah 103,86% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan di dapatkan dari 26 jumlah trayek di bagi dengan 32 kebutuhan trayek di Kota Salatiga. Realisasi kinerja Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional adalah 0,76 jadi Rasio Konektivitas Kota Salatiga lebih baik daripada Nasional.

e. Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Kinerja Lalu Lintas Kota Tahun 2023 sebesar 0,35% dan terealisasi sebesar 0,39% sehingga capaian kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kota adalah 88,57% dengan kategori tinggi. Perhitungan indikator diperoleh dari rata rata VCR (Volume, Capacity, Ratio) 21 jalan yang telah disurvey di Kota Salatiga.

f. Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU

Indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung

oleh PSU 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut
dihitung dengan rumus:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{\text{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah di Kota Salatiga}}$	X 100%
--	---	--	--------

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2023 sebagai berikut:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{5.230}{41.946}$	X 100%	= 12,47%
--	---	------------------------	--------	----------

g. Pemukiman yang Tertata

Indikator Kinerja Permukiman yang Tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Permukiman yang Tertata Tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

Permukiman yang Tertata	=	$\frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}}$	X 100%
-------------------------	---	---	--------

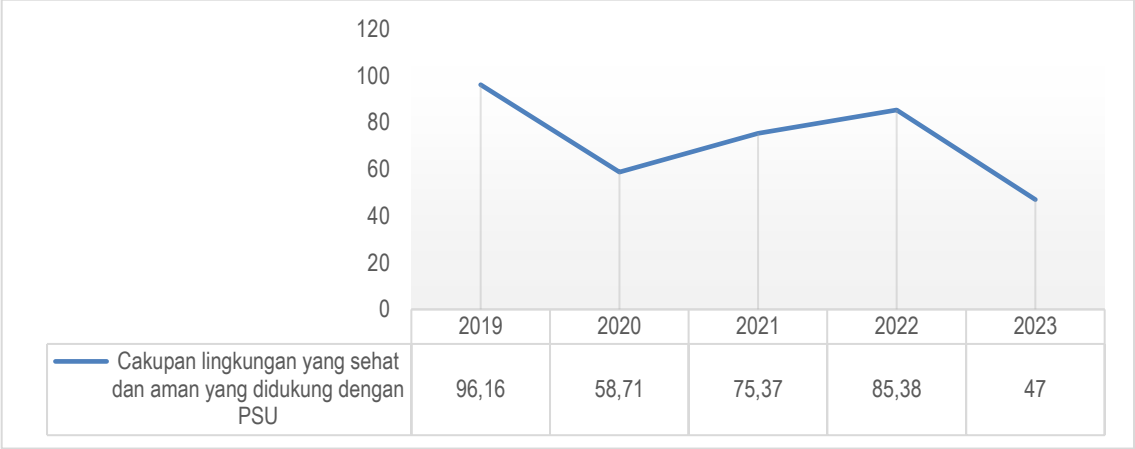
Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2023 sebagai berikut:

Permukiman yang Tertata	=	$\frac{167,05}{2.636,45}$	X 100%	= 6,34%
-------------------------	---	---------------------------	--------	---------

h. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2023 ditargetkan 37% mencapai realisasi 47%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 31 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 65 perumahan dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 85,38%, realisasi kinerja cenderung mengalami penurunan karena penetapan target di tahun 2023 didasarkan pada dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026. Sedangkan, penetapan target tahun 2022 didasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022, dimana tahun 2022 merupakan tahun kondisi akhir RPJMD.

Grafik 2. 38. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan
Nilai Investasi

=

Realisasi investasi tahun n – Realisasi investasi tahun (n-1)

Realisasi Investasi tahun (n-1)

X 100%

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2023 sebagai berikut:

52,17

=

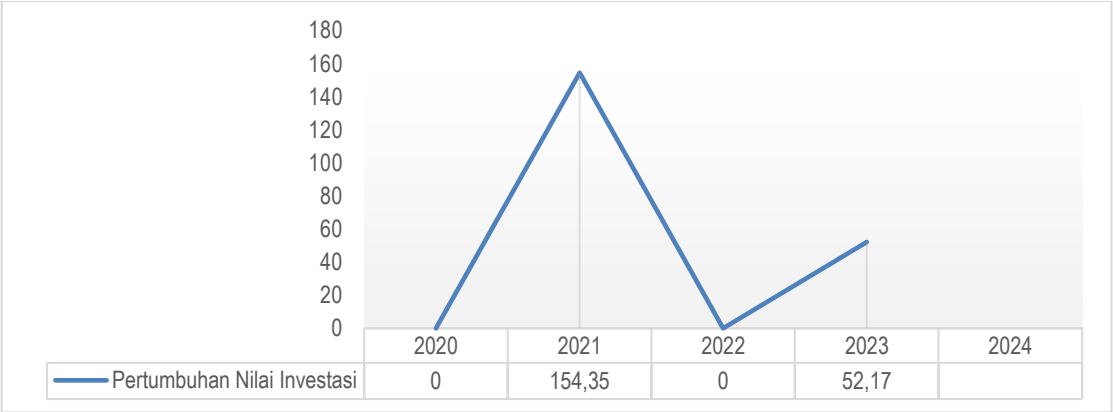
593.922.654.515 - 390.305.976.220

390.305.976.220

X 100%

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 39. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus fluktuasi naik turun realisasinya dalam beberapa tahun terakhir.

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Tahun 2023 sebesar 3,84 dan terealisasi sebesar 5,6 sehingga capaian kinerja indikator Penanggulangan Potensi Konflik adalah 145,83% dengan kategori sangat tinggi.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75% dan realisasi 85.55% dan realisasi target sebesar 100.94% dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00% maka status tercapai.

b. Indeks SPBE

Pada Tahun 2023 target Indeks SPBE sebesar 2,40% terealisasi 3,26% dan capaian kinerjanya sebesar 118,33% dengan target RPD sebesar 2.7% serta status tercapai.

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Kementerian PAN dan RB tahun 2023 dengan nilai 64,93 kategori Baik (B) dengan rincian sebagai berikut :

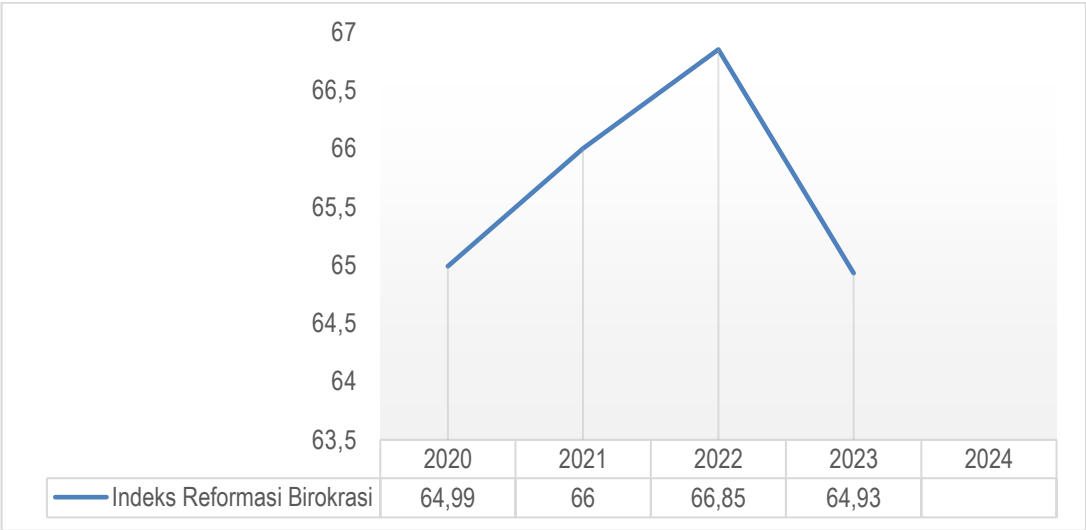
Tabel 2. 13. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	62,02
B	RB Tematik	20	2,91
C	Indeks RB	120	64,93

Sumber Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, LHE RB 2023

Di bawah ini merupakan realisasi kinerja nilai indeks reformasi birokrasi yang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan capaian tertinggi ada pada tahun 2022.

Grafik 2. 27. Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

2.6 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan tahun 2024 yang menjadi dasar penentuan isu strategis berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal
- 2. Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga
- 3. Indeks Literasi Masyarakat belum optimal
- 4. Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal
- 5. Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
- 6. Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 7. Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan
- 8. Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal
- 9. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata

Isu Strategis

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat menuju terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk
3. Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi local
4. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang dan pengelolaan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinanPeningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

PROYEKSI BELANJA & PENDAPATAN TAHUN 2026

PENDAPATAN

Rp. 865.462.393.600

BELANJA

Rp. 950.536.220.000

Pada tahap RKPD belum memasukkan proyeksi pendapatan DAK dan Bankeu serta belanja usulan Musrenbang, Pokir, hibah dan kebutuhan pembiayaan tambahan Perangkat daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,03% melambat dibanding capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Capaian ini didorong oleh

peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih.

Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB. Hal ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya, Transportasi & Pergudangan, serta Akomodasi & Makan Minum. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi. Sepanjang tahun 2024, wilayah Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku & Papua tumbuh di atas ekonomi nasional.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% pada kuartal IV 2024, secara keseluruhan mencapai 4,94% sepanjang tahun. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. APBN menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga. Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 turut mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada kuartal IV 2024 tumbuh 6,06% dan 12,48% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.

Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 6,61% dengan pertumbuhan 4,17% pada triwulan IV. Kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja negara tersebut memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlintas. Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 5,03% pada triwulan IV dan 4,61% sepanjang tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ini melanjutkan tren penguatan yang konsisten dalam kurun empat tahun terakhir. Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82% dengan total nilai Rp1.714 T, lebih dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku juga memberi indikasi kinerja manufaktur yang terjaga. Melalui APBN, Pemerintah turut mendorong investasi dengan meningkatkan belanja modal untuk konstruksi serta pembangunan infrastruktur konektivitas, bendungan, kawasan industri dan pariwisata.

Kinerja Ekspor pada kuartal IV tumbuh 7,63% dan secara tahunan tumbuh 6,51%. Pertumbuhan positif ekspor tahun 2024 ditopang oleh meningkatnya ekspor barang dan ekspor jasa. Peningkatan ekspor barang terutama didorong oleh peningkatan ekspor komoditas besi baja dan bahan bakar mineral yang secara volume tumbuh masing-masing 17,8% dan 7,8%. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor jasa ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh 19,05%. Di sisi lain, impor barang masih berkontraksi sebesar 10,36 % pada kuartal IV dan sebesar 7,95 % secara tahunan.

Sektor Manufaktur pada kuartal IV 2024 tumbuh 4,89% dan 4,43% sepanjang tahun 2024. Permintaan domestik maupun global yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan, terutama pada subsektor industri logam dasar, elektronik, dan makan minum. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan tumbuh 5,19% pada kuartal IV atau tumbuh 4,86% sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas produksi.

Sektor-sektor terkait mobilitas masyarakat mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2024. Sektor transportasi tumbuh 7,92% pada kuartal IV dan mencapai 8,69% sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan itu, sektor Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh tinggi, sebesar 6,61% pada kuartal IV dan 8,56% di sepanjang tahun 2024. Momentum ini didorong oleh penyelenggaraan event nasional dan internasional serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata yang meningkatkan arus wisatawan baik dari domestik dan mancanegara.

Sektor primer mengalami moderasi, baik dari sektor pertanian maupun sektor pertambangan. Sektor pertanian tumbuh 0,71% pada kuartal IV atau 0,67% untuk keseluruhan tahun 2024. Pelemahan kinerja sektor pertanian ini disebabkan penurunan produksi padi dan kelapa sawit. Namun demikian, kinerja sektor pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor pertambangan juga tumbuh moderat sebesar 3,95% pada kuartal IV atau 4,90% untuk tahun 2024. Moderasi harga komoditas menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan sektor pertambangan.

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%. Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, aktivitas hilirisasi menopang pertumbuhan tinggi di wilayah Timur Indonesia. Wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,81% dan 6,18%. Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi pendorong aktivitas konstruksi di Kalimantan sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,52%. Aktivitas pariwisata tumbuh kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,04%.

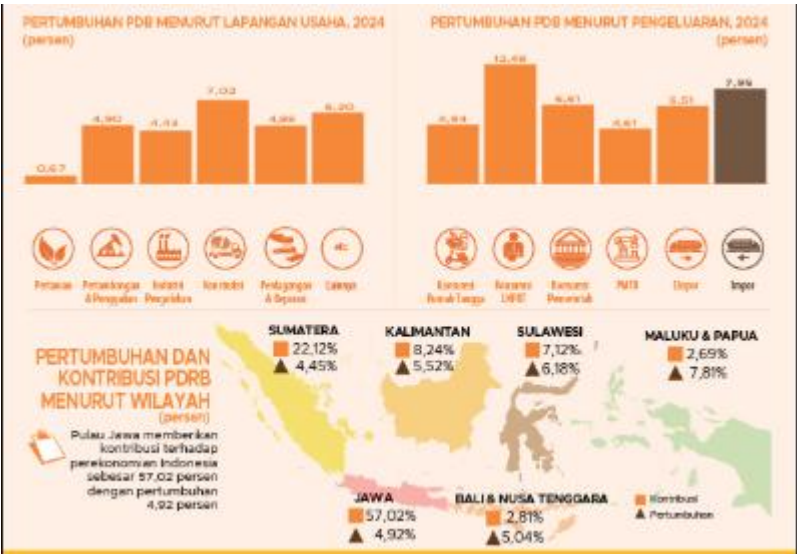
Kinerja perekonomian nasional yang resilien tidak terlepas dari kerja keras APBN. APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial (Perlinsos), mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah akan terus memperkuat program Perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako, serta Subsidi dan Kompensasi. Peningkatan kapasitas UMKM akan dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan. Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan (SPHP).

Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 sebesar 4,95% (yoy) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 1,84% pada bulan September 2024. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Tiongkok (4,6%), Singapura (4,1%), Korea Selatan (1,5%), dan Amerika Serikat (2,7%).

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024





Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%, (yoy)	5,5 – 6,0
2.	Inflasi	%, (yoy)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14.900 – 15.400
4.	Yield SBN 10 Tahun	%	6,3 – 7 3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	USD/barel	70 – 90
6.	Lifting Minyak	rbph	593 – 621
7.	Lifting Gas	rbsmph	1.087 – 1.151

Sumber : Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Tabel 3. 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy): Akhir Periode	%	1,5–3,5 a)
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000–15.400 b)
3.	Cadangan Devisa	US\$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1 c)
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2) d)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9–20,0
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,60
8.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar US\$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	10,70–11,20
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00 c)
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80) d)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	39,78–39,98
.			
13.	Pertumbuhan Investasi	%	6,5–7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2026-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 tumbuh 4,95 % (c to c), tumbuh 4,96% (y to y) dan tumbuh 0,48% (q to q). Perekonomian pada 2024 mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,97 persen.

Gambar 3. 2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 12/02/33/Th.XIX, BPS

Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Jateng, yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi menunjukkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Infokom, dan Jasa Perusahaan.

Lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada 2024 dengan kontribusi sebesar 33,84 persen. Dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dengan angka 16,38 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jateng pada periode tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 5,03 persen. Namun, Jateng masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah lain di Pulau Jawa yang tercatat 4,92 persen

Gambar 3. 3. Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2024





Sumber : Berita Resmi Statistik No. 12/02/33/Th.XIX, BPS

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp. 45,17 juta Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 47,97 juta Tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78% pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 9,58% pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024)

Sampai bulan Maret 2024 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah cukup baik dengan tingkat inflasi yang terjaga, namun Pemerintah harus tetap waspada. Industri Pengolahan yang kuat dan dukungan UMKM yang terus tumbuh menjadi penopang perekonomian Jawa Tengah. Proyeksi Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;

- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11%, sedangkan kontraksi tertinggi pada sektor Pertambangan dan Penggalan yaitu sebesar -27,16%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2024, yaitu sebesar 33,14% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,77%. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,59 persen dan 12,64 dengan pertumbuhan sebesar 7,07% dan 4,89 %.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2026 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi lokal - kerakyatan serta investasi serta pengembangan infratraktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga nmenjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi local-kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2024, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi :

- 1) Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga yang relatif masih tinggi;
- 2) Jumlah stunting di Kota Salatiga yang masih relatif tinggi;
- 3) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
- 5) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
- 6) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target 2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3. 3. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 , 2024 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026

No	Indikator	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	5,53	5,34	5,37	5,56 - 6,20
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14%	4,73	4,66	4,57	4,49 - 4,24
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,26%	5,58	4,57	3,86	3,80 – 3,65
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,60	84,35	84,99	85,72	86,19

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (money follow program), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah serta mendukung pencapaian target RPD Tahun 2023-2026 dan RPJPD Tahun 2025-2045. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

Adapun proyeksi pemenuhan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan pada RKPD tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 4. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026

No	Unsur Mandatory	Minimal	Pagu 2026	Keterangan
1	PENDIDIKAN	20 %	23,35 %	
2	KESEHATAN	10 %	30,16 %	
3	INFRASTRUKTUR	40 %	33,69 %	
4	PENGAWASAN	1 %	1,07 %	

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum

pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
- c) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Salatiga, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
- 2) Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 7) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2023 (audited) sebesar Rp987.276.298.498,00; realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.038.143.487.948,00; proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1.011.082.764.640,00 serta proyeksi pendapatan tahun 2026 adalah sebesar Rp865.462.393.600,00.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketentuan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen dana alokasi khusus, DBHCHT dan dana insentif fiskal akan menyesuaikan dengan ketentuan alokasinya.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3. 5. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2022 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2024

Uraian	2022			2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
PENDAPATAN	903.370.549.855	886.352.219.264	98,12%	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	216.446.575.855	240.798.164.141	111,25%	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%	290.801.610.561	313.963.680.987	107,96%
PENDAPATAN TRANSFER	686.923.974.000	645.554.055.123	93,98%	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%	731.103.463.000	724.166.549.022	99,05%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-		-	260.085.697		-	13.257.939	

Tabel 3. 6. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2025, Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Proyeksi		Selisih Anggaran Tahun 2026 dan 2025	
			2026	Perkiraan Maju 2027	Nominal	%
4	PENDAPATAN	1.011.082.764.640	865.462.393.600	897.973.000.000	(145.620.371.040)	-15,82%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321.906.883.640	298.499.841.600	327.440.000.000	1.341.088.071	0,52%
4.1.01	Pajak Daerah	109.263.327.376	87.000.000.000	97.440.000.000	(2.709.500.000)	-3,61%
4.1.02	Retribusi Daerah	176.728.889.664	182.862.753.900	192.000.000.000	1.088.382.571	7,22%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.744.935.000	21.350.000.000	23.000.000.000	(1.084.423.000)	-4,83%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.169.731.600	7.287.087.700	15.000.000.000	4.046.628.500	2,81%
4.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	704.145.435.000	550.837.339.000	538.162.012.000	(153.308.096.000)	-21,77%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.555.616.000	521.342.287.000	524.912.735.000	(151.495.766.000)	-24,07%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.620.265.000	45.620.265.000	45.620.265.000	(1.812.330.000)	-2,42%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- 1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2026, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- 3) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
- 4) Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Elektronifikasi Pendapatan dan BMD;
- 5) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah; Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
- 6) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil;
- 7) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah;
- 8) Menegakkan peraturan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);
- 2) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pemenuhan program prioritas Wali kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
- 4) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
- 5) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing. Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target RPD dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2023 dan tahun 2024, target belanja daerah tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024, anggaran 2025 dan Proyeksi tahun 2026

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
1	PENDAPATAN	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%	1.001.082.764.640	865.462.293.600
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-	-		-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	74.873.052.000	82.607.886.150	110,33%	88.044.163.163	96.219.165.860	109,29%	109.263.327.376	87.000.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	14.641.869.000	16.855.722.636	115,12%	164.333.407.363	181.487.098.335	110,44%	176.728.889.664	182.862.753.900
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.280.674.000	21.280.725.694	100,00%	23.792.126.002	23.424.606.758	98,46%	22.744.935.000	21.350.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	140.057.024.000	163.791.965.078	116,95%	14.631.913.033	12.832.810.034	87,70%	13.169.731.600	7.287.087.700
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%	290.801.610.561	313.963.680.987	107,96%	321.906.883.640	298.499.841.600
8	PENDAPATAN TRANSFER								
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%	634.566.210.000	512.352.881.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	27.313.216.000	29.967.992.050	109,72%	23.904.097.000	27.806.723.000	116,33%	957.787.000	28.795.997.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.644.094.000	1.865.352.243	113,46%	1.309.048.000	1.353.371.000	103,39%	1.309.048.000	957.787.000
12	Dana Alokasi Umum	439.194.634.000	440.735.874.040	100,35%	463.312.491.000	463.728.380.299	100,09%	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	109.711.064.000	104.675.010.769	95,41%	125.127.299.000	119.308.170.745	95,35%	116.877.956.000	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%	634.556.210.000	512.352.881.000

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA								
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
17	Dana Penyesuaian	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI								
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.000.216.000	69.602.560.141	95,35%	74.002.957.000	68.809.586.628	92,98%	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.185.000.000	6.494.279.000	90,39%	9 946 770 000	9.659.516.350	97,11%	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	80.185.216.000	76.096.839.141	94,90%	83.949.727.000	78.469.102.978	93,47%	45.620.265.000	45.620.265.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%	731.103.463.000	724.166.549.022	99,05%	689.175.881.000	566.962.552.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
25	Pendapatan Hibah	-	260.000.000	0,00	-	10.000.000	0,00	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	85.697	0,00	-	3.257.939	0,00	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	225.085.697	0,00	-	13.257.939	0,00	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%	1.011.082.764.640	865.462.393.600

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
	(7 + 23 + 28)								
30	BELANJA								
31	BELANJA OPERASI								
32	Belanja Pegawai	424.730.532.544	400.688.586.142	94,34%	455.186.056.380	426.945.256.800	93,80%	427.366.748.499	409.532.796.625
33	Belanja Barang	523.549.501.841	486.728.958.738	92,97%	514.033.668.415	472.770.420.733	91,97%	477.914.414.746	480.131.240.740
34	Belanja Bunga	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
35	Belanja Subsidi	96.000.000	60.890.000	63,43%	200.000.000	90.070.000	45,04%	150.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	34.036.940.990	33.881.276.232	99,54%	35.682.250.336	35.434.836.887	99,31%	24.656.918.216	185.000.000
37	Belanja Bantuan Sosial	837.800.000	826.800.000	98,69%	637.350.000	636.900.000	99,93%	1.417.850.000	1.022.250.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	983.250.775.375	922.186.511.112	93,79%	1.005.739.325.131	935.877.484.420	93,05%	931.505.931.461	891.071.287.365
39	BELANJA MODAL								
40	Belanja Tanah	1.124.210.200	1.082.183.240	96,26%	2.389.546.200	2.359.523.920	98,74%	1.604.899.115	232.600.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	36.913.346.014	34.307.626.051	92,94%	44.014.818.851	38.714.376.504	87,96%	37.736.888.834	19.263.041.850
42	Belanja Gedung dan Bangunan	19.269.281.333	17.402.770.950	90,31%	29.484.333.960	28.209.975.585	95,68%	33.183.067.192	25.981.647.185
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.795.587.074	36.831.079.856	92,55%	34.790.233.092	34.066.477.100	97,92%	38.029.190.855	11.945.200.000
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.262.027.100	2.196.462.134	97,10%	2.572.249.401	2.034.937.660	79,11%	1.902.373.400	1.542.443.600
45	Belanja Aset Lainnya	137.884.850	132.849.900	96,35%	67.569.400	57.205.200	84,66%	126.770.300	-
46	Jumlah Belanja Modal	99.502.336.571	91.952.972.131	92,41%	113.318.750.904	105.422.495.969	93,05%	112.583.189.696	58.964.932.635

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
	(40 s/d 45)								
47	BELANJA TAK TERDUGA								
48	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	1.000.000.000	430.453.250	43,05%	3.000.000.000	5.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	1.000.000.000	430.453.250	43,05%	3.000.000.000	5.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,64%	1.120.058.076.035	1.041.750.433.639	93,01%	1.047.089.121.157	950.536.220.000
51	TRANSFER								
52	BELANJA TRANSFER								
53	Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,64%	1.120.058.076.035	1.041.750.433.639	93,01%	1.047.089.121.157	950.536.220.000

3.2.2.1. Belanja Operasi

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, adapun kebijakannya adalah :

- 1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- 2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2026;
- 3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total APBD, jika telah melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2027; dan
- 5) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

3.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan

menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.1.5. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu kali periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

3.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat Mandatory Spending, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya P3K disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU earmark).

Pemenuhan amanat alokasi anggaran kelurahan sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan melalui RKPD, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai value creator maupun agent development.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	Tahun 2026
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Proyeksi
	Surplus/Defisit pendapatan dan belanja	(125.713.423.946)	(27.506.084.745)		(98.153.002.474)	(3.606.945.691)		(36.006.356.517)	(10.226.462.000)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
72	Penggunaan SILPA	127.213.423.946	127.159.087.219	100%	98.153.002.474	98.153.002.474	100%	94.546.056.783	99.653.002.474
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
75	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
76	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
77	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
78	Jumlah Penerimaan (72 s/d 77)	127.213.423.946	127.159.087.219	100%	98.153.002.474	98.153.002.474	100%	94.546.056.783	99.653.002.474
81	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
82	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	-	0,00	100%	-	-
83	Pembayaran Pokok Utang	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
84	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
85	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 84)	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	-	-	100%	-	-
	PEMBIAYAAN NETO (78 - 85)	125.713.423.946	125.659.087.219	100,00	98.153.002.474	98.153.002.474	100%	94.546.056.783	99.653.002.474
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	98.153.002.474	0,00	-	94.546.056.783	0,00	58.539.700.266	89.426.540.474

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka struktur APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 digambarkan sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3. 9. Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2026 dan 2027

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	Perkiraan Maju 2027
1	PENDAPATAN	865.462.393.600	897.973.000.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	87.000.000.000	97.440.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	182.862.753.900	192.000.000.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.350.000.000	23.000.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.287.087.700	15.000.000.000
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	298.499.841.600	327.440.000.000
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	512.352.881.000	515.923.331.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	28.795.997.000	32.251.510.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957.787.000	1.072.724.000
12	Dana Alokasi Umum	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	512.352.881.000	515.923.331.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	45.620.265.000	45.620.265.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	566.962.552.000	571.533.002.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	865.462.393.600	897.973.002.000
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	409.532.796.625	461.927.489.106
33	Belanja Barang & Jasa	480.131.240.740	544.024.302.341
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	185.000.000	8.300.782.756
37	Belanja Bantuan Sosial	1.022.250.000	1.124.475.000

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	Perkiraan Maju 2027
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	891.071.287.365	1.015.577.049.203
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	232.600.000	255.860.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	19.263.041.850	190.589.169.519
42	Belanja Gedung dan Bangunan	25.981.647.185	30.402.728.073
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.945.200.000	12.057.700.000
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.542.443.600	1.571.518.800
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	58.964.932.635	234.876.976.392
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	5.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.000.000	5.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
51	TRANSFER	-	-
52	BELANJA TRANSFER	-	-
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
57	SURPLUS / DEFISIT	(85.073.826.400)	1.255.454.025.595
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	-	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan :

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
2. RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
3. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan
5. Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah

Tema RKPD 2026 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah didukung Pemerintahan Berintegritas dan Infrastruktur Berkualitas

Tema RKPD 2026 berdasarkan dokumen RPD 2023-2026

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI

Prioritas Pembangunan & Arah Kebijakan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia

Program Salatiga CERDAS

Program SEHATI

Program KOMIK

Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah

Program SEKAR

Program JARKOM MABAR

Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Program SI AKAS

Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup

Program SARI

Program BIRULAH

Program STBM

Program SOS

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Salatiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Salatiga. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026; (2) Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043; (4) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (6) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Target tahun keempat atau tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dengan arah kebijakan pembangunan yang direpresentasikan melalui tema pembangunan **“Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi”**. Tema Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki sektor ekonomi riil. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan yang lebih konkrit pada sektor ekonomi riil, baik UKM, Koperasi maupun IKM. Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah.

Dalam upaya pencapaian tema pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2026 berdasarkan hasil capaian tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	11,48	10,7	11,49
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,46	15,46	15,47
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	97,88	84,85	97,89
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,34	99,26	99,35
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96,82	96,76	96,83
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	71,05	61,99	71,06
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	63,14	53,26	63,14
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01	7,45	21,02
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah		%	33,17	52	52
			Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97	58,82	58,82
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57	45	45
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	32	16	16
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi pemuda		%	22,96	21	22,5
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	1,96	2,5	2
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	43,95	39,5	43
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	77,93	77,98	77,98
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	99,9	129	99.9
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	11,49	10,31	11.49
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,01	0,06	0.01
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	87,64	95	90.5
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	38.61	35,4	38.5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	82	100
			Persentase Akreditasi Rumah Sakit Minimal Utama	Predikat	Paripurna	Paripurna	100
	Laju Pertumbuhan penduduk			%	1,18	1,3	1,2
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,71	2,1	1,7
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,54	5	
	Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK			Juta	86,18	59,16	
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	53,07	72,22	53,63
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,77	96	99,78
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,43	0,49	0,49
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,1	31,15	33,91
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta Rp	106,18	99,72	114,67
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD	%	1,42	10	10
			terhadap pendapatan				
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,89	4,89	4,9
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	110,13	113,01
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	117,64	79	117,65
			Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	28	51,43
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	10	10
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,16	0,17
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	%	6,28	6,15	6,29
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	-0,6	10	0,1
			Peningkatan produktivitas	%	0,04	0,04	0,04

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
			peternakan daging sapi				
			Produktivitas Sapi Perah	%	1,09	0,057	0,057
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34	6	6
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	1,11	5	1,11
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100
			Ketersediaan beras	%	267,67	70	90
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	6,89	10,55	7
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	3,13	5	3,5
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	10,35	64
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17,42	10,75	10
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	3,86	6,12	3,29-3,67
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68,59	50	78,79
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70,72	70,1	70,85-71,11
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	68	100	69,23
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	76,9	100
	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	97,01	96
Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS			Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,72	85	93
			Angka Kemiskinan	%	4,57	4:13	4,52
Skor Pola Pangan Harapan				Skor	94,4	97	94,4
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49	1,64	1,64
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2.792	2.487	2.400
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	77,84	111	63

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	20	4,6	20
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	0	4,6	1
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	611	630	613
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	100	39,29	100
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	8	24	8
	IDG			Nilai	79,48	81,5	79,6
	IPG			Nilai	95,45	96,5	96,5
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41,65	41	41
				Nilai	80,21	70	70
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,67	86	86
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	95,78	96	96
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,16	37	37
			Indeks PMPRB	Nilai		-	-
			Nilai SAKIP	Angka	66,54	67	67
			Indeks Inovasi	Nilai	51,1	52	52
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	58,33	46,67	58,75
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	98,84	90	100
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	%	78,84	61	80
			Nilai Sistem Merit	%	274,5	326	295
			QA SPIP	Nilai	3	3,1	3,1
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,8	3	2,842
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,90	3	2,917
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	%	88,67	77	88,68

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
			akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				
			Indeks SPBE	Nilai	3,26	2,7	3,65
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	95	100
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	100	100	100
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	89	89
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	99,44	99	99,44
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97,95	96,5	98
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	85,86	80	85,86
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	89,5	90,85
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41	63	63,41
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01	79,9	97,01
			Persentase PKK Aktif	%	100	65	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,67	89	88,7
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	88,97	93,55	89
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	64,96	60	65
			Persentase PKK Aktif	%	83,33	65	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,45	92,2	91,5
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	68,82	74	69
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18	60,15	69
			Persentase PKK Aktif	%	100	73,5	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,26	88	87
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,55	62	64

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6	68	90,6
			Persentase PKK Aktif	%	100	65	100
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100	100
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100	100	100
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100
	Penanggulanga n Potensi Konflik			%	100	100	100
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaa n narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65	1,69	1,67
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	100	100	100
				Nilai	3,9	3,9	3,9
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Meningkatnya persentase Kelurahan tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	26,08	26	17,39
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	76,52	90	75,89
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	61,8	60	61,8
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89,79	98	92
		Meningkatnya kualitas penataaaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	85,41	98	98
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	61,45	56,8	69,98
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	Nilai	48,67	41,8	71,13
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,8	80,4	84,77

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RPD di 2026	Target RKPD 2026 *)
mendukung pembangunan berkelanjutan		hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	34,67	47	40,65
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan		%	0,88	0,71	0,88
			Rasio Ijin Trayek	%	23,59	21,87	20,4
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	19,49	22,79	20,29
	Kinerja lalu lintas kota				0,31	0,5	0,35
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	75,44	83	75	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	12,9	11	12
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan	%	51,56	65	65
			Yang Sehat dan Aman				
			yang didukung dengan PSU				
	Pemukiman yang Tertata			%	6,62	6,49	6,49
		Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	2,13	2,02	2,02
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	100	100
			Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	75	100

*) : Target tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2024 dan proyeksi realisasi tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 telah memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Salatiga periode 2025-2029 dengan persandingan sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4. 2. Keselarasan Visi dan Misi Wali Kota Salatiga dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Visi - Misi Wali Kota Salatiga Tahun 2025-2029	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026	Sasaran
Visi : Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Unggul Misi : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing Sasaran Pokok : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi dengan pemenuhan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional	1 Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Kreatif
	2 Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
	3 Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi dalam olahraga Meningkatnya partisipasi pemuda
	4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Menurunnya angka kesakitan dan kematian Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Mengendalikan pertumbuhan penduduk
	5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif
		Meningkatnya jumlah UKM
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya pendapatan daerah
		Meningkatnya Kinerja Perdagangan
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat
Visi : Transformasi Sosial dan ekonomi yang inklusif Misi : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM Sasaran Pokok : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dengan hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk penurunan pengangguran dan kemiskinan	6 Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
		Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja

Visi - Misi Wali Kota Salatiga Tahun 2025-2029	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026	Sasaran
Visi : Tata Kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur Sasaran Pokok : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan kolaboratif berbasis digital	7 Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
	8 Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan
	9 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
	10 Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba
Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik		
	Meningkatnya presentase kelurahan tangguh bencana	
Visi : Masyarakat yang Maju dan berkelanjutan Misi : - Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas - Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Sasaran Pokok : - Terwujudnya kualitas tata ruang lingkungan kota yang inklusif dan nyaman - Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik dasar yang berkelanjutan	11 Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Meningkatnya Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-4 (keempat) atau tahun terakhir RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 berdasarkan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah. **"Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan"**.

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 - 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 - 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah :

- a. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- b. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
- c. Penguatan Lembaga Demokrasi;
- d. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil

2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

Untuk mendukung prioritas pembangunan ke – 2 tersebut telah dirumuskan dalam 6 (enam) sasaran pembangunan, sebagi berikut :

- a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dengan indikator :
 - 1) Asia Power Index (Military Capability)
 - 2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)

- 3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
- 4) Global Cybersecurity Index
- 5) Indeks Keamanan Laut Nasional

Arah Kebijakan :

- 1) Pembangunan postur pertahanan
 - 2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 3) Komponen cadangan dan komponen pendukung
 - 4) Intelijen dan keamanan dalam negeri
 - 5) Keamanan siber, sandi dan sinyal
 - 6) Keamanan laut dan hidro-oseanografi
 - 7) Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 8) Profesionalisme pelayanan kepolisian
 - 9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi
- b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Pangan;
 - 2) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Arah Kebijakan :

- 1) Swasembada pangan
- c. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Energi
 - 2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

Arah Kebijakan :

- 1) Swasembada energi
- d. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Air Nasional
 - 2) Kapasitas tampungan air (m³/kapita)
 - 3) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
 - 4) Rumah tangga dengan akses sanitasi Aman (%)

Arah Kebijakan :

- 1) Swasembada air
- e. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan indikator :
- 1) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)

- 2) Indonesia Blue economy Index (IBEI)
- 3) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)

Arah Kebijakan :

- 1) Ekonomi syariah
- 2) Ekonomi digital
- 3) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

f. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan indikator :

- 1) Indeks Ekonomi Hijau
- 2) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
- 3) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)
- 4) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)
- 5) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 7) Indeks Kualitas Udara
- 8) Indeks Kualitas Air
- 9) Indeks Kualitas Lahan

Arah Kebijakan :

- 1) Ekosistem ekonomi sirkular
- 2) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- 4) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- 5) Pembangunan rendah karbon
- 6) Pekerjaan hijau/green jobs
- 7) Pengelolaan hutan lestari

Selain intervensi kebijakan tersebut, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional ke - 3 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator:

- 1) Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal

- 2) Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik
 - b. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
 - 1) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)
 - 2) Aset Perbankan/PDB (%)
 - 3) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
 - 4) Aset Asuransi/PDB (%)
 - 5) Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB (%)
 - 6) Total Kredit/PDB (%)
 - 7) Inklusi Keuangan (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Pendalaman Sektor Keuangan
 - c. Meningkatnya Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas
 - 1) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
 - 2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
 - 3) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)
 - 4) Rasio Kewirausahaan (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
 - d. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
 - 1) Rasio PDB Pariwisata (%)
 - 2) Devisa Pariwisata (Miliar USD)

Arah Kebijakan:

 - 1) Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
 - e. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
 - 1) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
- 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**
- Terdapat lima sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 4 sebagai berikut :
- a. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata, dengan indikator:
 - 1) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
 - 2) Harapan lama sekolah (tahun)
 - 3) Rata-rata nilai PISA
 - 4) Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional
 - 5) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)

- 6) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
- 7) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

Arah Kebijakan :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - 3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
 - 4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
 - 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
 - 6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)
- b. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua, dengan indikator:
- 1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
 - 2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)
 - 3) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - 4) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 - 5) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 6) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 2) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
 - 3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
 - 4) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
 - 5) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- c. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator:
- 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
 - 2) Indeks Perlindungan Anak
 - 3) Indeks Pembangunan Pemuda
 - 4) Indeks ketimpangan Gender
 - 5) Indeks Pembangunan Gender
 - 6) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)
 - 7) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Ketangguhan keluarga
- 2) Peningkatan kualitas perlindungan anak
- 3) Peningkatan kualitas pemuda

- 4) Peningkatan Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
 - 5) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
- d. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator:
- 1) Peringkat Indeks Inovasi Global
 - 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 - 3) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
 - 4) Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
- Arah Kebijakan:
- 1) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
 - 2) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
 - 3) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional
- e. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, dengan indikator:
- 1) Jumlah perolehan medali emas pada *Olimpic Games*
 - 2) Jumlah perolehan medali emas pada *Paralimpic Games*
 - 3) Peringkat pada *Asian Games*
 - 4) Peringkat pada *Asian Paragames*
 - 5) Peringkat pada *SEA Games*
 - 6) Peringkat pada *ASEAN Paragames*
 - 7) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga (%)
- Arah Kebijakan:
- 1) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
 - 2) Pengembangan kebudayaan olahraga yang inklusif

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan
- 3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas berupa Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Terdapat 5 (lima) sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, dengan indikator:

- 1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- 2) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

- b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dengan indikator:

- 1) Biaya Logistik (% PDB)
- 2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
- 3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)

Arah Kebijakan:

- 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- 2) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- 3) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- 4) Optimalisasi investasi strategis negara

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 6 adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, dengan indikator:

- 1) Tingkat kemiskinan (%)
- 2) Tingkat kemiskinan ekstrem (%)
- 3) Proporsi penduduk kelas menengah (%)
- 4) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
- 5) Penyandang disabilitas yang berkerja di sektor formal (%)

Arah Kebijakan

- 1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- 2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- 3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

- b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

- 1) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman
- c. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

- 1) Peresentase desa mandiri (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
- d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 1) Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
- 2) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan Perkotaan berkelanjutan
- 2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Ccpat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu :

- (1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan
- (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 7 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya supermasi hukum yang transparan, adil, tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
 - 1) Indeks Pembangunan Hukum
 - 2) Indeks Persepsi Korupsi
 - 3) Indeks Materi Hukum
 - 4) Indeks Integritas Nasional
 - 5) Indeks Integritas Partai Politik

Arah Kebijakan:

- 1) Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilo
 - 2) Reformasi Hukum
 - 3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidanda Pencucian Uang (TPPU)
 - 4) Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
 - 5) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*
- b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
 - 2) Indek Pelayanan Publik
 - 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 4) Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri
- Arah Kebijakan:
- 1) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
 - 2) Pemerintah Digital
 - 3) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
 - 4) Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 - 5) Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia
- c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, dengan indikator:
- 1) Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika
- Arah Kebijakan:
- 1) Pencegahan, Pemberantasan Penyelenggaraan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- d. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agem pembangunan, dengan indikator:
- 1) *Return on Asset* (ROA) BUMN
- Arah Kebijakan:
- 1) Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara
- e. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:
- 1) Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB
 - 2) Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB
- Arah Kebijakan:
- 1) Optimalisasi Pendapatan Negara
 - 2) Optimalisasi Belanja Negara
 - 3) Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

- f. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan indikator:

1) Tingkat Inflasi

Arah Kebijakan:

1) Pengendalian Inflasi

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- (1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan
- (2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 8 adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dengan indikator:

1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Arah Kebijakan:

- 1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- 2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

- b. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator:

1) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan berketahanan iklim
- 2) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada tema “**Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**” yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;

- 2) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- 3) Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4) Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

- 1) PDRB per kapita sebesar 49,68 juta rupiah;
- 2) Angka Kemiskinan sebesar 8,67-7,28%;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,360;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,80%;
- 5) Inflasi pada angka 3 ± 1 %
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47-4,37%;
- 7) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68;
- 8) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
- 9) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
- 10) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34;
- 11) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38;
- 12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73*;
- 13) Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana 4%; dan
- 14) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00

Keterangan :

*Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.2/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditujukan untuk ***“Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi”***. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2026 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah

2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah;
3. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga
4. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
5. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah.
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/Perkebunan dan peternakan
7. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan;
8. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.
9. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana Pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan;
10. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi;
11. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan system informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi;
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar;
13. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan;
14. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Selain 14 (empat belas) prioritas pembangunan tersebut, pada tahun 2026, untuk menjaga keselaran dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga juga memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran pembangunan pada tahun 2026 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,49% - 4,24%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 3,85% - 3,65%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,56% - 6,20%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 86,19

5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,50
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,98 (Berdasarkan BA Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 mengenai target IKLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029)
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,55

Prioritas pembangunan Kota Salatiga yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.3;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tabel 4. 4. Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	PD12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mencetak dan meningkatkan produktivityas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	PP1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD3	Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga
				PD5	Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah
				PD6	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan
			PP3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	PD7	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan
				PD8	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan

No	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			PD14	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang
			PP4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	PD12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
		Melanjutkan pembangunan Infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	PP1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD1.	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah
				PD2	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk
				PD5	Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah
				PD14	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang

No	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	PP2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	PD15	Peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas
		Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten		PD13.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi		PD11	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi
				PD12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PP1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD1.	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah
				PD4	Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi
				PD9	Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong

No	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
				partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan	
				PD10	Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meingkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	PP1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD13.	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
				PD9	Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan
				PD11	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi
				PD14	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara	PP4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	PD12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar

No	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi
				PD13. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PP1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PP2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	PD3 Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga PD5 Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah

Tabel 4. 5. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		11	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		10	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	15	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	8	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
		1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Tabel 4. 6. Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2026 sesuai Ranwal RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS 2026 SESUAI Ranwal RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	1. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
2	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk		PROGRAM JARKOM MABAR Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga		
4	Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi		
5	Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	1. Peningkatan kualitas Pembangunan sumber daya manusia	PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Minelial Kreatif) Mengembangkan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
6	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan	1. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
7	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS 2026 SESUAI Ranwal RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
8	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan		
9	Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan		
10	Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meingkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi		
11	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi		
12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	1. Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	PROGRAM SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap) Rp. 652,774,278,666
13	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas Pembangunan sumber daya manusia	PROGRAM STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Rp. 4,078,372,500
		2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni
		3. Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	
		4. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup	
14	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	1. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari
			PRGRAM SOS : Salatiga Online System Membangun infrastruktur jaringan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS 2026 SESUAI Ranwal RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota
15	Peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas Pembangunan sumber daya manusia	PROGRAM SALATIGA CERDAS
			PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi
			POGRAM JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha

Tabel 4. 7. Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Permasalahan	Isu Strategis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
			Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
1	Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
2	Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga			
3	Indeks Literasi Masyarakat belum optimal			
4	Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah
5	Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif		Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan	Peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian dan perikanan serta peningkatan ketahanan pangan daerah
			Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan	
			Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan	
			Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan	

No	Permasalahan	Isu Strategis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
			Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui pengembangan sektor unggulan perdagangan, industri dan UMKM
			Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	
			Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi	
			Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga	
6	Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat		Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
7	Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi lokal	Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Peningkatan kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penguatan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan daya dukung investasi berbasis teknologi informasi
			Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi	

No	Permasalahan	Isu Strategis	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
			Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
8	Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal	Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang dan pengelolaan lingkungan	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	Pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
9	Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata	Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim
			Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Prioritas pembangunan Kota Salatiga diselenggarakan dengan menerapkan berbagai inovasi dalam rangka pengoptimalan pencapaian target kinerja daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Selain itu, diperlukan pula pemetaan kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah agar hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat mendukung perencanaan pemerintah daerah.

Tabel 4. 8. Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Menengah Pertama
8	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
10	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
12	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
15	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
16	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
20	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
21	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
22	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
23	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goals* (SDG's), penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

- 1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;

- 3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
- 4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- 7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- 8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2026 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi :

- 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 2) peningkatan kualitas pelaksanaan;
- 3) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2026, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

*Tabel 4. 9. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting
di Kota Salatiga Tahun 2026*

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan Permakanan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Keuangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengawasan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

4.2.4.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2026 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Pemerintah Kota Salatiga memprioritaskan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan Masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 10. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Angka Partisipasi Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Angka Partisipasi Sekolah	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Angka Partisipasi Sekolah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Angka Partisipasi Sekolah	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Angka Partisipasi Sekolah	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Angka Partisipasi Sekolah	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Literasi dan Numerasi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Literasi dan Numerasi	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		Literasi dan Numerasi	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		Literasi dan Numerasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Literasi dan Numerasi	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		Literasi dan Numerasi	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Literasi dan Numerasi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2	KESEHATAN		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pelayanan dan Penyelamatan dan	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Evakuasi Korban Bencana	
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
6	SOSIAL		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Pemberian Layanan Kedaruratan

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

4.2.4.3. Dukungan terhadap penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Kota Salatiga, dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menerapkan strategi nasional penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Pemerintah Kota Salatiga menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :
 - a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 - b. Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya strategi penghapusan kemiskinan ekstrim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4. 11. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
2	Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		Pembangunan Tanggul Sungai
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyuluhan Transmigrasi

4.2.4.4. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG’s tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

Pemerintah Kota Salatiga sepenuhnya berkomitmen dalam mendukung terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan SDGs melalui program-program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Salatiga sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 12. Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	- Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	- Program Pemberdayaan Sosial
				- Program Rehabilitasi Sosial
				- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		- Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Pengembangan Perumahan
		- Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)		- Program Kawasan Permukiman
		- Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik		- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum
				- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air limbah
		- Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	- Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan	- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		- Mengendalikan pertumbuhan penduduk		- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				- Program Pengendalian Penduduk
				- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		- Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas		- Program Pengelolaan Pendidikan
		- Meningkatnya kinerja perdagangan	- Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			- Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi	
		- Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	- Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	- Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		- Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	- Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		- Menurunnya angka kesakitan dan kematian	- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		
		- Mengendalikan pertumbuhan penduduk		- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				- Program Rehabilitasi Sosial
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Pengelolaan Pendidikan
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	- Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				- Program Perlindungan Perempuan
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		- Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman		- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah
		- Menurunnya angka kesakitan dan kematian		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan	- Meningkatnya kinerja perdagangan	- Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
	menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua			
		- Meningkatnya pendapatan daerah	- Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				- Program Pengembangan Ekspor
				- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		- Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	- Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				- Program Pemasaran Pariwisata
		- Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	- Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		- Program Penempatan Tenaga Kerja
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	- Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Penyelenggaraan Jalan
		- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga		- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				- Program Pengendalian Pencemaran

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- Program Pengelolaan Persampahan
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kinerja perdagangan	- Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				- Program Pengembangan Ekspor
				- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		- Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	- Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				- Program Pemasaran Pariwisata

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Pengembangan Perumahan
		- Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)		- Program Kawasan Permukiman
		- Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah		- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga		- Program Pembinaan Sejarah
				- Program Pengelolaan Persampahan
		- Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif		- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	- Program Penanggulangan Bencana			
	- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				- Program Pengelolaan Persampahan
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				- Program Pengelolaan Persampahan
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	- Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	- Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		- Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan		- Program Pendaftaran Penduduk

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		publik dan tata kelola pemerintahan		
				- Program Pencatatan Sipil
				- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				- Program Informasi dan Komunikasi Publik
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		

4.2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2026 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2026.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

Tambah tabel POKIR

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PRIORITAS 1



pentahapan
perencanaan RPD
Tahun 2023-2026,



program Intervensi
yang bersifat
kebijakan, isu global,
isu Nasional, isu
Provinsi,



isu strategis, SDGs
dan SPM



Prioritas
pembangunan 2026.

PRIORITAS 2



Program Perangkat Daerah
yang berhubungan dengan
permasalahan pelayanan tugas
fungsi



Pencapaian kinerja
pemerintahan daerah sesuai
urusan

Penentuan prioritas berpengaruh kepada alokasi pendanaan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan

TAMAN WISATA RE

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 berisi program dan kegiatan dari pemerintah Kota Salatiga sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Tahapan penyusunan program dan kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM.
2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Prioritas RPD untuk Tahun 2026

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2026 untuk mewujudkan Masyarakat yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur dan Berbagi. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2026, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat. Tidak semua program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dijadikan program prioritas. Pemilihan program prioritas juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 1 penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah	1,062,300,000	1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	83,300,000	Dinas Perdagangan	Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA Rp. 41,177,093,467

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	115,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
			3 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	764,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dan Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi	
		100,000,000	4 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dan Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi	
2	Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	2,516,000,000	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	300,000,000	Dinas Koperasi dan UMKM	Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan arah kebijakan Pendalaman sektor keuangan dan Meningkatnya lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan arah kebijakan Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi.	
			2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2,216,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						koperasi dengan sasaran Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan arah kebijakan Pendalaman sektor keuangan dan Meningkatnya lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan arah kebijakan Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi.	
3	Peningkatan fasilitas kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga	671,929,200	1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	570,065,200	Dinas Pangan dan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan,	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
			2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	101,864,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
4	Peningkatan fasilitas pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi	1,827,487,000	1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,790,687,000	Dinas Perdagangan	Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
			2 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	36,800,000		Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
5	Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah	2,343,840,491	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,057,875,500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai	PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Minelial Kreatif) Rp. 2,343,840,891

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Masyarakat yang Adil dan Makmur dengan sasaran Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dengan arah kebijakan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.	
			2 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	40,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dengan sasaran Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dengan arah kebijakan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.	
			3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	852,032,891		Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitas pemasaran pariwisata. Program ini	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dengan arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan dan Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan arah kebijakan Penguatan Ekosisten Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.	
			4 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	315,932,100		Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dengan arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan dan Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan arah kebijakan Penguatan Ekosisten Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.	
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	78,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dengan arah kebijakan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan dan Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan arah kebijakan Penguatan Ekosisten Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.	
6	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan	1,737,200,000	1 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA Rp. 41,177,093,467
			2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	660,846,800		Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumbarnya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
			3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	916,353,200		Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian,	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			PRASARANA PERTANIAN			Pembangunan Prasarana Pertanian. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
7	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan	370,000,000	1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	170,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
			2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	200,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
8	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan	671,929,200	1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	570,065,200	Dinas Pangan dan Pertanian	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	
			2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	101,864,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan sasaran Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan arah kebijakan Swasembada pangan, energi dan air.	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
9	Peningkatan fasilitas penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan	30,432,427,000	1 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,432,427,000	Kecamatan	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	
10	Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meingkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	565,313,000	1 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	58,000,000	DPMPTSP	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN). Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	141,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
			3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	254,313,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	112,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dan Optimalisasi investasi strategis negara.	
11	Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi	1,322,508,067	1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	844,508,067	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi					sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dan Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi.	
			2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	478,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Dalam Negeri dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dan Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi.	
12	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	651,545,043,666	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,038,126,000	Kecamatan	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator	PROGRAM SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap) Rp. 652,774,278,666

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia dengan arah kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Penguatan Komunikasi Publik dan Media, Penguatan Lembaga Demokrasi, Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil.	
			2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	650,506,917,666	Semua OPD	Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia dengan arah kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Penguatan Komunikasi Publik dan Media, Penguatan Lembaga Demokrasi, Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil.	
13	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	5,329,237,500	1 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,229,235,000	Bappeda	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan Pembangunan perkotaan berkelanjutan.	
			2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	600,904,500		Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Mewujudkan	PROGRAM STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Rp. 4,078,372,500

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan arah kebijakan Pembangunan perkotaan berkelanjutan.	
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,315,193,000	Dinas Sosial	Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan arah kebijakan Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi, Perlindungan sosial adaptif dan inklusif dan Peningkatan akses	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.	
			4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,212,275,000		Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan arah kebijakan Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi, Perlindungan sosial adaptif dan inklusif dan Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.	
			5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	950,000,000		Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan arah kebijakan Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi, Perlindungan sosial adaptif dan inklusif dan Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.	
			6 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	21,630,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Rp. 21,630,000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dengan sasaran Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.	
14	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang	26,236,110,959	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator dengan arah kebijakan Pengembangan	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Rp. 500,000,000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal dan Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	
			2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,169,992,490		Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator dengan arah kebijakan Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal dan Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	PRGRAM SOS : Salatiga Online System Rp. 25,736,110,959

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			3 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,566,118,469	Dinas Perhubungan	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan terminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupteran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yaitu	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator dengan arah kebijakan Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal dan Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	
15	Peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas	101,339,278,860	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49,270,870,160	Dinas Pendidikan	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana	PROGRAM SALATIGA CERDAS Rp. 49,270,870,160

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas dengan sasaran Hasil Pembelajaran dengan arah kebijakan Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, Penguatan sistem tata kelola pendidikan, Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM).	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51,142,881,176	Dinas Kesehatan	Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas dengan sasaran Terwujudnya Kesehatan untuk Semua dengan arah kebijakan Peningkatan kesejhatan dan gizi masyarakat, Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan Penguatan	PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Rp. 51,425,779,176

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						pelayanan kesehatan dan tata kelola.	
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	282,898,000	DP3APPKB	Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas dengan sasaran Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan arah kebijakan Peningkatan Ketangguhan keluarga, Peningkatan kualitas perlindungan anak, Peningkatan kualitas pemuda, Peningkatan Kesetaraan Gender,	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dan Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.	
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	642,629,524	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas dengan sasaran Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan arah kebijakan Peningkatan Ketangguhan keluarga, Peningkatan kualitas	POGRAM JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha Rp. 642,629,524

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						perlindungan anak, Peningkatan kualitas pemuda, Peningkatan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dan Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.	

5.1.1.2. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan rencana program tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN : 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun			
INDIKATOR SDGs: ANGKA KEMISKINAN			
INDIKATOR SDGs: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	920.249.700,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	963.185.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.059.142.131,00	
PROGRAM 5: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000,00	
PROGRAM 6: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
PROGRAM 7: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
PROGRAM 8: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
PROGRAM 10: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	914.000.000,00	
PROGRAM 11: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
PROGRAM 12: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.216.000.000,00	
PROGRAM 13: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.270.456.000,00	
PROGRAM 14: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			BAPPEDA
	Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	236.945.000,00	
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	255.398.000,00	
PROGRAM 16: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	103.000.000,00	
PROGRAM 17: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
PROGRAM 18: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			DISDIK
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.264.407.070,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	20.097.785.200,00	
	Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	754.701.290,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
PROGRAM 20: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	
PROGRAM 21: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
PROGRAM 22: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM 23: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM 24: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
PROGRAM 25: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	841.500.000,00	
PROGRAM 26: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			KECAMATAN
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Kelurahan (di 4 Kecamatan)	29.270.228.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.260.237.000,00	
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Ketersediaan Pangan Utama Beras			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
INDIKATOR SDGs: Penanganan Rumah tangga Rawan Pangan			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	288.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs :Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Indikator SDGs Persentase Kasus Stunting di Salatiga			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi balita Gizi Buruk			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ibu hamil yang anemia			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGS : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs : Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	288.000.000,00	
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Indikator SDGs: Angka Kematian Ibu (AKI).			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup.			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
INDIKATOR SDGs : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba			
PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
INDIKATOR SDGs : CPR/ Peserta KB Aktif			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
INDIKATOR SDGs : Total Fertility Rate (TFR)			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
INDIKATOR SDGs : UN MEET NEED			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
	Kegiatan 3: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB	441.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase cakupan kepesertaan JKN			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
TUJUAN 4 : Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua			
Indikator SDGs : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
Indikator SDGs :Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.334.992.051,00	
Indikator SDGs: Persentase guru layak mengajar SD/ MI, SMP/MTs			
PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.571.858.940,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.097.785.200,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	754.701.290,00	
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Indikator SDGs : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	84.248.800,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		
	Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.022.000,00	
Indikator SDGs : Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penagananan Sesuai Standart			
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28.069.800,00	
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
INDIKATOR SDGs :Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak)			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs : Persentase Pemenuhan Air Baku			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
TUJUAN 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Layak untuk Semua			
INDIKATOR SDGs : Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.615.687.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.043.688.000,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.825.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Disnas Perinaker
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	852.032.891,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs :Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	410.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan mancanegara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan nusantara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			
INDIKATOR SDGs : Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik			
Program Penyelenggaraan Jalan			Dinas PUPR
Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		14.169.992.490,00	
INDIKATOR SDGs : Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		37.155.798,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
INDIKATOR SDGs : Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara			
INDIKATOR SDGs: Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Disbudpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs: Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	920.249.700,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	963.185.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
Indikator SDGs: Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		50.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.059.142.131,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.545.500,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs : PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		37.155.798,00	
INDIKATOR SDGs : KELURAHAN SIAGA BENCANA			
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	841.500.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			SATPOL PP
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	218.000.000,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan (Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan).			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13: Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
INDIKATOR SDGs : Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	37.155.798,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan			
TUJUAN 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh			
INDIKATOR SDGs: INDEKS KRIMINALITAS			
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM			SATPOL PP
	Kegiatan 1:Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	770.100.000,00	
	Kegiatan 2 :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	175.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)			
Program: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kegiatan 1: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26.046.000,00	
	Kegiatan 2: Penataan Pendaftaran Penduduk	422.852.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	86.304.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.150.000,00	
	Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan	15.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
INDIKATOR SDGs : Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	822.000.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	415.500.000,00	
	Kegiatan 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	650.000.000,00	
	Kegiatan 5: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	
	Kegiatan 6: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Nilai SAKIP			
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat
	Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	94.740.000,00	
INDIKATOR SDGs : Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	159.240.500,00	
PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	483.905.500,00	
INDIKATOR SDGs: Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	159.240.500,00	
TUJUAN 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.043.688.000,00	

5.1.1.3. Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Pelaksanaan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait serta pelaksanaan Perwali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Kota Salatiga Tahun 2026. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 3 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
JENIS SPM : SPM BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	5,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	650,000,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	405,000,000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Literasi dan Numerasi	9,787,600	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Literasi dan Numerasi	9,787,600	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	27,675,200	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Literasi dan Numerasi	78,200,800	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	72,708,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Literasi dan Numerasi	23,517,218,550	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	30,000,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	75,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	7,418,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kekhususan PAUD	100,000,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kekhususan PAUD	24,908,400	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kekhususan PAUD	9,709,600	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	9,709,600	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	10,214,600	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kekhususan PAUD	-	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kekhususan PAUD	7,189,600	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	116,650,000	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	30,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	11,000,000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	8,750,000	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	11,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	49,674,900	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	158,000,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	132,750,200	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	39,918,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	76,635,000	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Sekolah	7,550,000	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Sekolah	8,325,000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	40,449,800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	285,848,400	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	10,000,100	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	3,375,000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	19,468,944,940	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	102,914,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	32,912,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12,705,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	193,245,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	148,128,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	15,860,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	40,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	115,500,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34,734,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15,540,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52,685,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	330,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	bencana Kabupaten/Kota		
Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	250,000,000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	50,000,000	
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	55,000,000	
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	600,000,000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	46,500,000	
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	45,000,000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25,000,000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	130,000,000	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	22,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG SOSIAL			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	440,000,000	
Penyediaan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30,071,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar	215,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	278,114,000	

5.1.1.4. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa “Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Pada RKPD tahun 2026 dilakukan penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan		Dinas Pendidikan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199,664,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan		
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		85,000,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		17,113,918,500	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		85,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		75,000,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		24,908,400	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		270,600,000	
Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		7,418,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		10,214,600	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		199,070,400	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		49,674,900	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		8,674,900	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan		Dinas Kesehatan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2,000,000,000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		5,815,850,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		6,000,000	
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		148,128,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		193,245,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		12,705,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		32,912,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		15,540,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		224,872,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		200,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		459,201,000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		108,000,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		284,301,176	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		24,000,000,000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		50,000,000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		-	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		96,032,000	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		45,000,000	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		136,733,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan		
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		5,508,230,000	
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		583,575,000	
Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192,353,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		100,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		150,000,000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		750,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		330,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		150,000,000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		-	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350,000,000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1,000,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Serta Perlindungan Masyarakat		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial		Dinas Sosial
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150,000,000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		433,873,000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan		440,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		400,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		103,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		288,318,000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		-	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		-	Dinas Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		82,679,000	
Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		250,400,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		70,450,000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		60,000,000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30,000,000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian		
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85,200,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		-	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		53,000,000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administra si Kependud ukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		165,000,000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,830,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubung an		Dinas Perhubungan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		113,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80,075,176	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		233,750,500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		216,450,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		300,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		200,000,000	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		2,016,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		1,270,456,000	
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130,000,000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		254,313,000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		60,000,000	
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202,420,000	
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		234,000,000	
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan		Dinas Perdagangan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266,931,000	
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192,000,000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		544,000,000	
			Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,145,270,393	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah		
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		41,056,000	
			Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,800,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		613,000,000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		41,922,000	
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		125,000,000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kuangan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99,577,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat		Inspektorat
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		462,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Argomulyo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90,788,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		142,520,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,596,536,600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidomukti
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		100,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,817,651,200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidorejo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		183,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,558,342,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Tingkir
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		165,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,697,287,960	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,074,200	

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.2.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik. Selain itu pada program ini juga diarahkan pada pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan

menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan

Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target indikator kinerja yaitu jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian dalam

rangka pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.1.2.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya

Lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, pada program ini untuk kinerja cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai mulai memperhatikan arah kebijakan perlindungan tenaga kerja yang informal, mengingat untuk kedepan target kepesertaan Jamsostek tidak hanya yang formal saja, namun yang informal juga dilihat capaiannya.

5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.1.2.2.3. Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

5.1.2.2.4. Pertanian

- 1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi untuk mencapai target indikator kinerja persentase rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA).
- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan.
- 3) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah aset pemerintah untuk mencapai indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah.
- 4) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 5) Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau

dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

- 4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

- 7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

- 2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database kependudukan.

5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

5.1.2.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan terminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

2) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.1.2.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.1.2.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.1.2.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.1.2.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.1.2.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.1.2.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah arsip yang diselamatkan.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.1.2.3. Urusan Pilihan

5.1.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.1.2.3.2. Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.1.2.3.3. Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumbaranya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.

5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.1.2.3.4. Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam

negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.1.2.3.5. Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

5.1.2.3.6. Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitas Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.1.2.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget

execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash management (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.1.2.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.1.2.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.1.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

untuk mencapai indikator program persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

5.2. Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2026, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja Pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp865.462.393.600,-, belanja daerah sebesar Rp960.041.220.000,-. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Kota Salatiga tahun 2026.

Tabel 5. 5 Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
1	PENDAPATAN	865.462.393.600	897.973.000.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	87.000.000.000	97.440.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	182.862.753.900	192.000.000.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.350.000.000	23.000.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.287.087.700	15.000.000.000
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	298.499.841.600	327.440.000.000
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	512.352.881.000	515.923.331.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	28.795.997.000	32.251.510.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957.787.000	1.072.724.000
12	Dana Alokasi Umum	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	512.352.881.000	515.923.331.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	45.620.265.000	45.620.265.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	566.962.552.000	571.533.002.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	865.462.393.600	897.973.002.000
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	409.532.796.625	461.927.489.106
33	Belanja Barang & Jasa	480.131.240.740	544.024.302.341
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	185.000.000	8.300.782.756
37	Belanja Bantuan Sosial	1.022.250.000	1.124.475.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	891.071.287.365	1.015.577.049.203
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	232.600.000	255.860.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	19.263.041.850	190.589.169.519
42	Belanja Gedung dan Bangunan	25.981.647.185	30.402.728.073
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.945.200.000	12.057.700.000

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.542.443.600	1.571.518.800
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	58.964.932.635	234.876.976.392
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	5.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.000.000	5.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
51	TRANSFER	-	-
52	BELANJA TRANSFER	-	-
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
57	SURPLUS / DEFISIT	(85.073.826.400)	1.255.454.025.595
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	-	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	-	-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing



30
Indikator
Kinerja Utama



157
Indikator
Kinerja Daerah



172
Indikator
Program OPD

BAB VI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2026 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/1761SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah Kota Salatiga tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target RPD 2026	Target RKPD 2026*)	Perangkat Daerah Koordinator
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	10,7	11,49	Dinas Pendidikan
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	15,46	15,47	Dinas Pendidikan
3.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	63,14	53,26	63,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target RPD 2026	Target RKPD 2026*)	Perangkat Daerah Koordinator
4.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	33,17	52	52,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	32	16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	22,96	21	22,5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7.	Angka Harapan Hidup	Angka	77,93	77,98	77,98	Dinas Kesehatan
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,18	1,3	1,2	DP3APPKB
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54	5		Dinas Perdagangan
10.	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	86,18	59,16		Sekretariat Daerah
11.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	6,89	10,55	7	DPMPTSP
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	6,12	3,29-3,67	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
13.	Angka Kemiskinan	%	4,57		4.52-4.24	Dinas Sosial
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	70,1	70,85-71,11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
15.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	97,01	96	97,05	Dinas Sosial
16.	Pola Pangan Harapan	Nilai	94,4	97	94,4	Dinas Pangan dan Pertanian
17.	Persentase Peminat Transmigrasi	%	20	4,6	20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
18.	Score Capaian KLA	Nilai	611	630	613	Dp3APPKB
19.	IDG	Nilai	79,48	81,5	79,6	DP3APPKB
20.	IPG	Nilai	95,45	96,5	96,5	DP3APPKB
21.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,21	70,00	70,00	Sekretariat Daerah
22.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	Satpol PP
23.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target RPD 2026	Target RKPDP 2026*)	Perangkat Daerah Koordinator
24.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,90	3,9	3,90	BPBD
25.	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	61,8	60	61,8	DPUPR
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *)	Nilai	61,45	56,8	69,98	Dinas Lingkungan Hidup
27.	Rasio Konektivitas Kota	%	0,88	0,71	0,88	Dinas Perhubungan
28.	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	0,31	0,5	0,35	Dinas Perhubungan
29.	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	12,9	11	12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30.	Pemukiman yang Tertata	%	6,62	6,49	6,49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterangan :

*)Target yang ditetapkan untuk 2026 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

*)Target tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Salatiga tahun 2026. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD ¹⁾	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,67	86	86,00	SETDA
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	51,56	65,00	65,00	DINAS PKP
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49	1,64	1,64	DISPANGTAN
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72		85,87	BAPPEDA
5.	Angka Kemiskinan	Angka		4,13	4,52-4,24	DINSOS
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,01		0,01	DINKES
B	Aspek Daya Saing Daerah					
7.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	2,7	3,65	DISKOMINFO
8.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89,79	98	92	DPUPR
C	Aspek Pelayanan Umum					
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					DISDIK
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	97,88	84,85	97,89	
2.	APS SD/MI	%	99,34	99,26	99,35	
3.	APS SMP/MTs	%	96,82	96,76	96,83	
4.	APS Pendidikan Kesenjangan	%	71,05	61,99	71,06	
	Kesehatan					DINKES
5.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	99,9	129	99,9	
6.	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	11,49	10,31	11,49	
7.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,01	0,06	0,01	
8.	Success Rate TB	%	87,64	95	90,5	
9.	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	38,61	35,4	38,5	
10.	Presentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	82	100	
11.	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					DPU PR
12.	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	85,41	98	98,00	
13.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89,79	98	92	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					DINAS PKP
14.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,13	2,02	2,02	

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD ^{*)}	
15.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	51,56	65,00	65,00	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
16.	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	SATPOL PP
17.	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	
18.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65	1,69	1,67	
19.	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	
20.	Kelurahan Tangguh Bencana	%	26,08	26	17,39	BPBD
21.	Indeks Risiko Bencana	%	76,52	90	75,89	
	Sosial					DINAS SOSIAL
22.	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,72	85	93	
	Tenaga kerja					DISPERINAKER
23.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	68	100	69,23	
24.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68,59	50	78,79	
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	106,18	99,72	114,67	
26.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	76,9	100	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					DP3APPKB
27.	Prosentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	100	39,29	100	
28.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,65		41,00	
	Pangan					DISPANGTAN
29.	Ketersediaan pangan utama (beras)	%	267,67	70	90	
30.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita	2.792	2.487	2,400	
31.	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita	77,84	111	63	
32.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49	1,64	1,64	
	Pertanahan					DINAS PKP

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD ^{*)}	
33.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	75	100	
34.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	100	100,00	
	Lingkungan Hidup *)					DLH
35.	Indeks Kualitas Air *)	Nilai	48,67	41,8	71,13	
36.	Indeks Kualitas Udara *)	Nilai	87,8	80,4	84,77	
37.	Indeks Kualitas Lahan *)	Nilai	34,67	47	40,65	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					DISDUKCAPIL
38.	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	99,44	99	99,44	
39.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97,95	96,5	98	
40.	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	85,86	80	85,86	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					DP3APPKB
41.	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,71	2,1	1,7	
42.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%/th	8	24	8	
	Perhubungan					DISHUB
43.	Rasio Ijin Trayek	%	23,59	21,87	20,4	
44.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	19,49	22,79	20,29	
45.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	75,44	83	75	
	Komunikasi dan Informatika					DISKOMINFO
46.	Tingkat Keterbukaan informarmasi Publik	%	100	100	100	
47.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	2,7	3,65	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					DINKOP UKM
48.	Persentase Koperasi Aktif	%	53,07	96	53,63	
49.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,77	0,49	99,78	
	Penanaman Modal					DPMPTSP
50.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	3,13	5	3,5	
51.	Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	10,35	64	
52.	Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17,42	10,75	10	
	Kepemudaan dan olah raga					DISPORA
53.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	1,96	2,5	2	
54.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	43,95	39,5	43	

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD ^{*)}	
55.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	DISKOMINFO
	Statistik					
56.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	95	100	DISKOMINFO
	Persandian					
57.	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	89	89	DISBUDPAR
	Kebudayaan					
58.	Presentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97	58,82	58,82	DINPERSIPDA
59.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57	45	45	
	Perpustakaan					DINPERSIPDA
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01	7,45	21,02	
	Kearsipan					DISBUDPAR
61.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	88,67	77	88,68	
	Kelautan dan Perikanan					DISPANGTAN
62.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34	6	6	
63.	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	1,11	5	1,11	DISBUDPAR
	Pariwisata					
64.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	110,13	100	DISPANGTAN
65.	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	117,64	79	79	
66.	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	28	28	DISPANGTAN
67.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	10	10	
68.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,16	0,16	DISPANGTAN
	Pertanian					
69.	Produktivitas Padi	%	6,28	6,15	6,29	DISPANGTAN
70.	Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura	%	-0,6	10	0,1	
71.	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,04	0,04	0,04	DISPANGTAN
72.	Produktivitas Sapi Perah	%	1,09	0,057	0,057	

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD ^{*)}	
73.	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	DISDAG
	Perdagangan					
74.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,89	4,89	4,9	DISPERINAKER
	Perindustrian					
75.	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	%	0,43		0,49	DISPERINAKER
76.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,1	31,15	33,91	
	Transmigrasi					DISPERINAKER
77.	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	0	4,6	1	
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					BAPPEDA
78.	Indeks Inovasi	Nilai	51,1	52	52	
79.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	58,33	46,67	58,75	
80.	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	98,84	90	100	BPKPD
	Keuangan					
81.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	
82.	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	1,42	10	10	BKPSDM
	Kepegawaian					
83.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78,84	61	80	
84.	Nilai Sistem Merit	Nilai	274,5	326	295	
	Pengawasan					IRDA
85.	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	
86.	QA SPIP	Nilai	3	3,1	3,1	
87.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,8	3	2,842	
88.	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,90	3	2,917	SETWAN
	Sekretariat DPRD					
89.	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100	100	SETDA
	Sekretariat Daerah					

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
				RPD	RKPD*)	
90.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	95,78	96	96	
91.	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,16	37	37	
92.	Indeks PMPRB	Nilai		-	-	
93.	Nilai SAKIP	Angka	66,54	67	67	
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,67	86	86	
	Kecamatan Sidomukti					KEC. SIDOMUKTI
95.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	89,5	90,85	
96.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41	63	63,41	
97.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01	79,9	97,01	
98.	Prosentase PKK Aktif	%	100	65	100	
	Kecamatan Sidorejo					KEC. SIDOREJO
99.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,67	89	88,7	
100.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	88,97	93,55	89	
101.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	64,96	60	65	
102.	Prosentase PKK Aktif	%	83,33	65	100	
	Kecamatan Tingkir					KEC. TINGKIR
103.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,45	92,2	91,5	
104.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	68,82	74	69	
105.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18	60,15	69	
106.	Prosentase PKK Aktif	%	100	73,5	100	
	Kecamatan Argomulyo					KEC. ARGOMULYO
107.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,26	88	87	
108.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,55	62	64	
109.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6	68	90,6	
110.	Prosentase PKK Aktif	%	100	65	100	

Keterangan :

*) Target yang ditetapkan untuk 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

*) : Target tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025

6.3 Indikator Kinerja Program

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut

Tabel 6. 3. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				DINAS PENDIDIKAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%			
a.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	100	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
a.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100	100	
b.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	
c.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,003	0,002	
d.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,41	0,4	
e.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,31	87,32	
f.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,73	97,74	
g.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,98	1,99	
h.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	1,8	1,81	
i.	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,06	2,07	
j.	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,87	1,88	
k.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SD/MI	%	30	35	
l.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs	%	30	35	
m.	APK PAUD	%	38,36	38,37	
n.	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	0,24	0,3	
o.	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,36	87,37	
p.	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	50	58,33	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
a.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	20.20	20,30	
b.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	18	19	
c.	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	66.67	75,00	
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
a.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	32	33	
b.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	42	43	
c.	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	52	53	
d.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84.98	84,99	
e.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97.33	97,34	
f.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96.46	96,47	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
a.	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86.12	86,13	
b.	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58.36	58,37	
c.	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	32	34	
d.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	99	100,00	
e.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	99.00	100,00	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
a.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	12	13	
b.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	12	13	
c.	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	35	40	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				DINAS KESEHATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	
b.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	86	86,5	
c.	Cost Recovery	%	100	100	
d.	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
a.	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11	10	
b.	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	140	145	
c.	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	56	57	
d.	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	< 1	< 1	
e.	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	34.8	39,1	
f.	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	76	78	
g.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
h.	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	87	88	
i.	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	78	80	
j.	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98	98	
k.	Cakupan BIAS DT/Td	%	98	98	
l.	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	
m.	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	99	99	
n.	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100	100	
o.	Cakupan kepesertaan JKN	%	100	100	
p.	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	
q.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	
r.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	
s.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	
t.	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	100	100	
u.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100	
v.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	
w.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100	
x.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100	
y.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	
z.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	
aa.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	
ab.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	
ac.	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	
ad.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	
ae.	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
af.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	
ag.	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	68	70	
ah.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	82	83	
ai.	Cakupan UCI kelurahan	%	100	100	
aj.	Deteksi Dini Hepatitis	%	80	82	
ak.	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	95	
al.	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	<8	<7	
am.	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	75	80	
an.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	84	85	
ao.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	80	80	
ap.	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	24	30	
aq.	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	4	5	
ar.	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4.1	4	
as.	Persentase Ibu hamil KEK	%	7	6	
at.	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	10	9	
au.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	
av.	Prevalensi Stunting pada Balita	%	9.8	9,6	
aw.	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	
ax.	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100	
ay.	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	86	87	
az.	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	84	85	
ba.	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	
bb.	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	83.33	83,33	
bc.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0.401	0,402	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
bd.	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
a.	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	65	70	
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
a.	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58	59	
b.	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	86	88	
c.	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	82	84	
d.	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	66	68	
e.	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89	90	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
a.	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	95,6	100	
b.	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,61	96,62	
c.	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	96,8	97,4	
d.	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	
e.	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	96,62	97,19	
f.	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,56	93,63	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				DPUPR

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	90	92	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
a.	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	87,29	87,45	
	*) Porsentase Rumah tangga dengan akses air minum aman		93,30 (IUP)	94,00 (IUP)	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
a.	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,68	95,8	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
a.	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	78,51	79,51	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
a.	Rasio kepatuhan IMB	%	80	80	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
a.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
a.	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	94.21	94,37	
b.	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	98.52	100	
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
a.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	75	75	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
a	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97	97	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				DPKP
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	90	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				DINAS PKP
a.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	66.67	100	
b.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	75	100	
c.	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	75	100	
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				DINAS PKP
a.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	11.27	13,52	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
b.	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	21.74	26,09	
c.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	7.18	6,84	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				DINAS PKP
a.	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	55	65	
b.	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18.34	18,88	
c.	cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5.75	5,82	
E.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	88	88	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				BPBD
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	87	88	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satpol PP
a.	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	97	99	
b.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
4.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				BPBD
a.	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	
b.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	
c.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	
d.	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	38.3	40	
5.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
a.	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	67	70	
b.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	68	70	
c.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	
F.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	90,5	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				DINSOS
a.	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas	%	81.77	100	
b.	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	50	57,69	
c.	Persentase PSKS yang dibina	%	80	85	
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
a.	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
b.	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
c.	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
d.	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
a.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	97.4	97,6	
b.	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	95.5	96	
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
a.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	
b.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
a.	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,98	89,48	
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
a.	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	70	100	
b.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,04	0,04	
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
a.	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	85,71	100	
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
a.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	35	37	
b.	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	29	32	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89	90	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
a.	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100	
b.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,7	3,8	
c.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	
d.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24	24	
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
a.	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	
b.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	14,13313412	14,1331	
			100	100	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
a.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	50	75	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
a.	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
a.	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	61,77	64,06	
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
a.	Persentase anak korban kekerasan	%	0,02	0,02	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				DISPANGTAN
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,872	87,39	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
a.	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	30	30	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
a.	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	90	100	
b.	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	5,02	4,52	
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
a.	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	10,20	10,74	
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
a.	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				DINAS PKP
a.	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	75	100	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				DINAS PKP
a.	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	100	
b.	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	75	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
c.	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	100	40	
3.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				DINAS PKP
a.	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	9	12	
b.	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	75	100	
E.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				DINAS LH
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	85	
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				DINAS LH
a.	IKPLHD	Dokumen	1	1	
b.	KLHS	Dokumen	1	0	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				DINAS LH
a.	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	
b.	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	
c.	Presentase Konservasi Lahan	%	15	20	
d.	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	30	35	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				DINAS LH
a.	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,4	17,5	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				DINAS LH
a.	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	30	35	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				DINAS LH
a.	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	
b.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	32	30	
c.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	
d.	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100	
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				DINAS LH
a.	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	100	
b.	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100	
c.	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	40	50	
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				DINAS LH
a.	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	30	
b.	Persentase Penanganan Sampah	%	70	70	
c.	Persentase Pengangkutan Sampah	%	70	70	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
F.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,6	88,9	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
a.	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	96,2	96,5	Disdukcapil
b.	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,8	80	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
a.	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,9	99	Disdukcapil
b.	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
a.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	Disdukcapil
G.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
a.	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	79	90	
b.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	1,8	1,75	
c.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
d.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	2,1	2	
e.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22	22,1	
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
a.	Rasio akseptor KB baru	%	72	73	
b.	Cakupan peserta KB aktif	%	83	84	
c.	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2	1:2	
d.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78,2	78,3	
e.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	13	12	
f.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,75	27,57	
g.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	87	90	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
a.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:2	
b.	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	90	90	
c.	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	1,8	1,7	
d.	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	85	87	
e.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	80	82	
f.	Persentase Baduta Stunting	%	24	22	
H.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Dinas Perhubungan
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84.28	84,33	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
a.	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	89	95	
b.	Persentase layanan angkutan darat	%	29	29	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	88,31	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
a.	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	96	98	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
a.	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	
b.	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	98	100	
J.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Dinas Koperasi, UKM

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,42	83,45	
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
a.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
a.	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	35.09	39,47	
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
a.	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	38.85	40,1	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
a.	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	75	100	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
a.	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	23	24	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
a.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	31,06	31,28	
K.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				DPMPTSP
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89	90	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
a.	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	586,84	645,52	
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10	10	
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
a.	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	93	94	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	12	13	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
a.	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	10	
L.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				DISPORA
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	82	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
a.	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5	5	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
a.	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	27	30	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
a.	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	70	75	
M.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				DISKOMINFO
a.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	85	90	
b.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	85	90	
N.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				DISKOMINFO
a.	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73	75	
O.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DISBUDPAR		
a.	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	85	86	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
a.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	30	35	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
a.	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	75	100	
4.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
a.	Prosentase kajian sejarah	%	75	100	
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
a.	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	21	28	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
a.	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	4,8	4,5	
P.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				DINPERSIP
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,21	83.71	
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
a.	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	85,83	87,83	
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
a.	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
Q.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				DINPERSIP
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
a.	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	%	86	88	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
a.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	40	50	
3.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
a.	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	100	100	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				DISPANGTAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
a.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100	
b.	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
a.	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	
b.	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				DISBUDPAR
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
a.	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
a.	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
a.	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
a.	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	100	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				DISPANGTAN
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
a.	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75	75	
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
a.	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75	75	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
a.	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
a.	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0	0	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
a.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani				
	- Pemula	%	53,24	58,56	
	- Lanjut	%	53,24	58,56	
	- Madya	%	13,92	15,31	
	- Utama	%	2,36	2,6	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				DISDAG
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,15	84,2	
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
a.	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	20	25	
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
a.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	95	100	
b.	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	85	90	
c.	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	51	71	
d.	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	34	44	
e.	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	36	46	
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
a.	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
b.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	26	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
a.	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	80	90	
6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
a.	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	90	100	
E.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				DISPERINAKER
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
a.	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,56	0,75	
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				
a.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	75	100	
b.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,9	1	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
a.	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	5,6	6	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
F.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				DISPERINAKER
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
a.	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	100	
IV.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
A.	SEKRETARIAT DAERAH				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100	100	Bag. Prokompin
b.	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100	100	Bag. Umum
c.	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	Bag. Pembangunan
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
a.	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	100	Bag. Pemerintahan
b.	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	100	
c.	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	95	95	
d.	Skor LPPD	Nilai	3,1	3,1	
e.	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	
f.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	100	100	Bag. Hukum
g.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	Bag. Kesra
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
a.	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	Bag. Perekonomian
b.	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100	
c.	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100	
d.	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
e.	Cakupan Koordinasi POK	%	100	100	Bag. Pembangunan
f.	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	84,00	84,15	Bagian PBJ
B	SEKRETARIAT DPRD				
1.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA				
a.	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	85	90	Sekretariat DPRD
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
a.	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	Sekretariat DPRD
b.	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	100	Sekretariat DPRD
c.	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100	Sekretariat DPRD
C.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	PERENCANAAN				BAPPEDA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				BAPPEDA
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,5	83	
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
a.	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	85	90	
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				BAPPEDA
a.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	87	90	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
b.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	87	90	
D.	KEUANGAN				BPKPD
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				BPKPD
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,5	82	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				BPKPD
a.	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,2	20,2	
b.	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84,82	84,82	
c.	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	97,78	97,78	
d.	Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	15,07	
e.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	
f.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				BPKPD
a.	Asset Management	Laporan	4	4	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				BPKPD
a.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	
E.	KEPEGAWAIAN				BKPSDM

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				BKPSDM
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,50	85,20	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				BKPSDM
a.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	1,47	1.47	
b.	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	10	10	
c.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	250,00	250,00	
d.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	23,96	23.96	
e.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	
F.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				BKPSDM
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				BKPSDM
a.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	4,38	2,94	
b.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,24	6,21	
G.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				BAPPEDA
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				BAPPEDA
a.	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakatdaerah.	%	37,50	44,44	
V.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
A.	INSPEKTORAT DAERAH				INSPEKTORAT DAERAH
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				INSPEKTORAT DAERAH

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	84	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT DAERAH
a.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	81	82	
b.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	89	90	
c.	Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP	%	60	75	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT DAERAH
a.	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	85	86	
VI.	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
A.	KECAMATAN SIDOREJO				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN SIDOREJO
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1	1,12	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN SIDOREJO
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN SIDOREJO

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN SIDOREJO
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,54	93,55	
B.	KECAMATAN ARGOMULYO				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	1,4	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,37	74	
C.	KECAMATAN TINGKIR				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN TINGKIR
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,9	0,95	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN TINGKIR
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN TINGKIR
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN TINGKIR
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	73	74	
D.	KECAMATAN SIDOMUKTI				

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,5	97,8	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1	1,1	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	64	65	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	85,1	85,15	
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	85	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA 2026		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			RPD	RKPD	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	70	75	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				KESBANG
a.	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	100	100	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				KESBANG
a.	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	45	47,5	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				KESBANG
a.	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	8	10	
b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	54	56	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				KESBANG
a.	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	35	50	

6.4 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama Pembangunan daerah tahun 2026 merupakan penjabaran indikator dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga tahun 2025-2045.

Tabel 6. 4. Indikator Utama Pemabngunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2026
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	4 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,59
			Kesehatan Ibu dan Anak :	
			5 Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	2
			6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,6
			Penanganan Tuberkulosis:	
			7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	99,11
			8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,40
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,38
			Hasil pembelajaran:	
			10 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	73,69
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	69,90
			c) Numerasi SD/Sederajat	58,75
			d) Numerasi SMP/Sederajat	48,22
			11 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,27
			12 Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,10

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2026
			13 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,80
			14 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	90,95
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	89,93
			16 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75
			17 Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.232
			18 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,71
			19 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,07
			20 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
		14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	18 Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
			19 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,11
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,49-3,81
			38 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54,0
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,32
			24 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	8,20
			25 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1.120

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2026
			26 Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11
			27 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,53
			28 Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,03
			29 Disparitas Harga	±10
			36 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-4,42
			37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	66,74
			34 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,84
		5. Penerapan Ekonomi Hijau		
		6. Transformasi Digital	39 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	91,94
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,00
			55 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	91,11 - 124,86
			56 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	16,42- 16,92
		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	93,35
			41 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,52
			42 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	11,80
			35 Persentase Desa Mandiri	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional	51 Indeks Reformasi Hukum	80,60
			52 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33
			53 Indeks Pelayanan Publik	4,45

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2026
		Tangguh, dan Demokrasi Substansial	54 Indeks Integritas Nasional	75,55
			50 Indeks Reformasi Birokrasi	70,21
		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		
		11. Stabilitas Ekonomi makro	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,65
			32 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	62,60
			33 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	44,79
		12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,98
			43 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	22,00
			47 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	78,67
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	67,45
			45 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,85
			2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,69
			3 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,48
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48 Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,63
			49 Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	48.158,45

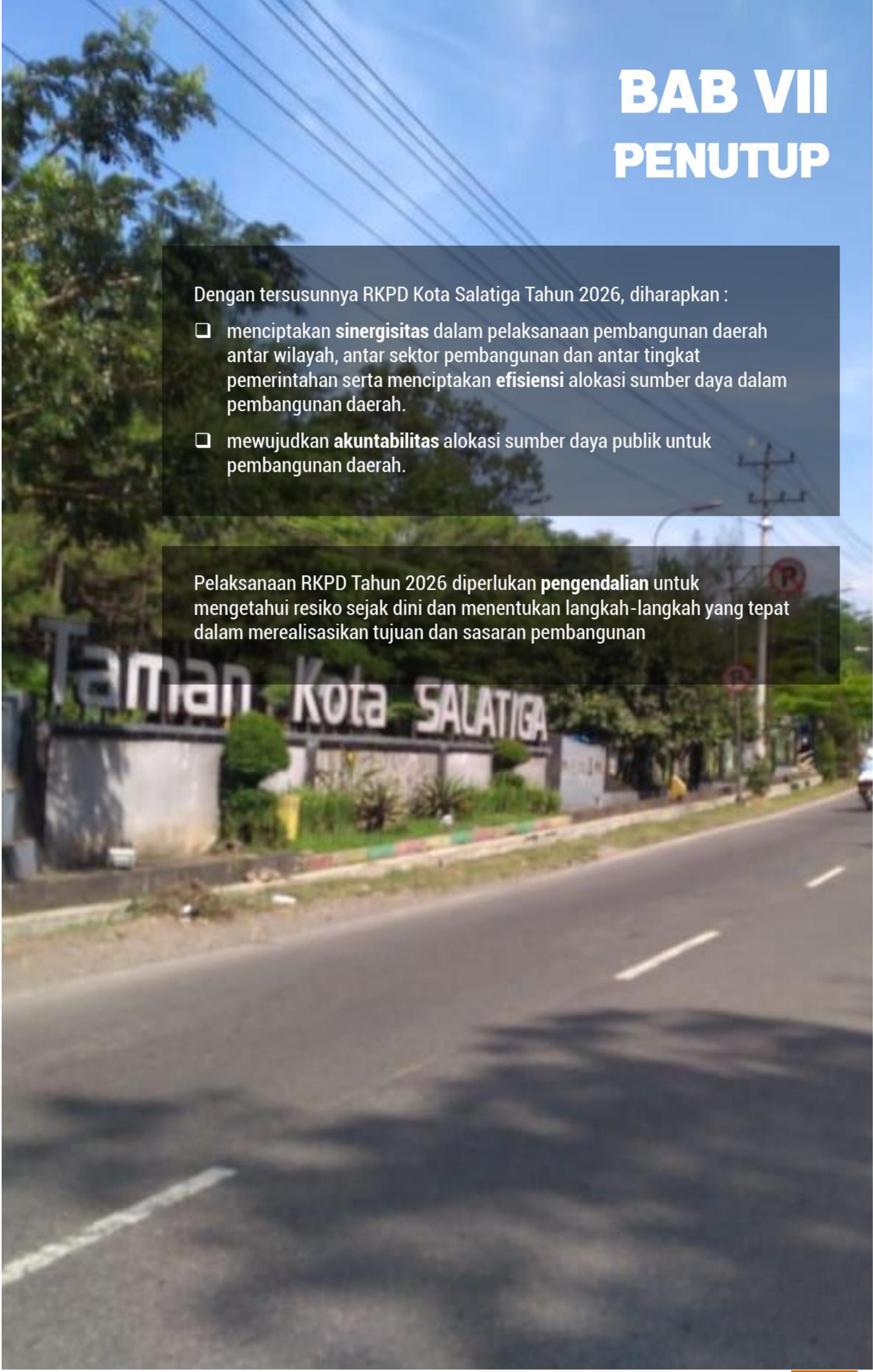
BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, diharapkan :

- ❑ menciptakan **sinergisitas** dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan **efisiensi** alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- ❑ mewujudkan **akuntabilitas** alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 diperlukan **pengendalian** untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan



BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 menjadi pedoman untuk Menyusun (KUA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan tahun kedua untuk pelaksanaan Perencanaan Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat untuk periode 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2026 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN



bit.ly/rkpdsalatiga

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BAPPEDA



Gd. BAPPEDA
Kantor Wali Kota Salatiga
Jl. Sukowati 51



bappeda.salatiga.go.id



[bappedasalatiga](https://www.instagram.com/bappedasalatiga)